PELUANG AL-ZAYTUN DI TENGAH PASAR DUNIA

BERITA INDONESIA®

Edisi 12/Th.I/ 21 April - 4 Mei 2006

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

PISAU BERMATA DUA

AL - ZAYTUN

PUSAT PENDIDIKAN,
PENGEMBANGAN BUDAYA TOLERANSI DAN PERDAMAIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Syaykh beserta seluruh Keluarga Besar
Civitas Akademika Al-Zaytun

mengucapkan

Selamat & Sukses

80 Tahun

1926 - 2006

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Yang diperingati dari tanggal 10 April 2006 hingga 28 Mei 2006

MA'HAD AL-ZAYTUN
BUDAYA TOLERANSI SERTA PENGEMBANGAN

Semoga Kita Semua Selalu Mendapatkan Tolong Dan Karunia Allah
Serta Kejayaan Dalam Menghantarkan Cita-Cita Pendidikan Yang Kita Emban
Demi Kejayaan Indonesia Dan Umat Manusia

Al-Zaytun , 12 Rabi' al-Awwal 1427 H
10 April 2006 M

Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang
Syaykh Al - Zaytun

Alamat : Indramayu – Indonesia Telp : (0234) 742815, 742816, 742822 Fax : (0234) 742833 E_mail : zaytun99@yahoo.com

DAFTAR ISI

Sampul: Eri Irawan
Karikatur: Dandy Hendrias

Edisi No.12/Th.I/**21 APRIL - 4 MEI 2006**

DARI REDAKSI 4
SURAT KOMENTAR 5
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 7
BERITA TERDEPAN 12
VISI BERITA 13

BERITA UTAMA
PISAU BERMATA DUA
Para buruh, jika tidak hati-hati melangkah, satu kaki mereka bisa terperangkap lubang PHK. Boleh jadi mereka bergabung di dalam barisan panjang penganggur 14

LENTERA
PELUANG AL-ZAYTUN DI TENGAH PASAR DUNIA
Pemerintah harus menaruh perhatian terbuka kepada setiap lembaga pendidikan tinggi, dan berusaha untuk bertindak selaku fasilitor yang objektif 34

WILSON EDWARD

Wajah Buram Pengangguran 18
Mereka Membeli Angin 19
Jangan Abaikan Tripartit 21
Produk China Dirindu Lalu Dibenci 23
Industri Sepatu Butuh 5 Deregulasi 25

BERITA PROFIL
Dr. H. Deding Ishak Ibnu Sudja, SH., MM 27

BERITA WAWANCARA
Laksamana TNI Slamet Soebijanto. 30

BERITA EKONOMI
Eksodus Investasi Pengusaha Keturunan 32

BERITA OPINI
Kasmir Tri Putra, MM 39

BERITA NEWSMAKER
Prof. DR. Amien Rais 40

BERITA HUKUM
Novum dari Sukamiskin 42
Manuver Liar di Negeri Jiran 43

BERITA NASIONAL
Kepala Desa Kembali Turun Gunung 44
PDIP Tolak Kades Berpolitik 45

BERITA DAERAH
Malaysia Kembali Melirik Perbatasan 46
Badai Menerjang Kuta 47

BERITA POLITIK
Jalan Terjal Angket Cepu 48

BERITA OLAHRAGA
Menanti Si 'Orange' Juara 49

BERITA HANKAM
Tetap Jaya di Usia 60 Tahun 50
Pegang Teguh Jati Diri TNI 51

BERITA PEREMPUAN
Prihatinkan Wilayah Pribadi Diblow Up Media 52
Satu Anak, Dua Negara 53

BERITA IPTEK
Thosiba Luncurkan HD DVD Player Pertama 54

BERITA MANCANEGARA
Thai Terkepung Krisis 55

BERITA MEDIA
Suaka Papua Mencakar Tetangga 56
Izin yang Membelok 57

BERITA FEATURE
Puteri yang Menyingkap Kegelapan 58
Aku Mau Kesetaraan 59
Seekor Macan Untuk Wilhelmina 60
Bukan Perempuan Biasa 61

BERITA HUMANIORA
Wajah Baru Untuk Jilah 62
Gangguan Roh Halus atau Kejiwaan? 65

BERITA KESEHATAN
Maut yang Mengintai Kerah Biru 65

BERITA LINGKUNGAN
Bila Selebriti Peduli 66

BERITA TOKOH
Des Alwi 28

BERITA INDONESIA

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang
Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang
Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto
Anis Fuadi
Redaktur Pelaksana:
Anna Fauzia Diponegoro
Mangatur Lorielcide Paniroy (Website)
Sekretaris Redaksi
Retno Handayani
Kepala Litbang dan Pusat Data:
Suryo Pranoto
Staf Redaksi:
Haposan Tampubolon
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Henry Maruasas
Christian Natamado
M Subhan
Sanita Retmi
Amron Ritonga
Hotman L Gaol
Wartawan Foto:
Wilson Edward
Redaktur Bahasa dan Pracetak
Marjuka Situmorang
Mangatur Lorielcide Paniroy
Desainer:
Eri Irawan, Esero Design
Biro Redaksi:
Medan: H. M. Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang **Purwakarta:** Benhard Sihite
Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT Citraprinsip Publisitas Indoadprint
Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang
Direktur/ Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang
Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri
Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Watty Soetikno
Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorielcide Paniroy
Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang
Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)
Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)
Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 9101871
E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com
Website:
www.beritaindonesia.co.id

Tim artistik *Berita Indonesia*, dari kiri Dandy Hendrias, Eri Irawan dan Wilson Edward.

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera

Pembaca yang budiman,

Dengan hadirnya *Berita Indonesia* setiap dua minggu sejak edisi-10, ritme kerja di dapur redaksi kami kian terasa semarak. Kami bukan sekedar memenuhi jadwal *deadline* setiap minggunya, tapi juga terus berupaya meningkatkan mutu. Baik mutu berita, mutu tulisan, juga desain dan ilustrasi.

Yang tidak kalah sibuk di dapur kami adalah Tim artistik. Tyim ini terdiri dari Eri Irawan sebagai desainer grafis, Dandy Hendrias ilustrator dan Wilson Edward fotografer. Ketiga awak artistik ini saling melengkapi untuk memperindah tampilan majalah. Ini semua karena kami ingin melayani pembaca sebaik mungkin.

Dalam edisi ini, kami menulis laporan utama mengenai nasib buruh di antara pisau bermata dua. Badai aksi protes buruh yang belum lama berlalu, masih menyisakan tanda tanya, bagaimana nasib buruh selanjutnya? Gelombang protes yang menentang revisi UU Ketenagakerjaan 13/2003—berlangsung dari akhir Maret sampai pekan pertama April—mengguncang berbagai kota di Jawa, seperti Surabaya, Semarang, Bandung dan Jakarta. Puncak amarah puluhan ribu buruh dilampiaskan di depan Istana Merdeka, Rabu siang (5/4).

Puncak itu kemudian mendorong Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono untuk segera memimpin pertemuan tiga pihak (tripartit) yang dihadiri Wapres dan 12 menteri, 11 pengusaha dan 30 wakil serikat buruh di Istana Negara (7/4). Di akhir pertemuan presiden mengingatkan bahwa solusi masalah perburuhan mesti mengacu pada tiga pilar, yaitu: proteksi terhadap kesejahteraan dan hak-hak buruh, tumbuhnya dunia usaha, dan bangkitnya ekonomi nasional.

Pembaca, karena majalah ini terbit berbarengan Hari Kartini, 21 April 2006 maka kami selipkan laporan mengenai perjalanan '**Puteri yang Menyingkap Kegelapan'. Sebab p**emikirannya yang progresif tentang rasionalisme dan pembebasan hak-hak perempuan telah mampu membuka zaman baru bagi Indonesia.

Selamat menikmati sajian kami.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http://www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A
  Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
  Telp. (021) 70930474, 8293113
  (021) 83701736
  Fax. (021) 8293113, 9101871

Polusi Kendaraan dan Polusi Rokok

Saya melihat berita tentang orang yang didenda karena merokok di luar ruangan yakni merokok di area parkir mal. Sungguh menggelikan melihat cara peraturan itu berlaku. Sepuntung rokok diartikan sebagai polusi udara. Lantas, bagaimana dengan motor-motor dan bus-bus yang setiap harinya mengeluarkan asap hitam apakah itu tidak diartikan sebagai polusi tingkat berat? Negara kita memang serba nggak jelas. Saya sih malu sebagai pemerintah kalau cuma bisa denda orang ngerokok di tempat parkir dibandingkan mendenda kendaraan bermotor berasap knalpot hitam. Bagaimana bisa maju Indonesia, kalau gini terus?

Bayu Pontiagust,
pontiagust@yahoo.com

Hukuman Mati

Hukuman mati adalah hukuman yang paling polemik di antara sekian banyak bentuk hukuman yang lain. Dia selalu mengundang diskusi dan debat yang hangat dalam masyarakat antara yang pro dan kontra. Saya secara pribadi menentang keras hukuman mati dengan alasan dan tujuan apa pun. Kita semua harus ingat kalau kehidupan manusia adalah kehidupan yang bermartabat dalam dirinya sendiri. Karena itu hidup manusia mempunyai nilai yang paling luhur di atas bumi ini karena hanya Tuhan sendiri yang bisa mengambilnya kembali. Karena itu tidak seorang pun, bahkan sebuah negara atau pemerintahan yang sah dibenarkan secara etis dan moral untuk mengeksekusi seseorang. Kalau orang itu melanggar hukum yang berat, bisa dijatuhi penjara seumur hidup.

Leonardus Neno,
yasintusneno@uol.com.br

Akhirnya Nurlaila Bebas

Akhirnya Nurlaila bebas. Begitu pertama yang tersebut dalam hati saya, ketika koran-koran ibukota memberitakan dibebaskannya Nurlaila guru SMP 56 Melawai. Di dua harian Ibukota yang saya baca, begitu harunya saya menahan setetes airmata kebahagiaan.

Saya memang tidak mengenal siapa Nurlaila, tapi Nurlaila adalah potret buram guru di negeri ini, yang karena membela agar murid-muridnya tetap bersekolah, yang karena keteguhannya melawan ketidakadilan karena menolak tukar guling SMPN 56, yang akhirnya karenanya kemudian Beliau dipecat jadi pegawai Negeri. Ibu Nurlaila, selamat atas kebebasanmu, kami turut bersyukur, karena aku tahu Engkau tidak merugikan negara, tidak korupsi, dan meski aku tau Engkau pula tidak mampu memberikan 'sesuatu' pada hakim jaksa, namun Allah maha tahu, hakim yang menangani masih mempunyai hati nurani dan rasa keadilan. Terima kasih Pak Hakim.

Suyoto, SE,
arjuna210605@yahoo.com

BUNG WARTO

Kapan Kenaikan Gaji Pensiunan TNI/Polri?

Singkat saja, saya mungkin mewakili kegundahan para istri purnawirawan TNI yang menunggu realisasi janji pemerintah yang akan menaikan gaji pensiunan, yang selalu simpang siur beritanya. Sampai bulan April ini belum juga direalisasikan. Kebutuhan sudah naik! Harga sembako umumnya naik, biaya transportasi naik akibat kenaikan BBM, kebutuhan untuk biaya-biaya hidup lainnya terutama untuk hidup layak semakin tinggi. Kami menjerit atas beban ini, kualitas hidup kami yang sudah tua semakin menurun. Saya mau mengadu tapi kepada siapa? Bingung, kenaikan gaji pensiunan ini benar-benar kami harapkan, kapan pastinya, berapa besaran kenaikannya? Dengan usia kami yang sudah semakin tua bukan berarti kualitas hidup kami harus menurun dan bukan berarti kami tidak mempunyai problem keuangan. Sejujurnya kami harapkan bisa berleha-leha atas jerih payah kami selama masih dinas dulu.

Ny. Darman,
wahyu57@gmail.com

Pelestarian Kebudayaan Bukan Alasan Logis Menolak UU APP

Tidak lama lagi yaitu sekitar bulan Juni Pemerintah akan segera mensahkan UU APP/ Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Telah disebutkan di dalamnya bahwa UU tersebut akan disesuaikan dengan Perda yang berlaku di masing-masing wilayah. Kebijakan ini tidak lain ditetapkan sebagai jawaban atas protes penolakan UU yang dilakukan oleh beberapa pihak yang menganggap bahwa UU APP akan dapat memberangus kebudayaan. Mereka mengkhawatirkan jika UU APP disahkan maka kebiasaan masyarakat Papua yang memakai koteka, para wanita Jawa yang memakai kemben nantinya akan dilarang.

Untuk menanggapi hal ini tentu saja kita harus sepakat terlebih dahulu, kebudayaan seperti apa yang seharusnya dilestarikan, apakah setiap kebudayaan yang merupakan kebiasaan khas dari daerah pasti harus dilestarikan walaupun merendahkan martabat manusia? Tentu saja kebudayaan yang harus dilestarikan adalah kebudayaan yang mencerminkan ketinggian martabat manusia dan selaras dengan nilai-nilai yang telah digariskan Sang Pencipta, Allah S.W.T.

Kebudayaan yang tidak sesuai dengan martabat dan nilai-nilai yang yang digariskan Allah jelas tidak perlu dilestarikan. Kebudayaan yang mengumbar aurat dan mengeksploitasi perempuan demi memuaskan nafsu seksual laki-laki jelas tidak perlu dilestarikan walaupun hanya karena alasan untuk menjaga tradisi leluhur atau alasan seni.

Dan akan menjadi lebih baik lagi jika misalnya masyarakat Papua dengan kebiasaan memakai koteka-nya mulai diajak dan diajari untuk berpakaian yang lebih benar dan beradab yaitu dengan pakaian yang menutup aurat.

Silviana,
silviana_d@yahoo.com

Mana Sisi Positif Guru di Sinetron Indonesia?

Saya sedih dan kecewa dengan sinetron di Indonesia saat ini, karena terlalu banyak memperlihatkan kelakuan yang kejam terhadap sesama seperti di sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Tanggal 6 April, saya nonton sinetron Juragan Jengkol, ada adegan seorang anak perempuan yang tomboy tapi ingin mendaftar ikut lomba fashion show, tapi sang guru tidak mendukung. Setelah diancam oleh si siswa, akhirnya sang guru membolehkan siswa tersebut ikut lomba.

Saya sedih melihat alur cerita sinetron, mengapa tidak dibuat alur cerita bahwa si guru merasa surprise ada anak perempuan tomboy mau ikut lomba fashion, dan mendukung niat si anak. Saya banyak menyaksikan perlakuan guru dalam sinetron selalu digambarkan negatif.

Walaupun hanya sebentar ditayangkan, tapi bisa berpengaruh besar akan tanggapan orang tentang dunia pendidikan Indonesia. Apakah di mata para penulis naskah sinetron nggak ada sisi positif guru yang bisa ditampilkan? Terima kasih.

Augustina Ratniawati,
ratniawati@yahoo.com

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITAINDONESIA

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan @ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736 Fax. 9101871

01/04/2006

Presiden Sesalkan Kartun di The Weekend Australian

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan terkejut dan menyesalkan pemuatan kartun dirinya di harian The Weekend Australian edisi Sabtu (1/4) di Australia. Bahkan, Presiden juga menyatakan tidak tertarik untuk melihat kartun tersebut. Meskipun dianggap tidak mewakili sikap bangsa dan Pemerintah Australia, diakui pemuatan kartun tersebut dapat berpotensi memanaskan situasi hubungan kedua negara yang sebenarnya sudah mulai mereda pascapemberian visa sementara terhadap 42 warga Papua.

Pernyataan Presiden itu dikemukakan Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal menjawab pers, seusai menghadiri kuliah perdana Presiden Yudhoyono untuk peluncuran Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Jakarta. Kartun itu menggambarkan seorang berkopiah hitam dan berekor yang digambarkan seperti Presiden Yudhoyono tengah "menunggangi" seorang lelaki berkulit hitam, seperti seorang warga Papua, sambil berkata, "Don't take this the wrong way...". Kartun tersebut dibuat oleh kartunis Australia, Bill Leak. Kartun yang digambar Leak itu mirip dengan kartun yang dimuat sebelumnya di harian Rakyat Merdeka edisi Senin (27/3), saat Pemerintah Indonesia memprotes Pemerintah Australia dan menarik duta besarnya pulang akibat pemberian visa sementara terhadap 42 warga Papua. Kartun di koran itu diberi judul The Adventure of Two Dingo. Digambarkan, seorang laki-laki seperti Perdana Menteri Australia John Howard yang juga sedang menunggangi seseorang yang digambarkan seperti Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, seraya berkata, "I want Papua! Alex coba you mainkan!"

02/04/2006

Puluhan Ribu Umat Mendatangi Vatikan

Puluhan ribu umat Katolik dari berbagai negara berkunjung ke Vatikan. Mereka ingin terlibat langsung pada perayaan setahun meninggalnya Paus Yohanes Paulus II. Mereka juga berdoa agar almarhum Paus Yohanes segera dinobatkan sebagai santo atau orang suci. Umat Katolik sedunia itu antara lain datang dari Polandia, negara asal Paus Yohanes, juga ada yang datang dari Amerika Serikat, Asia, dan Italia sendiri.

Pada perayaan setahun itu, mereka akan mengheningkan cipta tepat pada pukul 21.37 waktu Vatikan atau sekitar pukul 2.37 WIB Senin pagi. Itu adalah waktu detik-detik meninggalnya almarhum Paus Yohanes, yang dilanjutkan dengan acara doa dan dentang lonceng gereja.

Menkes Kunjungi Pasien Face Off

Kasus bedah wajah total (face off) di Surabaya yang menimpa Siti Nur Jazilah alias Lisa menarik perhatian Menteri Kesehatan (Menkes) RI Siti Fadilah Supari. Di sela-sela kesibukan urusan dinas di Surabaya, dia menyempatkan diri mengunjungi Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT) RSU dr Soetomo, tempat Lisa dirawat. Karena prihatin, Menkes pun menangis. Dalam kunjungan singkat itu, Fadilah harus puas melihat Lisa yang tengah tergolek lemah tersebut dari layar monitor. Sebab, kondisi wanita 22 tahun itu masih kritis dan dirawat di Intensive Care Unit (ICU). Ketua Tim Teknis Face Off dr Muhammad Sjaifuddin Noer SpBP menerangkan kondisi Lisa yang tetap stabil. Lisa bisa menggerakkan tangan dan mengungkapkan keinginannya melalui tulisan.

03/04/2006

Ribuan Kades Demo Lagi

Ribuan kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara menggelar aksi unjuk rasa (ketiga kalinya) di depan Gedung Mahkamah Agung dan Depdagri. Mereka menuntut pembatalan larangan

KarikaturBerita

berpolitik dan pengaturan masa jabatan Kepala Desa (Kades). Sebenarnya, tujuh dari sembilan tuntutan para Kades sudah dipenuhi dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri Nomor 140/537/SJ. Namun menurut Ketua Umum Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) Sudir Santoso, SE Mendagri itu belum dilaksanakan para bupati/walikota. Yakni pemilihan Kades yang dibiayai APBD, penghasilan Kades yang layak, aturan pejabat kades, keikutsertaan Kades dalam pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS dan program pembangunan kawasan pedesaaan. "Dua tuntutan lagi (pembatalan larangan berpolitik dan pengaturan masa jabatan Kades–red), kami masih menunggu judicial review di MA," ujar Santoso.

04/04/2006

Rupiah Tembus 9.000/US$

Rupiah, untuk pertamakali selama 17 bulan terakhir ini, mampu menembus level 9.000 per dolar AS, sementara Bank Indonesia tetap akan mempertahankan suku bunga tinggi meski laju inflasi mulai terkendali. Nilai tukar rupiah pada sesi penutupan menguat menjadi 8.990 per dolar AS dari posisi sebelumnya 9.038, menyusul respons positif pasar atas realisasi inflasi Maret yang hanya 0,03%. Data Reuters menunjukkan beberapa saat setelah perdagangan dibuka, rupiah terus menguat ke level 8.992 dan melemah kembali ke posisi 9.995 di akhir sesi pagi. Selain itu, pernyataan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah bahwa bank sentral akan mempertahankan kebijakan moneter ketat hingga semester I 2006, juga dinilai ikut mendorong penguatan rupiah. "Saya kira tight-bias policy akan dipertahankan. Rapat dewan gubernur minggu depan akan membicarakan hal ini," ujarnya.

05/04/2006

Unjuk Rasa Buruh di Jakarta Berakhir Ricuh

Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima 10 orang wakil ribuan buruh yang berunjuk rasa menolak rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Istana Wapres. Unjuk rasa dengan tema yang sama juga diikuti puluhan ribu buruh di beberapa kota lainnya, di antaranya Surabaya, Malang, Gresik, Sidoarjo, Banjarmasin, Medan, Palembang, dan Jayapura. Seusai menerima buruh, Wapres menyatakan ada salah persepsi soal revisi UU tersebut. "Itu bukan revisi sama sekali. Itu suatu draf revisi yang akan dibicarakan dengan serikat buruh dan pengusaha. Setelah itu baru dibawa ke DPR. Banyak salah persepsi seolah-olah ini sudah direvisi. Ditambah lagi isu akan diberlakukan Mei. Masuk DPR saja belum. Butuh waktu setidak-tidaknya enam bulan untuk diberlakukan," ujarnya. Meski sudah diterima Wapres, unjuk rasa puluhan ribu buruh di Jakarta berlangsung ricuh. Sejumlah buruh merobohkan pagar Balaikota DKI Jakarta yang ada di samping istana Wakil Presiden. Sejumlah taman, papan petunjuk lalu lintas, dan lampu lalu lintas di kawasan Silang Monas turut dirusak para buruh. Bahkan, sebuah bus transjakarta yang terjebak di kawasan itu juga dirusak dan akan dibakar. Namun, aksi itu berhasil dicegah polisi. Akibatnya, 11 orang ditahan di Markas Polda Metro Jaya.

06/04/2006

Hati-Hati Merokok di Jakarta

Penerapan larangan merokok di DKI Jakarta yang diikuti dengan operasi mendadak di sejumlah tempat umum di DKI, berhasil menangkap basah warga yang merokok di tempat terlarang. Beberapa perokok yang tertangkap basah, langsung dibawa ke depan majelis hakim untuk disidang, dan didenda Rp 50.000. Untuk melaksanakan operasi tersebut, Gubernur DKI Sutiyoso mengerahkan 27 tim khusus untuk memantau pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2005 dan Peraturan Gubernur nomor 75 tahun 2005 ini. Perda nomor 2 secara khusus mengatur tentang pengendalian pencemaran udara. Salah satu pasalnya menyangkut tentang larangan merokok di tempat umum. Sementara Pergub nomor 75 berisi tentang larangan merokok di wilayah DKI, khususnya di tempat umum.

Mantan Dirut Jamsostek Dituntut 16 Tahun

Mantan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaidi (60) dalam sidang di

KarikaturBerita

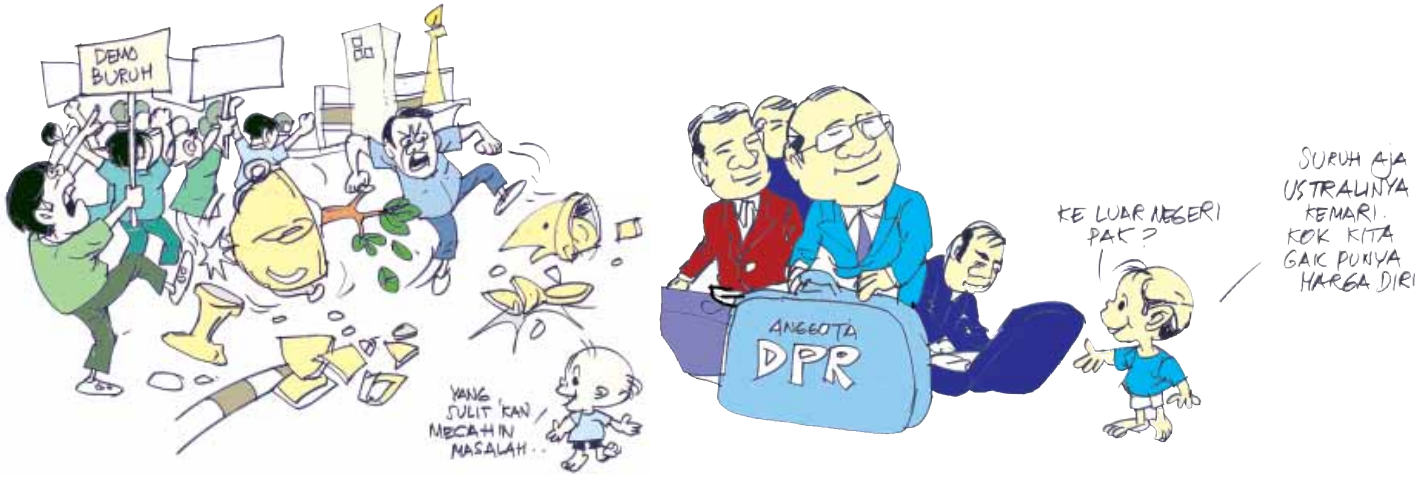

KOMPAS

P

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dituntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Ahmad Djunaidi juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp 133,25 miliar paling lambat sebulan setelah putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dipimpin majelis hakim yang diketuai Sri Mulyani. Ahmad Djunaidi dinilai melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) sepanjang bulan Maret-Oktober 2001, yang merugikan negara Rp 311,085 miliar. Surat utang jangka menengah itu diterbitkan oleh PT Dahana (Rp 97,835 miliar), PT Sapta Prana Jaya/SPJ (Rp 100 miliar), PT Suryaindo Pradana/SIP (Rp 80 miliar), dan PT Volgren (Rp 33,25 miliar).

07/04/2006

Majalah Playboy Terbit

Majalah khusus pria dewasa, Playboy edisi Indonesia yang rencana penerbitannya sempat dibayangi ancaman demonstrasi dan juga sweeping, akhirnya beredar di pasaran mulai Jumat (7/4). Berbeda dengan munculnya media baru, pengelola Playboy edisi Indonesia sama sekali tidak membagikan majalah itu kepada relasi dan kalangan media massa lainnya. Sampul depan majalah diisi senyum wajah artis Andhara Early dan informasi mengenai beberapa artikel pilihan termasuk wawancara khusus dengan penulis terkenal Pramoedya Ananta Toer. Menurut rencana, majalah yang diterbitkan PT Velvet Silver Media sekaligus pemegang lisensi Playboy di Indonesia itu akan beredar setiap bulan.

08/04/2006

Presiden dan PM Belanda Bertemu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende melakukan pertemuan tet a tet (empat mata) dalam membicarakan hubungan bilateral kedua negara, di Istana Merdeka mulai pukul 10.00. Pembicaraan kedua pemimpin negara ini menyangkut banyak hal, mulai dari kerjasama kedua negara, rekonstruksi Aceh dan Nias, penanganan terorisme dan dialog antariman sampai investasi kedua negara. Pertemuan antara kedua pemimpin negara itu diikuti dengan pertemuan para delegasi dan diplomat kedua negara, untuk pembicaraan lebih teknis, juga berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan.

09/04/2006

Peringatan HUT TNI AU ke-60

Peringatan HUT ke-60 TNI Angkatan Udara (AU) ditandai dengan upacara militer di Taxi Way Echo Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Selain parade, demo udara, terjun payung, dan drumband Karbol Akademi Angkatan Udara, pe-

ringatan dimeriahkan dengan penampilan 57 pesawat berbagai jenis yang dimiliki TNI-AU dan FASI (Federasi Aero Sport Indonesia). Peringatan HUT ke-60 TNI-AU yang bertema "Jiwa dan Semangat Swa Bhuwana Paksa - Landasan Pengabdian Insan AU" diwarnai berbagai kegiatan, seperti ziarah, antara lain ke makam Bapak AURI Komodor Udara Suryadi Suryadarma di TPU Karet Bivak, dan pada Malam Silaturahmi diberikan penghargaan kepada perwira berprestasi dan peluncuran buku-buku kedirgantaraan.

10/04/2006

Peringatan 80 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor

Wakil Presiden M Jusuf Kalla membuka secara resmi peringatan 80 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di aula Pondok Modern Darussalam Gontor di Desa Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Acara itu dihadiri oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni dan pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Syukri Zarkasih. Peringatan 80 tahun pondok tersebut, didahului pembacaan kalam Illahi, laporan pimpinan pondok, sambutan Menag dan diakhiri dengan sambutan Wapres. Penutupan peringatan acara ini dijadwalkan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei. Pondok ini mempunyai ribuan alumni antara lain almarhum Nurcholish Majid, Emha Ainun Najib, dan Azyumardi Azra. Pondok modern Darussalam Gontor adalah pelopor modernisasi sistem pendidikan pesantren model ini. Sejak dibuka tahun 1926, pondok ini telah didesain oleh para pendirinya menjadi pesantren modern. Pesantren ini didirikan oleh tiga bersaudara, putra almarhum Kyai Santoso Anom Besari, yakni Ahmad Sahal, Zainuddin Fananie dan Imam Zarkasyi. Mereka sekarang ini dikenal sebagai tiga serangkai (Trimurti). Pada tahun 2006, pondok ini berkembang luas menjadi 10 pondok cabang, 180 pondok alumni Gontor di seluruh Indonesia.

10/04/2006

KarikaturBerita

KOMPAS

P

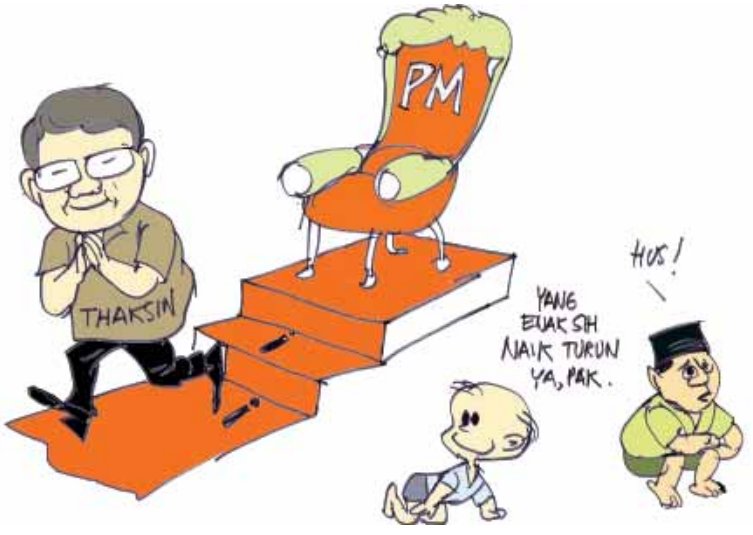
PM
THAKSIN
YANG ENAK SIH NAIK TURUN YA, PAK.
HUS!

VISA SEMENTARA
DUBES

Bang Yos Kecolongan

Keteguhan hati Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso untuk memperjuangkan kesatuan wilayah tata ruang sekawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur patut dihargai. Salah satu tujuannya tentu mengendalikan banjir yang masuk Jakarta. Ironisnya, guyuran hujan siang hari menggenangi halaman Istana.

Kali ini Sutiyoso lengah. Tumpahan air hujan lebat yang mengguyur Jakarta, Selasa (11/4), mengirim banjir sampai ke Istana Merdeka. Sedihnya, air menggenangi halaman Istana tatkala para petinggi negara sedang mengadakan rapat. Sedan dinas Wapres Jusuf Kalla terpaksa diungsikan ke tempat parkir yang lebih tinggi untuk menghindari genangan air.

Hujan lebat tengah hari itu tidak hanya menggenangi halaman Istana, tetapi juga menelan jiwa tiga orang di kawasan Tanah Abang. Awalnya, sebuah mikrolet yang melintas Jalan Abdul Muis, ditimpa pohon yang tumbang. Ketiga penumpang yang tewas terjebak di dalam mikrolet.

Agaknya Sutiyoso, akrab dipanggil Bang Yos, kurang teliti membaca perubahan cuaca. Biasanya kalau terjadi hujan deras, baik di Puncak, Bogor maupun Jakarta, Pemda DKI mewanti-wanti para petugas pintu air untuk mengalihkan air agar tidak melintasi kali di depan Istana Negara. Namun kali ini bukan banjir kiriman. Bisa jadi banjir yang diakibatkan oleh mampatnya saluran air di sekeliling Istana Merdeka dan Istana Negara.

Padahal Bang Yos sudah bertekad menutup buku mengenai banjir, menata 13 sungai melalui kerjasama kawasan megapolitan. Program itu juga dimaksudkan untuk menyulap sungai-sungai berlumpur hitam dan kotor menjadi sarana transportasi air, terpadu dengan rel kereta api, *monorail, subway, busway.* Semua ini ditata dalam satu konsep Pola Transportasi Makro (PTM) yang revolusioner.

Soal banjir, selama ini untung saja ada katup-katup pengaman yang membuat luapan kiriman bisa dibelokkan sesuka hati oleh para penjaga pintu tanggul di Manggarai, Depok atau Bogor. Banjir kiriman tidak boleh menggenangi kawasan yang membentang dari Menteng sampai ke Monas dan Istana. Jadi banjir boleh setiap tahun menimpa warga yang bermukim di bantaran kali Ciliwung, Kampung Melayu, Cipinang atau kompleks perumahan Ciledug Indah I di Tangerang. Tetapi kawasan elit, termasuk kediaman resmi gubernur di kawasan Jalan Taman Suropati No. 7 Menteng, Jakarta Pusat, harus bebas dari banjir kiriman.

Akan tetapi hujan lebat yang terkonsentrasi di kawasan Jakarta Pusat Selasa itu membuat warga Jakarta tersentak. Bukan hanya lantaran menelan jiwa tiga penumpang mikrolet dan menimpa sebuah mobil di kawasan Cikini, namun menciptakan kemacetan sampai hampir lima jam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika air merambat naik di beranda Istana, sedang memimpin rapat kabinet yang membahas zona ekonomi khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani, keluar dari rapat harus berjalan kaki dari Istana Kepresidenan menuju kantornya, Departemen Keuangan, di Lapangan Banteng, yang berjarak satu kilometer. Mobil Menteri terjebak kemacetan hebat persis di depan kantor Pertamina.

Jubir Presiden Andi Mallarangeng membenarkan beberapa tempat di Istana, seperti ruang konperensi pers, tergenang air hingga sebatas mata kaki. "Kami semua, termasuk Presiden, tidak tahu terjadinya banjir sehingga rapat berjalan terus," kata Andi.

Ternyata banjir Jakarta tidak melulu disebabkan oleh kiriman dari Puncak atau Bogor. Tanpa disadari gorong-gorong saluran air (drainase) di seluruh Jakarta sudah tak lagi terawat dengan baik, atau tak lagi mampu berfungsi sebagai penyalur aliran air. Atau karena kebetulan sedang tersumbat oleh sampah bekas makanan, minuman, potongan kayu, kain dan barang bekas lainnya yang bisa ditemukan di saluran air sekitar Jalan MH Thamrin.

Seluruh warga Jakarta belakangan silau dengan ancaman banjir kiriman, tetapi lengah memperhatikan banjir yang disebabkan saluran air yang mampat. Bang Yos selama tahun 2006, tidak segan-segan mengalokasikan anggaran Rp 600 miliar untuk mengatasi banjir kiriman. Rencananya dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah drainage (sodetan).

Banjir dadakan dan singkat hanya satu jam saja, pertanda pergantian musim kali ini memang agak lain. Yang terguyur lalu tergenang hanyalah kawasan seputar Jakarta Pusat seperti Jalan Kebon Sirih, MH Thamrin, Medan Merdeka Selatan, hingga Tanah Abang, Bendungan Hilir dan Menteng yang terendam 30 sampai 60 cm. Genangan air setinggi 10 sampai 15 cm juga merangsek hingga ke ruang Biro Humas dan Crisis Center di Balaikota, dan ruang Konperensi Pers di Istana Presiden.

Genangan banjir tepat di depan halte gedung pertokoan Sarinah, di Jalan MH Thamrin membuat arus lalu lintas semrawut. Sepeda motor hingga mobil pribadi berebut menggunakan jalur *busway* membuat 10 bus Trans Jakarta yang datang dari arah Kota menuju Blok M terhenti tanpa bisa bergerak. Imbasan efek dominonya luar biasa, kemacetan merebak kemana-mana termasuk apa yang menimpa Sri Mulyani.

Bang Yos kali ini lengah bahwa air yang menggenangi beranda Istana bukan banjir kiriman, tetapi air liar yang tak menemukan saluran. ■ HT, SH

BURUH DAN PENGANGGUR

Suram, lesu dan hampir frustrasi. Barangkali inilah gambaran wajah Indonesia setelah digencet krisis ekonomi selama hampir satu dekade (1997-2006). Dan bertambah suram setelah pemerintah menaikkan harga BBM setinggi langit tanggal 1 Oktober tahun lalu.

Kenaikan harga BBM otomatis mendongkrak komponen biaya (cost) pada hampir semua sektor. Kenaikan yang sangat tinggi dan dua kali dalam setahun, atau rata-rata 158% sepanjang tahun 2005, sudah tentu berdampak pada lonjakan biaya.

Pemerintah, tergencet kesulitan ekonomi yang berlapis-lapis, berniat merangsang investasi di sektor industri dengan merevisi UU Ketenagakerjaan (no.13/2003) yang sedang berlaku efektif. Tetapi niat itu tak mudah menjadi kenyataan karena terkait banyak faktor.

Peraturan perburuhan memang faktor penentu untuk menciptakan ketenangan dan keamanan berusaha yang bisa memikat calon investor. Namun masih banyak faktor lain yang harus diperhatikan pemerintah; seperti sektor perbankan, moneter, insentif pajak (tax holiday), perizinan, biaya-biaya siluman dan kepastian hukum. Faktor-faktor ini harus diluncurkan dalam satu paket sehingga para calon investor bisa dirangsang dari berbagai segi.

Jauh sebelum krisis moneter tahun 1997, sektor industri memberi sumbangan sangat besar bagi bergeraknya roda ekonomi negara sehingga tumbuh sampai 7% setahun. Bilamana sektor ini menggeliat kembali—sudah banyak yang gulung tikar dan lari ke negara-negara lain—pemerintah berharap mampu mendorong ekspor dan membuka lapangan kerja.

Maksud pemerintah memikat investor, apadaya menuai perlawanan keras dari kaum buruh. Usulan revisi tersebut; (1) apabila pekerja memutuskan kontrak sebelum waktunya, wajib mengganti rugi sebesar sisa kontrak; (2) semua jenis dan sifat pekerjaan bisa dikontrakkan ke pihak ketiga (outsourcing); (3) pekerja yang menentukan kerja lembur, tidak berhak

mendapatkan upah lembur; (4) cuti sebulan bagi pekerja yang sudah bekerja enam tahun, dihapus; (5) PHK tanpa syarat; (6) uang pesangon maksimal 9 bulan upah, dikurangi jadi 7 bulan upah; (7) pekerja yang upahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, tidak berhak mendapat pesangon.

Inilah poin-poin yang dianggap merugikan pekerja, dan menguntungkan pengusaha. Bagi pekerja, revisi sepihak tersebut seakan-akan mengembalikan perlakuan tidak adil yang mereka alami di masa lalu.

Siapa pun di negeri ini sangat menginginkan kehadiran ivestor untuk membuka lebar lapangan kerja. Dewasa ini ada 25, 5 juta buruh yang bekerja di sektor industri, dan 40 juta lebih penganggur. Di antara mereka terdapat penganggur terbuka (10,8 juta) dan penganggur terselubung (29,6 juta).

Sedangkan pemerintah sangat berkepentingan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menyerap ledakan tenaga kerja dan pengangguran. Selain itu, tentu menambah pendapatan devisa negara dari ekspor.

Memang yang dikeluhkan para investor; kondisi perburuhan —seringnya terjadi pergolakan dan pemogokan buruh— membuat mereka merasa tidak nyaman lagi berusaha di Indonesia. Mereka pindah ke negara-negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Pakistan, bahkan China.

Namun tidak realistis bagi para investor bermimpi, kembalinya sorga investasi di Indonesia karena pengebirian habis-habisan hak-hak buruh: diatur oleh undang-undang yang menetapkan upah yang sangat rendah, dan melarang demo serta pemogokan buruh. Sebaliknya, juga tidak realistis apabila upah ditetapkan terlalu tinggi, dan buruh diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk melancarkan demo dan pemogokan. Mesti ada langkah-langkah kompromi untuk mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan tersebut.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah berada dalam posisi yang sangat dilematis; memenuhi tuntutan pekerja namun kehilangan momentum untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sehingga bisa membuka lapangan kerja. Memang harus diambil jalan tengah, undang-undang tenaga kerja yang tidak merugikan para pekerja, tetapi juga tidak memberatkan para pengusaha.

Di sisi lain, pemerintah menghadapi ancaman ledakan bom waktu pengangguran yang sudah menyentuh angka 40 juta lebih. Sementara itu, tak kurang dari 2,5 juta pencari kerja memasuki pasar kerja setiap tahun. Namun secara kualitas mereka tidak bisa diserap secara memuaskan oleh pasar kerja dalam negeri. Penyebab utamanya, rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) yang masuk ke pasar kerja. Mereka hanya bisa diserap oleh sektor formal yang membutuhkan tenaga kerja kasar (kurang terdidik). Sekitar 11% pencari kerja atau 275.000 orang, kalah bersaing di pasar kerja. Sedangkan buruh yang kena PHK selama tahun 2005, tak kurang dari 109.000 orang.

Fenomena kebekuan sektor riil selama hampir sepuluh tahun terakhir, mempersuram iklim perburuhan, tidak banyak memberi harapan bagi para penganggur dan pencari kerja. Paling tidak, ada tiga jalan keluar; menekan pertumbuhan angkatan kerja, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan mempercepat transformasi sektor informal ke sektor formal.

Namun mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan.■

Gejolak Buruh dan Pengangguran

Pisau Bermata

Para buruh, jika tidak hati-hati melangkah, satu kaki mereka bisa terperangkap lubang PHK. Boleh jadi mereka bergabung di dalam barisan panjang penganggur.

Badai aksi protes buruh sudah berlalu. Gelombang protes yang menentang revisi UU Ketenagakerjaan 13/2003—berlangsung dari akhir Maret sampai pekan pertama April—mengguncang berbagai kota di Jawa, seperti Surabaya, Semarang, Bandung dan Jakarta. Puncak amarah puluhan ribu buruh dilampiaskan di depan Istana Merdeka, Rabu siang (5/4).

Pemerintah mendengarkan protes para buruh, menangguhkan revisi sampai adanya kesepakatan yang dicapai forum tripartit—wakil-wakil pemerintah, pengusaha dan buruh. Usulan revisi menyangkut lima hal; penentuan upah dialihkan ke pemerintah kabupaten/kota, aturan mogok kerja, penyesuaian pesangon dan masalah PHK, aturan kontrak pekerjaan (*outsourcing*) dan perizinan pekerja asing.

Para demonstran buruh yang mengamuk, merusak tanda-tanda lalulintas, marka jalan, dan pot-pot tanaman pecah berantakan. Akibat ulah mereka pemerintah DKI Jakarta menanggung kerugian

Dua

material sampai Rp 700 juta lebih. Namun kemalangan itu tak seberapa dibandingkan dengan kerugian yang diderita sejumlah pabrik tekstil di Jawa Barat.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menerima laporan kerugian senilai Rp 70 miliar dari sejumlah pabrik tekstil di Cimahi dan Batujajar, karena buruh-buruh mereka dipaksa mengikuti aksi demo, menghentikan mendadak mesin-mesin yang sedang berproduksi. Karena berhenti mendadak barang-barang yang ada di mesin rusak, dan pabrik kehilangan waktu produksi yang sudah dijadwalkan sehingga produktivitas mengalami penurunan. Karena itu, API sedang menyiapkan gugatan hukum kepada serikat pekerja.

Puluhan ribu buruh yang turun serentak ke jalan di berbagai kota (4/4), menolak revisi undang-undang yang dianggap melemahkan posisi buruh dihadapan majikan. Tak kurang dari 10.000 buruh, bergabung di dalam Aliansi Buruh Menggugat, dalam perjalanan dari Bundaran HI menuju Istana Merdeka, Jakarta, memaksa radio milik negara, RRI, untuk menyiarkan pesan-pesan mereka. Perwakilan buruh memaksa masuk, dan menyiarkan pesan mereka selama lima menit:"Kami akan tetap berdemo jika sampai 1 Mei revisi tidak dicabut."

Reaksi Asosiasi Pengusaha Indonesia beragam menanggapi aksi buruh. Pucuk pimpinan Apindo Hasanuddin Rachman mengecam keras aksi yang dianggapnya tidak konstitusional itu. "Mereka bermasalah dengan pemerintah," kata Hasanuddin, "buruh boleh mogok bilamana perundingan tak berhasil menyelesaikan masalah dengan pengusaha."

Meski tak berkaitan dengan protes melawan revisi UU Ketenagakerjaan, gelombang aksi buruh PT Maspion Group, akhir Februari lalu, telah melumpuhkan perusahaan elektronik terbesar di Indonesia itu. Mereka menuntut kenaikan upah. Namun perusahaan yang mempekerjakan 23.000 buruh ini terpaksa menghentikan produksinya. Nasib tragis menimpa Maspion lantaran tak mau membayar tambahan upah Rp 30.000 per bulan untuk setiap pekerja. Padahal gubernur Jawa Timur menetapkan bahwa UMK yang mulai berlaku Januari 2006 sebesar Rp 685.500, tetapi Maspion hanya mau membayar Rp 655.500.

"Langkah buruh menuntut kenaikan upah yang lebih besar janganlah anarkis," kata Wapres Jusuf Kalla. Jusuf tidak ingin adanya pihak-pihak yang mengail di air keruh tatkala bangsa menghadapi kondisi yang berat seperti sekarang. Wapres menyampaikan keprihatinannya pada aksi buruh di depan kantor gubernur Jatim yang berakhir dengan bentrokan. "Buruh

boleh saja menuntut hak, namun harus menyadari, perusahaan mesti bisa bertahan," kata Jusuf.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengingatkan bahwa solusi masalah perburuhan mesti mengacu pada tiga pilar; proteksi terhadap kesejahteraan dan hak-hak buruh, tumbuhnya dunia usaha, dan bangkitnya ekonomi nasional. Susilo menyampaikan pesan tersebut setelah memimpin pertemuan tiga pihak (tripartit) yang dihadiri Wapres dan 12 menteri, 11 pengusaha dan 30 wakil serikat buruh di Wisma Negara (7/4).

Nasib draf revisi tersebut menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie akan ditentukan oleh pertemuan antara wakil-wakil dari pemerintah, pengusaha dan serikat buruh dalam waktu dekat ini. "Jika forum memutuskan UU itu direvisi, masing-masing pihak mengajukan usulan perubahan," kata Aburizal.

"Pembahasan tripartit mesti dimulai dari nol," sambung Abdul Aziz, Ketua Serikat Pekerja BUMN. Nada tidak keberatan duduk bersama datang dari Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Rekson Silaban, "asalkan pemerintah jujur dan adil di dalam merumuskan undang-undang tersebut."

Pengangguran

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia memburuk sejak awal krisis ekonomi tahun 1997. Angka pengangguran, terbuka dan terselubung, meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, tahun 2002, angkatan kerja 100,779 juta; bekerja 91,647 juta, penganggur terbuka 9,132 juta, pengangguran terpaksa 28,869 juta. Empat tahun kemudian (2006) angka itu berubah menjadi; angkatan kerja 105,8 juta, bekerja 94.95 juta, penganggur terbuka 10.8 juta, setengah penganggur 29,64 juta, terdiri dari; sukarela 15.32 juta dan terpaksa 14,32 juta.

Dengan demikian kumulatif pengangguran meningkat dari 38 juta lebih tahun

2002 menjadi 40 juta lebih tahun 2006. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 5,01%, diharapkan meningkat menjadi 5,29% tahun 2006. Setiap satu persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 400.000 tenaga kerja.

Selain pengangguran, masalah ketenagakerjaan juga dihadang oleh PHK dan ancaman PHK. Misalnya, PT Indofood Sukses Makmur tahun ini akan memberhentikan (PHK) 3.500 pekerja dengan alasan efisiensi.

Sampai Oktober 2005, produsen makanan olahan itu telah memberhentikan 2.900 pekerja dengan pesangon Rp 130 miliar. Pengurangan pegawai di Indofood tahun 2005 antara 3.500 sampai 4.000 orang. Langkah pengurangan pekerja itu, memberi efisiensi Rp 80 sampai Rp 100 miliar pada Indofood. Anehnya perusahaan milik Salim Grup ini tetap akan menerima pegawai baru, khususnya untuk sektor perkebunan dan pelayaran.

Departemen Tenaga Kerja mencatat tak kurang dari 109.382 pekerja di PHK selama tahun 2005. Angka ini bertambah dari 101.689 PHK tahun 2004, tetapi berkurang dari 135.920 PHK tahun 2003. Berdasarkan data tersebut, masalah buruh dan pengusaha seakan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Dita Indah Sari, Koordinator FNPBI mengatakan, hubungan buruh dan pengusaha tidak serta merta terselesaikan dengan revisi UU Ketenagakerjaan. Kata Dita, buruh hanya mencemaskan dua hal: PHK dan penyelesaian perselisihan.

Dia menolak pernyataan sejumlah ekonom bahwa kenaikan upah buruh akan menyumbang pengangguran sebesar satu persen. Buruh merupakan pekerja terbesar di sektor formal, berjumlah 25,7 juta orang. Dita menyangkal bahwa upah minimum bukan penyebab utama pengangguran. Dan pengangguran terkait dengan krisis ekonomi.

Anton Supit, Ketua Apindo memahami tuntutan buruh untuk memenuhi kesejahteraan mereka, tetapi yang bisa diberikan saat ini harus sesuai dengan dukungan ekonomi bangsa. "Tanpa kemampuan tersebut, makin hari makin terjadi PHK, industri tidak bisa bersaing dan jadilah pedagang," kata Anton.

Anton mengakui bahwa masalah ketenagakerjaan menjadi hal pokok di dalam menggerakkan iklim investasi. Soalnya investor akan melihat normatif ketenagakerjaan Indonesia bagaimana, upah minimumnya membuat perusahaan bisa bersaing atau tidak. Namun apa yang dipersoalkan Dita dan Anton, meski dari sisi yang berlawanan, hanyalah satu faktor persoalan ketenagakerjaan.

Fakta yang tak terbantahkan bahwa angka pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Persoalannya apa yang harus dilakukan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mencegah meledaknya bom waktu pengangguran. ■ SH

Perbandingan UU No 13/2003 dan Usulan Revisi Pemerintah

PASAL	UU NO 13/2003	USULAN PERUBAHAN
59	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimum selama tiga tahun dengan jenis dan sifat pekerjaan tertentu.	Maksimum 5 tahun dengan jenis dan sifat pekerjaan tanpa batasan. Apabila pekerja/buruh memutuskan kontrak sebelum berakhir waktunya, wajib mengganti rugi sebesar upah yang seharusnya diterima selama sisa kontrak yang belum dilaksanakan.
65 (2)	Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat: a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama. b. Dilakukan dengan perintah langsung dari pemberi kerja. c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.	Semua jenis dan sifat pekerjaan boleh di-*outsourcing.*
78	Ketentuan sama	Tambahan: Pekerja/buruh yang menduduki posisi menentukan kerja lembur, tidak berhak mendapatkan upah lembur.
79 (d)	Istirahat panjang selama 1 bulan bagi pekerja/ buruh yang telah bekerja 6 tahun.	Dihapus
89 (2)	Upah minimum diarahkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KLH)	KHL dihilangkan
142 (2)	Akibat hukum dari mogok Kerja yang tidak sah	PHK tanpa syarat
156	Uang pesangon maksimal 9 bulan upah	Maksimal 7 bulan upah
156	Uang penghargaan masa kerja untuk pekerja/buruh yang sudah bekerja 3-6 tahun mendapat 2 bulan upah.	Untuk pekerja/buruh yang sudah bekerja 5-10 tahun mendapat 2 bulan upah
156	Penggantian perumahan besarnya 10% dari total uang pesangon, ditambah uang penghargaan	Hanya pekerja/buruh yang mendapat fasilitas perumahan
164 (3)	PHK karena efisiensi perusahaan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebanyak 2 X ketentuan	Menjadi 1 X ketentuan bagi pekerja/buruh yang menerima upah di atas Rp 1 juta, atau yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berhak mendapat pesangon.

Sumber: Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). SH.

Wajah Buram Pengangguran

Pertanda buruk menimpa Budisetiawan yang bekerja di PT Tamanielsi di Desa Kedaung, Depok, Jabar. Gaji pria beranak satu itu, awal tahun 2006, dipotong hampir separuh untuk alasan yang tidak jelas. Biasanya, Budi (22 tahun) menerima gaji penuh Rp 400.000 sebulan, tetapi setelah dipotong, hanya tersisa Rp 220.000. Tidak hanya Budi. Banyak karyawan lain yang menerima perlakuan serupa.

Tidak lama kemudian, malapetaka menimpa Budi dan ratusan rekan sekerjanya. Perusahaan yang bernaung di bawah PT Mercedes Benz itu menjatuhkan vonis PHK (pemutusan hubungan kerja) pada mereka. Budi dan rekan-rekannya masuk dalam barisan ratusan ribu pekerja yang di PHK tahun ini. Dan mereka juga menambah angka pengangguran yang sudah mencapai 40 juta lebih.

Ketika masih bekerja, keadaan rumah tangga Budi, istri dan seorang anaknya, baik-baik saja, walaupun menumpang di rumah mertua. Pasangan Budi dan Restiawati, menikah setahun lalu, dikaruniai seorang bayi yang berusia dua bulan. Setelah Budi di PHK, biaya keluarga ditanggung oleh istrinya yang bekerja di sebuah perusahaan aksesoris, bergaji Rp 700.000 sebulan.

Budi menganggur, tidak memiliki penghasilan. Sekarang dia menumpang hidup pada istrinya setelah lelah mencari pekerjaan ke sana ke mari.—"Sekarang, saya sedang nganggur mas. Tapi saya harus cari duit untuk menghidupi keluarga saya. Saya kerja apa saja, tetapi halal," kata Budi kepada Amron dari *Berita Indonesia.*

Restiawati (21) menjadi tulang punggung suami dan orang tuanya. Sebab kedua-duanya menganggur. Ayah Restiawati, sebelumnya bekerja sebagai tukang ojek. Tetapi belakangan ini dia sakit-sakitan, terpaksa istirahat di rumah. Restiawati bekerja sebagai buruh PT Sewok yang memproduksi aksesoris kerang; seperti kalung, anting, kancing dan hiasan dinding. Barang-barang aksesoris ini diekspor ke Korea.

Beruntung Restiawati menerima upah bulanan yang cukup lumayan, Rp 700.000. Kalau lembur, upahnya Rp 50.000 per jam. Upah lemburnya akan lebih besar pada hari libur. Namun dia harus membanting tulang siang dan malam untuk menghidupi suami, anak dan orang tuanya.

Tiga pekerja lainnya—Jahrul Bayim (25), Bahruddin (25) dan Suherman (21)—Desember 2005 di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja, PT Meta Nusa Indotama, juga terletak di komplek industri Kedaung, Depok. Mereka bekerja cuma tiga tahun di perusahaan itu.

Jahrul dan kedua rekannya yang bekerja dibagian *packing* (pengepakan), hanya bisa pasrah ketika mereka harus di PHK dengan alasan orderan sepi dan bahan baku mahal. Selama bekerja di perusahaan itu, mereka sakit-sakitan karena setiap saat menghirup udara yang mengandung bau obat kimia. Bahan kimia ini digunakan untuk mengoles aksesoris rumah, seperti tirai.

Menurut Jahrul, mereka mengeluhkan sakit dada, dan tidak sedikit karyawan yang sering berobat ke rumah sakit, meskipun atas tanggungan perusahaan. Sebenarnya mereka ingin tetap bekerja di perusahaan tersebut, asalkan tidak menganggur. Namun mereka hanya bisa pasrah, ketika di PHK, dan mendapat uang pesangon dua bulan gaji. Gaji mereka rata-rata dari Rp 400.000 sebulan.

Jashrul, Bahruddin dan Suherman mengatakan kepada Berita Indonesia, sewaktu bekerja orangtua mereka merasa senang karena bisa menabung dan membantu biaya sekolah adik-adik mereka. Karena itu mereka berharap bisa mendapatkan kembali pekerjaan untuk membantu meringankan beban orang tua mereka.

Kehidupan buruh bagaikan potret buram. Upah yang diterima selalu tidak mencukupi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Padahal jumlah mereka cukup besar, 25,5 juta dari 28,7 juta pekerja yang bekerja di sektor formal. Satu sen pun pertambahan upah harus mereka perjuangkan mati-matian.

Sukirno hanya bisa mengelus dada ketika setiap akhir bulan menerima gaji hanya Rp 600.000. "Tak apalah, yang penting bisa bertahan hidup," katanya. Bagi buruh pabrik tekstil di kawasan Bogor Utara itu, setiap setelah menerima gaji, perasaannya selalu gusar karena harus menutup utang di warung dan selalu dibayangi defisit.

Dengan gaji sebesar itu, dia harus bisa mengatur pengeluarannya. Apalagi ongkos pergi dan pulang dari tempat kerja sudah naik. Dari gaji yang hanya Rp 600.000, dia harus mengeluarkan ongkos Rp 150.000 sebulan. Belum lagi untuk makan. Sukirno mengorek kantongnya Rp 10.000 sehari untuk makan. Padahal dia juga harus membayar rumah kontrakan bulanan.

"Pokoknya sangat pusing mengaturnya," katanya. ■ AM, SH

Dalam kesempitan lapangan kerja, PHK jadi momok yang sangat menakutkan. Belum lagi upah yang sangat minim.

Mereka Membeli Angin

Turunnya daya beli masyarakat telah menyebabkan banyak usaha menengah-kecil tutup dan menyebabkan meningkatnya pengangguran.

Ketika harga BBM naik Oktober tahun lalu, dimulailah drama kemiskinan itu. Media massa memberitakan orang-orang yang terpaksa bertahan hidup dengan memakan nasi aking (nasi sisa yang dikeringkan) dan umbi-umbian. Berita-berita tentang balita yang kurang gizi di berbagai daerah juga mewarnai media massa, menandakan keterpurukan ekonomi masih enggan beranjak dari sisi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berbagai hal itu menyadarkan betapa menurunnya daya beli masyarakat. Selain karena kondisi ekonomi yang masih sulit, menurunnya daya beli juga berpengaruh pada sektor industri, terutama yang bergerak di bidang barang konsumsi publik. Imbasnya, banyak perusahaan gulung tikar, sehingga banyak tenaga kerja yang menganggur. Alih-alih untuk tenaga kerja berpengalaman, peluang kerja bahkan lebih sempit lagi bagi tenaga kerja yang belum berpengalaman.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang selama ini sangat *concern* terhadap konsumen, juga mencermati masalah daya beli masyarakat.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Indah Suksmaningsih, YLKI memang memperluas peran tidak lagi melihat mutu produk, tetapi juga ikut menjamin bahwa harga-harga yang merupakan kebutuhan pokok itu bisa dibeli masyarakat yang daya belinya terus turun.

Kebijakan yang menyengsarakan konsumen juga jadi perhatian YLKI. Harga air minum dari PDAM yang sekarang mahal itu bukan hanya karena masalah produksi melainkan juga menyangkut utang dari Asian Development Bank dan World Bank. Kebijakan ekonomi internasional, menurut YLKI, ternyata ikut mempengaruhi daya beli konsumen.

Mengenai kenaikan BBM yang menjadi sumber naiknya barang-barang pokok, YLKI berpendapat, pemerintah seharusnya melakukan *financial check up* lebih dahulu. Artinya, kemampuan finansial pemerintah harus diaudit terlebih dahulu. Pola semacam ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain.

Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menilai, pemerintah tidak *fair* saat menaikkan harga BBM yang berakibat pada kenaikan harga. Sebab, kenaikan itu tidak diikuti dengan tindakan pemerintah untuk menaikkan pendapatan masyarakat. Harusnya kalau pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, maka pemerintah juga harus bertanggungjawab menaikkan pendapatan masyarakat. Agar daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

Indikasi Berbagai Sektor

Salah satu indikasi yang dilihat YLKI soal menurunnya daya beli masyarakat antara lain dari sektor perumahan. Kenaikan harga rumah, menurut Sudaryatmo, memang sulit dihindari akibat gejolak harga-harga bahan bangunan menjelang kenaikan harga BBM. Namun, pemerintah harus bertanggung jawab untuk tetap memberikan akses kepada masyarakat bawah untuk mendapatkan tempat tinggal.

Rumah merupakan kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, masyarakat bawah tetap harus mendapatkan akses untuk mendapatkan tempat tinggal. Kalau mereka tidak bisa memiliki atau membeli, minimal bisa menyewa. Karena itu, menurut Sudaryatmo, pemerintah perlu membangun rumah-rumah sewa dengan tarif sewa yang murah. Pola-pola subsidi semacam ini masih relevan untuk dilakukan.

Subsidi bagi masyarakat bawah, lanjut Sudaryatmo, alokasinya harus benar-benar diperhatikan dan jangan bersifat karikatif (dibagi-bagi). Sebab begitu dibagi-bagi, maka akan habis dengan sendirinya. Subsidi perlu diberikan secara lebih sistemik dan jangka panjang. Salah satunya, bisa dengan cara membangun rumah-rumah sewa namun dengan tarif murah agar bisa terjangkau masyarakat bawah.

Indikasi melemahnya daya beli masyarakat juga bisa dilihat dari penjualan elektronik turun drastis sejak Januari 2006.

Tidak tanggung-tanggung, penurunan penjualan produk elektronik berada di atas 5%. Berdasarkan data Electronics Marketer Club (EMC) penjualan sejumlah produk elektronik pada Januari 2006 menurun signifikan antara 6,2% sampai 25,1%, akibat melemahnya daya beli masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Oktober 2005.

Melemahnya daya beli masyarakat merupakan salah satu penyebab menurunnya penjualan masyarakat, karena selama ini mayoritas pelaku usaha lebih memfokuskan pemasaran di dalam negeri dibandingkan ekspor.

Menurunnya daya beli masyarakat juga bisa dilihat dari sektor barang sekunder dan tersier seperti produk tekstil dan emas.

Pesimisme dirasakan para pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT). Pasalnya,

produk TPT pada dasarnya merupakan kebutuhan tersier bagi masyarakat. Sehingga jika terjadi pelemahan daya beli, otomatis akan dikalahkan oleh pemenuhan kebutuhan yang tergolong primer dan sekunder.

Selain masalah melemahnya daya serap pasar domestik, industri TPT juga harus menghadapi semakin mahalnya biaya produksi. Kenaikan harga BBM juga menaikkan berbagai *cost factor*, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Semua ini membuat 2006 menjadikan industri TPT menghadapi cobaan yang berat.

Penjual perhiasan emas pun kini mulai mengeluhkan menurunnya volume penjualan mereka hingga 50 persen. Penurunan penjualan itu diakibatkan naiknya harga emas dunia, sementara daya beli masyarakat melemah.

Harga emas saat ini rata-rata mencapai Rp 165.000 per gram untuk kadar 24 karat. Padahal tahun 2005 lalu harga emas dengan kadar 24 karat rata-rata Rp 120.000 per gram.

Naiknya harga emas dunia mencapai 563 dollar AS per *troy ounce*, dari sebelumnya 575 dolar AS per *troy ounce*. Naiknya harga emas dunia ini turut memicu naiknya harga emas lokal karena sebagian bahan baku pembuatan perhiasan emas diperoleh dari impor.

Turun Cukup Signifikan

Tingkat inflasi bulan Februari tahun 2006 mencapai angka 0,58 persen Hal itu telah menjadikan inflasi *year on year* terjadi di level 17,92 persen. Pengeluaran masyarakat untuk bahan makanan menjadi penyumbang inflasi terbesar, disusul oleh perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar.

Menurut Wakil Direktur Program MM UII Yogyakarta Drs Nur Feriyanto, inflasi *year on year* sebesar dua digit tersebut menjadikan daya beli masyarakat turun cukup signifikan. Pendapatan masyarakat yang cenderung tetap bahkan menurun telah menyebabkan pendapatan riil masyarakat tergerus tajam oleh tingkat inflasi. Ancaman inflasi masih mengincar di bulan April, Mei dan seterusnya ketika dorongan menaikkan TDL dan gas muncul.

Pedagang pasti telah melakukan antisipasi menaikkan harga ketika keputusan menaikkan TDL dan gas masih menjadi perdebatan. *Multiplier effect* adanya kenaikan TDL dan gas pasti akan mendorong harga barang dan jasa naik. Sedangkan di sisi daya beli konsumen, inflasi akan menurunkan kemampuannya dalam melakukan konsumsi.

Turunnya daya beli masyarakat juga menyebabkan banyak usaha menengah-kecil tutup usaha karena disamping tidak mampu menanggung kenaikan biaya produksi yang tinggi, juga karena tidak terbelinya produknya oleh konsumen.

Banyak usaha kecil menengah seperti usaha tahu-tempe, usaha batik perorangan, usaha tekstil atau garmen, usaha *handicraft*, atau usaha mebel terpaksa tutup karena tidak mampu membeli bahan baku yang harga belinya terus melambung.

Lemahnya daya tahan perekonomian nasional, infrastruktur yang kurang memadai, serta daya beli masyarakat yang rendah telah membuka lebar-lebar peluang masuknya barang-barang dari luar negeri dengan harga murah, kualitas tinggi, desain menarik serta dukungan distribusi yang kuat. Akhirnya, Indonesia hanya akan menjadi pasar barang impor yang harganya lebih terjangkau. Semakin terpuruklah industri dalam negeri. Jumlah angka pengangguran bertambah dan lapangan kerja semakin menyempit.

Menurut anggota Dewan Pakar ICMI A. Riawan Amin, dilihat dari pertumbuhan ekonomi 2005 yang hanya mencapai 5,6 persen atau lebih rendah 0,4 persen dari target yang ditetapkan, tak bisa diandalkan untuk membuka kesempatan kerja baru.

Dulu, setiap satu persen pertumbuhan diproyeksikan bisa menyerap antara 300-400 ribu tenaga kerja. Sekarang, satu persen pertumbuhan hanya bisa membebaskan sekitar 178 ribu jiwa dari jebakan pengangguran baru.

Kunci untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah melalui pemberdayaan UKM. Menurut data Bank Indonesia, lebih dari 40 juta jiwa dari 210 juta lebih penduduk Indonesia menggantungkan harapan pada UKM. Saat ini ada lebih dari tiga juta UKM.

Program pemerintah yang mewajibkan BUMN menyisihkan satu hingga tiga persen keuntungannya untuk pemberdayaan UKM juga kurang maksimal. Akan lebih berdaya bila dana itu di-*pool* badan khusus. Dengan begitu, dana dari 158 BUMN akan lebih terarah.

Upaya lain yang bisa diandalkan adalah memobilisasi dana masyarakat melalui penggalangan wakaf tunai (*cash waqf*). Dana wakaf yang terhimpun bisa diinvestasikan, di mana hasilnya bisa digunakan untuk salah satunya membiayai UKM.

Pemulihan daya beli masyarakat akan terjadi tetapi berjalan secara perlahan (*gradual*). Namun, pemulihan ini bukan pemulihan yang signifikan sepanjang tingkat pengangguran di Indonesia yang masih tinggi dan tren tingkat pengangguran sejak krisis terus menunjukkan kenaikan. Apalagi, masyarakat masih akan merasakan kenaikan tarif listrik dan BBM yang cukup berarti pada dua-tiga tahun ke depan. ■ RH

Jangan Abaikan Tripartit

Pemerintah merumuskan revisi atas UU Ketenagakerjaan 13/2003. Anehnya, DPR belum pernah secara resmi menerima draf tersebut.

Kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan rakyat masih sangat kental. Bukti yang sangat aktual; evaluasi pemerintah terhadap materi Undang-Undang Ketenagakerjaan (No. 13 tahun 2003) yang menuai penolakan keras dari para pekerja yang tergabung dalam serikat-serikat pekerja.

Draf RUU tentang Revisi UU Naker yang sudah disusun pemerintah tanpa melibatkan serikat-serikat pekerja, ternyata tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009 yang berjumlah 285 RUU.

"Jangankan dalam daftar 43 RUU Prioritas Tahun 2006, di Prolegnas saja tidak tercantum," ungkap DR. Bomer Pasaribu, mantan Menteri Tenaga Kerja di era Presiden Abdurrahman Wahid, kepada *Berita Indonesia*. Bomer sangat memahami perkembangan proses legislasi (pembentukan UU) yang berlangsung di parlemen, sebab dia sehari-hari menjabat Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Kendati demikian, politisi Golkar ini menambahkan, pemerintah dapat saja mengajukan RUU di luar kesepakatan Prolegnas sepanjang itu dianggap sangat urgen, termasuk seandainya pemerintah ingin merevisi UU Naker. Itu pun mesti dilengkapi dengan Naskah Akademik yang merupakan hasil pengkajian dari lembaga pendidikan dan penelitian yang berkualitas.

"Saya tidak tahu apakah yang disebut sebagai draf RUU revisi atas UU 13/2003 yang ditentang habis-habisan oleh para pekerja itu sebenarnya telah memiliki naskah akademik ataukah belum. Di naskah akademik itulah termuat semua aspek secara komprehensif. Yang pasti DPR belum pernah disodori secara resmi oleh pemerintah tentang draf revisi itu," papar Bomer Pasaribu, yang juga Direktur CLDS (*Center of Labour and Development Studies*).

Pendapat senada dikemukakan Junaidi, SE , anggota Komisi IX DPR. Junaidi mengaku heran, demo buruh sangat luar biasa besarnya dengan satu tuntutan besar: menolak draft revisi UU Naker.

"Terjadi aksi demonstrasi buruh luar biasa yang menjurus anarkis. Tuntutannya luar biasa, penolakan terhadap satu lontaran dari pemerintah dan yang kita sendiri tidak tahu. DPR sendiri tidak tahu menahu bentuknya apa revisi itu," tandas politikus PAN yang juga anggota Baleg itu.

"Sebagai anggota Komisi IX, juga Badan Legislasi, saya tidak tahu ada revisi itu secara resmi. Karena belum dikirim oleh pemerintah apa dan bagaimana isi drafnya. Dalam Prolegnas juga belum ada. Di Baleg juga belum pernah dibahas. Jadi masih jauh hal itu untuk masuk ke sini (DPR)."

Masih kata Junaidi, melihat reaksi kalangan buruh yang demikian deras pasti ada sesuatu yang sangat menakutkan

mereka, atau malah ada sesuatu yang menjadi target besar mereka. Sebab, jika tidak ada sesuatu yang sangat menakutkan, mereka tentu tidak akan bereaksi semacam itu.

Mungkinkah ada sesuatu di balik aksi demo buruh tersebut? Junaidi tidak mau berspekulasi soal itu. Hanya saja, dia berharap UU No.13/2003 sebiknya dioptimalkan dulu implementasinya.

"Undang-undang itu kan baru dua tahun berlaku, dari tahun 2003 sekarang 2006. Sudahlah...itu jalankan saja dulu secara maksimal," harap Junaidi.

Bomer juga mengisahkan bahwa sewaktu berlangsung aksi demonstrasi buruh berskala sangat besar di berbagai penjuru tanah air, dirinya tengah berada di Vietnam menjadi pembicara dalam sebuah seminar internasional (7-8 April 2006).

Kata Bomer, dia terus memantau perkembangan melalui siaran-siaran CNN. Dia ingat persis, hampir seluruh peserta seminar internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Parlemen se-Asia itu menyimak dua berita besar yang mendominasi siaran CNN. Apa itu? Pertama, demonstrasi buruh secara besar-besaran di Perancis. Kedua, demonstrasi massa buruh di Indonesia yang tak kalah besarnya.

"Di sela-sela seminar tersebut, saya di

wawancarai sejumlah wartawan televisi-televisi asing. Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik demonstrasi pekerja di Indonesia," ucap mantan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) itu.

Menurut hemat Junaidi, jika secara obyektif revisi versi pemerintah itu memang dipandang merugikan buruh, tiga pihak itu harusnya berunding Tripartit (pemeritah, dunia usaha, dan pekerja/serikat pekerja).

"Kalau ada salah satu pihak yang dirugikan, tentunya kan harus ditinjau kembali, duduk bersama dan harus dicermati apa masalahnya. Ini kan komunikasinya mampat di antara ketiga pihak ini," ujarnya.

Ihwal Tripartit, Bomer Pasaribu sangat berharap forum itu benar-benar dilibatkan secara efektif dalam membicarakan revisi UU Naker. Baginya, keberadaan forum Tripartit sudah merupakan keniscayaan sebab Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO nomor 144 tentang Tripartit. Dengan demikian, Indonesia terikat secara hukum untuk menerapkannya.

Aspek selanjutnya adalah tentang substansi. Kata Bomer substansi peraturan UU Naker mengisyaratkan adanya kepentingan masing-masing pihak, khususnya pekerja dan pengusaha. Untuk itu, dia berharap ada *consensus building* yang dihasilkan dari forum Tripartit Nasional. Tidak ada pihak yang didominasi dan mendominasi.

Bomer kemudian mengetengahkan kronologis kehidupan ketenagakerjaan di Indonesia sejak jaman orde lama sampai orde reformasi. Masalah ketenagakerjaan atau perburuhan di Indonesia terbagi ke dalam beberapa periode ketertekanan.

Pada masa Orde Lama, tenaga kerja hanya diposisikan sebagai kuda tunggangan politik (Nasakom), bukan diberdayakan untuk kesejahteraan nasibnya.

Di masa Orde Baru, para pekerja mengalami tekanan di berbagai apek, mulai hak politik, hak ekonomi, hak asai, sampai hak berdemokrasi. Kehidupan pekerja saat itu hanya menjadi obyek strategi pertumbuhan ekonomi.

Bukan hanya pekerja, serikat pekerja juga ditekan sebagai pihak terdominasi. Sementara pemerintah dan pengusaha mendominasi.

JUNAIDI

Selanjutnya, periode 1995-1997 ditandai terjadinya pergeseran pola hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja, menyusul keputusan Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 144 tentang Tripartit.

Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia artinya mengikatkan dirinya pada mekanisme Tripartit yang berlaku secara internasional, yang menempatkan tiga pihak: pemerintah, pengusaha, dan pekerja; dalam posisi yang setara. Akhirnya dibentukanlah lembaga Tripartit mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut muncul keinginan mengganti UU No. 12 tahun 1964 karena dinilai sudah terlalu ketinggalan zaman dan tidak senafas dengan semangat Konvensi ILO 144.

Pembahasan alot dan panjang (1,5 tahun lamanya) kemudian dilakukan forum Tripartit Nasional sampai akhirnya terbentuklah UU No. 25 tahun 1997. Pada tahun 2002 kembali muncul usulan revisi terhadap UU 25/97.

Draft revisi dibahas oleh forum Tripartit Nasional selama 1,5 tahun juga sampai lahirlah UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di era ini tercipta keseimbangan yang bermuara pada titik kompromi dan *consensus building*.

"Sekarang, bila ada keinginan merevisi atau mengevaluasi UU 13/2003 maka draft revisi itu sepatutnyalah dibicarakan oleh forum Tripartit Nasional," kata Bomer.

Berapapun lamanya waktu yang tersita, bagaimanapun alotnya proses yang dijalani, serta betapa besarnya energi terbuang dalam rangka mencari titik kompromi di antara ketiga pihak, Bomer menggarisbawahi, itu jauh lebih baik dibandingkan besarnya ongkos politik, ongkos ekonomi, ongkos sosial yang diderita oleh bangsa dan negara ini akibat aksi-aksi demonstrasi kalangan buruh.

Tanpa bermaksud menyalahkan pemerintah, Bomer Pasaribu mengingatkan bahwa jangan terlalu menyederhanakan persoalan seolah-seolah dengan revisi UU Naker maka iklim investasi pasti tercipta, dan investor asing akan berduyun-duyun datang ke Indonesia.

"Bagaimana investor asing mau datang ke sini bila di dunia internasional justru imej yang muncul akibat gelombang demonstrasi buruh seperti kemarin terjadi, pemerintah Indonesia tidak memperhatikan urusan perburuhannnya?" ungkap Bomer dengan nada retoris.

Mengutip World Economic Forum (2005), Bomer menyebutkan ada tujuh penghalang investasi, dan unsur perburuhan sendiri berada di urutan terakhir. Jadi, "Betapa tidak mudahnya menarik investasi sekaligus tidak bisa menyederhanakan persoalan bahwa investasi hanya terkait urusan perburuhan," Bomer Pasaribu menyimpulkan. ■ AF, SB

Produk China adalah momok baru bagi industri dalam negeri. Tapi lebih dari itu, China adalah contoh pelajaran berharga bagaimana membangun industri dan perdagangan yang efisien.

Produk China Dirindu Lalu Dibenci

Serbuan produk-produk China di Indonesia pada masanya pernah disambut gembira. Masyarakat yang daya belinya belum kuat, seolah menjadi berhak menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

Cukup mengeluarkan separuh uang dari harga produk keluaran negara lain, mereka sudah dapat menikmati gaya lebih yang lebih berkelas. Harga murah adalah pertimbangan utama, kualitas atau daya tahan produk menjadi nomor selanjutnya. Timbul kesan China adalah ikon pemimpin ekonomi baru Asia yang menjanjikan.

Kehadiran produk-produk asal Tirai Bambu seperti sepeda motor, elektronik, garmen, tekstil dan produk tekstil (TPT), perkakas rumah tangga, keramik, mebel, mainan anak-anak, sepatu dan alas kaki lain hingga baja dan udang, telah mematahkan dominasi pemain bisnis lama.

Bahkan seolah belum cukup berhenti di situ, untuk memenuhi kebutuhan nelayan akan kapal penangkap ikan pun, pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan harus pergi jauh-jauh ke negeri China untuk mengurus impor kapal.

Produk China adalah 'pahlawan" baru yang berhasil mengakhiri kecongkakan pebisnis lama dalam menentukan harga jual produk. Sebelum ini, mereka itu bertindak sebagai *market leader* sekaligus *price leader* di alam bisnis yang sarat dengan suasana monopoli, oligopoli hingga kartel segala macam.

Tidaklah mengherankan apabila harian ekonomi *Investor Daily,* dalam liputan khususnya (4-5/3) memberi judul menarik pada sebuah berita, bahwa "Tasbih Pun Buatan China".

Di situ, diceritakan bagaimana seorang pria bernama Dadang Sulaeman, suatu ketika menerima sebuah kemasan bingkisan berupa untaian tasbih, gantungan kunci, serta dua buah *ballpoint*, dari seorang rekan yang baru saja menunaikan ibadah haji. Namun kata di dalam bingkisan tak lagi menyebut Arab Saudi sebagai negara pembuat. Pada pengikat bingkisan justru terdapat sebuah label merah, yang nyata bertuliskan *Made in China.*

Untuk produk garmen dan TPT, juga sudah bukan rahasia lagi kalau mata rantai perdagangannya belakangan ini sudah dikuasai produk China. Bukan hanya di pasar tekstil Mangga Dua, Tanah Abang, Masyestik atau Cipadu. Pun, di pasar Klewer, Jawa Tengah yang terkenal sebagai pusat bursa tekstil terbesar Jawa Tengah, kios-kiosnya sudah dihiasi aneka produk China.

"Hampir semua kios pakaian jadi non batik di pasar ini menjual produk China. Terus terang pedagang di sini lebih senang menjual produk-produk impor daripada produk lokal," kata Sardjono, seorang pedagang pakaian jadi Pasar Klewer.

Sepatu? Oh, sudah empat lima tahun terakhir produk China turut mengisi lapak-lapak penjualan sepatu bekas di Pasar Rumput, Taman Puring, hingga Pasar Ular Jakarta. Radja Games Tampubolon, misalnya, seorang pria perantauan yang turut menjual sepatu asal China di pinggiran Jalan Sultan Agung, Pasar Rumput, Jakarta Selatan, memastikan kalau sepatu buatan China lebih *trendy* dan mudah dipasarkan karena harganya relatif lebih murah dibanding sepatu buatan lokal apalagi Jepang dan Eropa.

Mulai Dibenci

Dalam sebuah diskusi mengenai serbuan produk China ke Indonesia, Sabtu (11/3), Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengakui selama Januari-November 2005 impor tekstil dan produk tekstil (TPT) asal China meningkat hingga 800%. Nilai absolutnya memang tidak terlalu besar. Kata Elka, dari US$ 1 juta naik menjadi US$ 9 juta.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian Gasali Ismy, membeberkan angka-angka ironi akibat serbuan produk China. Bahwa sejak tahun 2001 hingga pertengahan 2005, dari 2.600 perusahaan anggota API sudah 347 yang gulung tikar, 30 diantaranya adalah pabrik tekstil.

Pada periode tersebut, demikian Ernovian terjadi PHK terhadap 67 ribu tenaga kerja, dari total 1,218 juta tenaga kerja yang bergelut di bidang TPT. Erno juga menyebut terdapat 29 kategori garmen yang impornya meningkat.

Ketua API Solo, Dewanto Santosa mensinyalir kebanyakan masuknya TPT asal China bersifat illegal dan jumlahnya sudah luar biasa.

"API mensinyalir TPT illegal itu sebagian merupakan barang *reject* dari negara asalnya," kata Dewanto.

Memang, neraca perdagangan Indonesia-China tak jelas angka pastinya. Menurut BPS, misalnya, selama tahun 2004 Indonesia mengalami surplus US$ 503,40 jutar. Sedangkan menurut data pemerintah China, negara itu selama Januari-April 2005 justru mengalami surplus US$ 110 juta.

Lain lagi data dari Departemen Perdagangan. Dibanding sembilan negara lain, impor non migas Indonesia dari China sejak tahun 2000 secara konsisten terlihat terus meningkat. (Selengkapnya Lihat Tabel).

Angka-angka tersebut ditengarai tak mewakili kondisi yang sesungguhnya. Sebab, banyak produk China yang jelas-jelas masuk bukan melalui jalur resmi.

Di bidang sepatu, misalnya, Sekjen Aprisindo Yudhi Komarudin memastikan produk-produk China masuk Indonesia secara illegal. Sebab faktanya, demikian Yudhi, dalam pembicaraan dan diskusi dengan pemerintah, produk-produk China itu sudah dimasukkan dalam jalur merah, yang artinya dilarang masuk. Namun barang tersebut tetap saja bisa ditemukan di pasar. Produk China yang dijual murah jauh di bawah harga bila barang sejenis diproduksi di tanah air, semakin memperkuat barang China tak membayar bea masuk.

"Untuk sepatu diproduksi lebih murah, impornya tidak bayar bea masuk sehingga bisa lebih murah, yang membuat industri lokal tidak bisa bersaing," kata Yudhi, dalam sebuah wawancara khusus dengan Haposan Tampubolon dari Majalah *Berita Indonesia*.

Dari sisi harga keluhan senada diungkapkan pula oleh Achmad Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Produk China, kata Achmad, memecah konsentrasi konsumen dengan cara membanting harga sampai margin terendah.

Bila satu unit kloset duduk lokal dijual Rp 800 ribu, produk China hanya Rp 500 ribu walau nyatanya dipakai empat bulan saja sudah terlihat retak. "Namun uniknya, konsumen tetap saja membeli," kata Achmad.

Ketua Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia (APMI), Widjanarko Tjokroadisumanto menyebut 95% mainan anak-anak saat ini beredar adalah produk China. Widjanarko menduga 70% diantara produk mainan asal China itu masuk melalui jalur illegal. Ia juga menggambarkan dampak nyata serbuan mainan China. Jika pada dekade 90-an masih terdapat 70 perusahaan mainan anak-anak, kini tersisa hanya 15 pemain saja, diantaranya lima berstatus PMA.

Penghancuran Yang Sistematis

Raksasa China memang sedang menggeliat. Baja saja turut dimasukkan dengan harga miring, hanya US$ 300-350 per ton membuat kelimpungan Dirut PT Krakatau Steel Daenaulhay. Industri baja dalam negeri berpelat merah ini hanya dapat menjual baja seharga US$ 400-450 per ton, jauh di bawah China.

Industri baja China memiliki kapasitas terpasang 350 juta ton per tahun. Karena itu Daenaulhay semakin khawatir manakala mengetahui, enam bulan terakhir tahun 2005 China memproduksi baja 35 juta ton, padahal kebutuhan dalam negeri hanya 25 juta ton. Itu berarti ada kelebihan pasokan 10 juta ton, dan itu pasti akan diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia dengan harga miring.

Fahmi Idris, Menteri Perindustrian malah menyebutkan fakta angka yang jauh lebih menakutkan lagi. China, demikian Fahmi, selama tahun 2005 kelebihan pasokan baja 43 juta ton, dan tahun 2006 kelebihan diperkirakan akan mencapai 116 juta ton.

"Kita khawatir itu akan dipasarkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia sehingga akan mengganggu produk baja dalam negeri," ujar Fahmi, saat berbicara di sebuah simposium baja.

Akhirnya Daenaulhay hanya bisa berikhtiar tentang tiga hal. Yaitu, menyelidiki kemungkinan terjadi praktek *dumping*, menyelidiki praktek *under invoice,* dan mendesak pemerintah melakukan pengawasan penerapan SNI Wajib.

Produk-produk China menghancurkan Indonesia secara sistematis bukan hanya melalui serbuan langsung ke pasar domestik. Melalui pemindahan muatan kapal di tengah laut, mengubah kemasan barang, hingga mengubah dokumen eskpor sudah China lakukan atas produk-produk Indonesia.

Transhipment tekstil dan produk tekstil serta udang (terjadi tahun 2004) adalah model penyelundupan baru di tengah laut, yang tentu sangat merugikan Indonesia. Karena ulah China itu produk Indonesia sempat terancam diembargo oleh negara tujuan ekspor seperti AS.

China sedang bergerak maju. Di luar praktek bisnis yang dijalankan secara tak etis, ada baiknya Indonesia mempelajari betul bagaimana ekonomi negara sosialis ini bisa bangkit.

Pengamat dan praktisi ekonomi asal Medan, Sumatera Utara Jhon Tafbu Ritonga dalam tulisannya di harian *Waspada* meneropong sejumlah sebab keberhasilan China.

Diantaranya, China menjalankan desentralisasi ekonomi dan sentralisasi politik, yang membuat pasar dapat berjalan secara sempurna. Kemudian, iklim perburuhan di China sudah menjadi daya tarik bagi investor. China juga berhasil memelihara kurs yuan, yang membuat daya saing produk-produk China di pasar dunia menjadi lebih kuat.

Dan, terdapat dukungan perbankan China yang mampu membantu modal kerja sehingga pedagang bisa menjual produk dengan sistem konsinyasi. ■ HT

Industri Sepatu Butuh 5 Deregulasi

Ledakan pengangguran sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam waktu dekat ini, terutama karena sudah semakin parah dan maraknya produk-produk impor asal China yang murah meriah dan tersedia di pasar secara massal pula, seperti garmen, tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, mainan anak-anak hingga hasil perikanan dan segala macam.

Malahan, *transhipment* produk-produk China mengatasnamakan Indonesia telah pula membuat produk perdagangan dan industri negara kita terancam embargo di negara tujuan ekspor AS dan Uni Eropa.

Pasar produk sepatu turut mengalami pukulan sama diserbu aneka produk China. Memang, khusus sepatu ada sedikit perbedaan. Mulai 1 April 2006 kemarin ekspor sepatu China dan Vietnam dikenakan bea masuk *anti dumping* (BAMD) oleh Uni Eropa. Sanksi ini berimbas pada keinginan prinsipal untuk mengalihkan pesanannya ke pabrik-pabrik sepatu yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. Diperkirakan akan ada peningkatan kapasitas produksi pabrik sepatu Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lanjut kemampuan industri sepatu Indonesia "menghentikan" laju ledakan pengangguran, berikut petikan wawancara Majalah *Berita Indonesia* dengan Yudhi Komarudin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Presepatuan Indonesia (Aprisindo).

Apa komentar Anda mengenai ancaman ledakan pengangguran dalam waktu dekat ini, dan bagaimana daya serap industri sepatu menampung tenaga kerja?

Tadi pagi kebetulan saya melakukan sarapan pagi dengan Menteri Perindustrian Fami Idris. Jadi sebelum ada dumping, merek-merek besar seperti Adidas, Nike, Puma, Reebok dan yang lain mengalihkan ordernya ke China. Setelah kita mengalami krisis tahun 1997 kejadian itu berlanjut terus sampai 2004/2005, mereka secara besar-besaran pindah ke China.

Negara kedua yang ekspor sepatunya turut maju adalah Vietnam karena pemerintahnya sangat mendukung, dengan memberikan kemudahan fasilitas selain biaya-biaya yang masih murah.

Kepindahan berakibat seperti apa yang ditulis koran *Kompas* hari ini, Jumat 7/3, dimana PT Doson Indonesia yang terletak di Legok, Tangerang, Banten yang mengerjakan sepatu Nike, kini tinggal memiliki 2.000-3.000 karyawan. Di pabrik itu timbul 7.000 orang pengangguran korban PHK, belum mereka yang terkena dampak seperti pedagang dan semua keluarga mereka.

Dengan kepindahan tersebut otomatis pengangguran di Indonesia makin bertambah angkatan kerja banyak yang kehilangan kesempatan.

Yudhi Komarudhin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).

Persoalan berikutnya adalah, banyak industri China yang masuk ke sini secara ilegal tanpa bisa dideteksi pemerintah. Saya bilang tidak bisa terdeteksi, karena, kalau kita diskusi dengan pemerintah barang itu sudah dimasukkan ke jalur merah tetapi tetap bisa ditemukan di pasar dengan harga jauh lebih murah bila dibanding kita membuatnya di sini. Ini berarti dia tidak membayar bea masuk. Sebab kalau kita hitung biaya produksi, plus biaya masuk tidak mungkin dijual dengan harga sekian.

Ini yang mengakibatkan terpukulnya penyediaan lapangan pekerjaan baik di industri sepatu, tekstil, mainan anak-anak dan segala macam.

Dalam perjalanannya Eropa akan mengenakan bea masuk anti dumping terhadap China dan Vietnam per 1 April 2006. Ini adalah peluang dimana prinsipal akan kembali ke sini. Selain itu prinsipal juga sudah melihat, buruh-buruh China ternyata sudah mulai pintar dan kritis, "Oh, apa yang dibayar selama ini adalah rendah." Sejak Januari 2006 alhamdulilah mereka sudah pindah ke mari. Ini kesempatan, sebenarnya.

Tetapi masih ada hal-hal yang tidak mereka sukai di sini yang perlu penyelesaian segera. Seperti soal penegakan hukum, masalah ketenagakerjaan, biaya-biaya tinggi dan lain-lain. Ini bukan hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan, tetapi merupakan salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi. Di situ, misalnya, ada masalah pesangon yang harus diberikan cukup tinggi dibanding negara-negara Asia lainnya.

Berbagai kesempatan sesungguhnya bisa membuka peluang kerja. Tetapi menyaksikan peristiwa 5 April 2006 membuat mereka kembali ragu, apakah tempat dan negeri ini kondusif atau tidak. Bukan saja investor asing, lokal pun turut berpikir kalau kejadian seperti ini terus berlanjut ngapain buka pabrik. Lebih baik membeli barang, jual, jelas lebih enak dan tidak membuat pusing.

Dengan kejadian itu berarti pula kesempatan tenaga kerja banyak yang menganggur. Karena orang yang tadinya mau bikin sesuatu menjadi membeli. Yang tadinya ada kesempatan membuka lapangan kerja, sekarang orang pada *standing point* jadinya, melihat apakah negara ini kondusif untuk melakukan sesuatu atau tidak. Berarti penyerapan tenaga kerja menjadi tidak begitu banyak.

Untuk industri sepatunya sebenarnya pangsa lokalnya besar. Tetapi, seperti kita ketahui bersama, dengan biaya-biaya hidup yang tinggi di Indonesia seperti telepon, listrik dan BBM yang sangat tinggi efek dominonya sangat berpengaruh sekali. Ini membuat daya beli orang turun apalagi untuk sepatu. Ada kesan, kalau tahun ini saya bisa beli satu maka satu sajalah tidak seperti dahulu lagi. Ini pun menutup kesempatan tenaga kerja.

Sebelum dikenakan bea masuk anti dumping bagaimana pengaruh China terhadap industri sepatu dalam negeri?

Kita punya masyarakat banyak yang pemakai sepatu dari kelas menengah ke bawah. Mereka kadang-kadang tidak

melihat kualitas, yang penting murah. Kesempatan inilah yang diambil oleh produk China, untuk sepatu diproduksi lebih murah, impornya tidak bayar bea masuk sehingga bisa lebih murah, yang membuat industri lokal tidak bisa bersaing.

Untuk bisa bersaing dan berkembang pemerintah harus tegas melarang, tidak boleh lagi ada barang ilegal yang masuk. Jangan memberi kesempatan bagi China untuk menggempur habis-habisan. Karena Indonesia adalah pasar yang empuk dengan penduduk 200 sekian puluh juta, dimana golongan bawahnya hanya bisa membeli yang murah walau tahu bagaimana daya tahannya.

Sama seperti motor dan yang lain-lain, demikian juga sepatu karena yang penting murah ganti dua atau tiga bulan lagi urusan belakang. Inilah yang memukul industri sepatu lokal, ada barang yang masuk tidak membayar bea.

Bagaimana korelasi peningkatan ekspor sepatu dengan kemampuan menyerap tenaga kerja?

Sebelum krisis ekonomi industri sepatu pernah menjadi primadona. Puncaknya terjadi pada tahun 1997, mampu menampung 490 ribu orang tenaga kerja langsung di pabrik. Dengan krisis kemampuan menurun terus hingga hanya menampung 350 ribu orang tenaga kerja sekarang ini.

Sudah sekian banyak yang berkurang. Ini sangat signifikan sekali kalau kita mengambil rasio, satu orang tenaga kerja bisa membiayai hidup tiga orang lain. Jadi bisalah dikalikan berapa orang yang terkena dampak.

Sekarang pemerintah menargetkan, dalam empat tahun ke depan devisa ekspor sepatu harus mencapai US$ 4 miliar, melampui angka tertinggi di masa primadona tahun 1997 yang US$ 2,2 miliar. Pada tahun 2005 lalu ekspor masih US$ 1,5 miliar, nanti di 2006 kita harapkan menjadi US$ 1,8 miliar.

Katakanlah kita bisa mencapai angka ekspor US$ 1,8 miliar, itu paling tidak akan ada peningkatan daya serap tenaga kerja baru antara 10 ribu sampai 20 ribu orang. Itu tidak sedikit dan terjadi dalam waktu dekat ini.

Pengenaan *dumping* pasti akan mempengaruhi keinginan merek-merek tertentu untuk melakukan diversifikasi lokasi. Ini adalah kesempatan baik, tetapi kembali lagi bola ada di tangan pemerintah maukah mengubah yang tidak baik, atau mempertahankan, khususnya mengenai biaya birokrasi yang tinggi seperti pengurusan dokumen dan barang masuk.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lama ini mengunjungi pabrik sepatu di Tangerang, apa agendanya?

Kita hanya membuka suatu dialog bahwa industri sepatu nasional mempunyai kesempatan dan juga kendala-kendala. Pemerintah haruslah secepatnya menyelesaikan kendala tersebut. Nah, inilah yang kita tunggu. Kalau pemerintah cepat menyelesaikan, kesempatan tentu bisa kita rebut. Kalau tidak bisa hilang pindah ke Thailand, India, Pakistan dan sebagainya.

Apa janji Presiden SBY ketika itu?

Ya sebagai kepala negara dia akan memperbaiki, katanya. Tetapi tidak mudah, kan, melakukan suatu koordinasi satu instansi dengan instansi lain.

Apakah industri sepatu masih butuh deregulasi supaya iklim usaha kondusif?

Deregulasi pertama, kurangi biaya-biaya tinggi seperti yang terdapat dalam perda-perda. Kedua, perbaiki iklim investasi yang sarat dengan peraturan-peraturan salah satunya UU Ketenagakerjaan. Ketiga ada penegakan hukum seperti, kalau ada yang melakukan kesalahan hukum harus dengan tegas diyatakan siapa yang bersalah misalnya dalam unjuk rasa buruh 5 April kemarin.

Yang keempat permudah prosedur impor bahan baku, terlebih untuk bahan baku yang tidak bisa didapatkan di dalam negeri. Dan yang terakhir berikan insentif bagi investor lokal maupun asing yang melakukan investasi di industri pendukung *(supporting industry)* seperti lem, tali sepatu, kulit atau apalah.■

◆ DR. H. DEDING ISHAK IBNU SUDJA, SH., MM.

Legislator dan Pendidik yang Agamais

Bertekad menjadikan pembangunan bidang pendidikan sebagai panglima menuju Indonesia yang maju.

Perawakannya yang tinggi besar, disertai kumis tebal menghiasi bibir, sangat bertolak belakang dengan gaya bicaranya yang lemah lembut. Pribadinya yang sangat ramah mengikis habis kesan angker penampilan fisiknya.

Deding Ishak adalah anggota DPR-RI periode 2004-2009 dari Partai Golkar. Di Senayan, pria kelahiran Bandung, 4 Juni 1962, ini sehari-hari bertugas di Komisi VIII (bidang Pendidikan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan).

Bidang-bidang itu relatif sangat pas dengan latar belakang profesional Deding, selain sebagai anggota Dewan, yakni antara lain, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yapata Al-Jawami, Bandung.

Karenanya, peraih gelar Doktor (S-3) dari Universitas Padjadjaran, dengan disertasi tentang Kebijakan Publik, ini begitu antusias bila diajak berbincang-bincang ihwal pendidikan, baik pendidikan informal, nonformal, maupun formal.

Fakta lain, riwayat hidup keluarganya yang banyak bergelut di dunia keagamaan dan pendidikan. K.H. Muhammad Sudja'i, kakek dari alumnus (S-1) IAIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung ini, adalah pendiri Pondok Pesantren Sindangsari (Al-Jawami), Cileunyi, Bandung. K.H. R. Totoh Abdul Fatah, ayahanda Deding, adalah mantan Ketua MUI Jawa Barat.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SGD (2004-2007) ini memandang pendidikan sebagai segalanya. Menurut hematnya, maju tidaknya sebuah masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana kepedulian masyarakat tersebut terhadap dunia pendidikan.

Dengan kapabilitas intelektualnya sebagai pendidik dan pemangku pendidikan yang dipadu-selaraskan dengan kapasitas politiknya sebagai anggota DPR, ayah empat anak ini bertekad untuk menjadikan pembangunan bidang pendidikan sebagai panglima menuju Indonesia yang maju.

Keberhasilan pembangunan pendidikan dengan sendirinya akan diikuti keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Keberhasilan satu bangsa di sejumlah bidang seperti ekonomi, politik, atau budaya —namun tidak diikuti oleh keberhasilan di bidang pendidikan— justru akan menjadi bumerang bagi bangsa itu sendiri.

Katakanlah suatu negara mencapai tingkat kemakmuran tinggi namun karena tidak disertai kemajuan intelektual dan afektual, kemakmuran yang ada justru potensial disalahgunakan untuk menghancurkan dirinya sendiri.

"Itulah sebabnya, pendidikan harus dijadikan panglima pembangunan, bersamaan dengan bidang-bidang lainnya!" tandas Deding Ishak seperti dituturkan kepada Anis Fuadi dari *Berita Indonesia*, di ruang kerjanya Gedung DPR/MPR, Jakarta, belum lama ini.

Penulis produktif di media massa ini kemudian menunjuk pengalaman Bangsa Jepang yang mengistimewakan pendidikan di ata segala-galanya. Setelah negaranya bertekuk lutut tanpa syarat kepada Sekutu, Kaisar Jepang tidak menanyakan berapa tentara yang tersisa, melainkan berapa guru yang masih dimiliki negeri Matahari Terbit itu.

Dengan membangun pendidikan, Jepang yang diperkirakan baru bisa bangkit setelah 60 tahun pemboman Nagasaki dan Hiroshima, ternyata bisa bangkit dalam waktu 20 tahun. Jepang bisa bangkit, karena pemimpinnya peduli dan memberikan komitmen tinggi pada kemajuan pendidikan dan menghargai kerja keras.

Atas dasar itu, "Amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat agar pemerintah, baik di pusat maupun daerah, melalui APBN/APBD mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen untuk sektor pendidikan adalah sesuatu yang niscaya dan sepatutnya direalisasikan," ungkap mantan anggota DPRD Jawa Barat dua periode ini penuh optimisme.

Seperti disebutkan di atas, di samping pendidikan, dunia keagamaan (baca: dakwah) juga menjadi kehirauan Deding Ishak. Belum lama ini, dia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) periode 2004-2009, menggantikan Chalid Mawardi.

Deding menekankan, dia akan membawa MDI sebagai sebuah Ormas Islam lintasektarian yang mampu menampilkan citra Islam yang modern. Konkretnya, dalam memecahkan setiap masalah keumatan, MDI akan mengedepankan langkah-langkah yang cerdas, beradab, dan dilandasi kepentingan bangsa.

Tanggung jawab sebuah Ormas Islam, lanjut Deding, bukan hanya memenuhi kebutuhan ruhani umat tapi juga berpartisipasi dalam langkah pemberdayaan umat (kesejahteraan). "Dua hal itu senantiasa menjadi perhatian MDI," ucapnya. ■ AF

BIODATA

Nama : DR. H. Deding Ishak Ibnu Sudja, Drs., SH., MM.
Lahir : Bandung/4 Juni 1962
Agama : Islam
Isteri : Hj. Rachmayani Dewi, SH., Sp.N.
Anak : Derisa Zahara, Deya Faaghna, Dara Daula Mumtaza, M. Daria Adiwena Akbar
Ayah : KH. R. Totoh Abdul Fatah
Ibu : Hj. Siti Mariyam

Jabatan/Pekerjaan Sekarang:
- Anggota Komisi VIII (Bidang Sosial, Agama, Pemberadayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) DPR-RI (2004-sekarang).
- Anggota Fraksi Partai Golkar DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kota Cianjur).
- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Majelis Dakwah Islamiyah (MDI).
- Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yapata Al-Jawami, Cileunyi, Kabupaten Bandung.
- Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati (SGD), Bandung (periode 2004-2007).

Riwayat Pekerjaan Politik:
- Mantan Anggota DPRD Jawa Barat (periode 1997-1999 dan periode 1999-2004)

Latar Belakang Pendidikan:
- IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (S-1) (1978-1981).
- Sekolah Tinggi Hukum Garut, Ujian Negara Unpad (1985-1989).
- Magister Manajemen STIE Jakarta (S-2) (1994-1998).
- Doktor bidang Ilmu Administrasi (Kebijakan Publik) Universitas Padjadjaran, Bandung, (S-3) (2006).

◆ DES ALWI

TOKOH SIMBOL MASYARAKAT

Di Banda Naira ia bukan saja tokoh, tapi juga 'pusat komunikasi' sebagai tempat mengadu, berkeluh kesah, meminta petunjuk untuk memecahkan masalah. Di Jakarta, ia terkenal sebagai pelobi tingkat tinggi dan simbol masyarakat Banda. Lalu, siapa Des Alwi?

"Sebuah kapal putih tampak merapat ke dermaga. Semua mata tertuju pada dua orang tua mengenakan setelan jas putih dan berdasi yang menuruni tangga kapal. Kedua tuan berparas pucat itu membawa delapan koper besar dari kayu dan empat tas besar dari kulit. Dengan celana renang dan rambut yang masih basah saya perhatikan mereka. Yang salah seorang di antaranya memakai kaca mata. Seorang di antara mereka tersenyum kepada saya," demikian kenangan Des Alwi saat pertama kali bertemu Muhammad Hatta dan Sutan Sjahrir di masa pembuangan mereka di Banda Naira.

Saat itu Des Alwi baru berusia 8 tahun dan duduk di kelas dua ELS *(Europeesche Lagere School)*. Namun ia mengaku sudah mengetahui dengan pasti bahwa kedua tuan itu dari Boven Digul, karena wajah mereka pucat. "Setiap orang yang datang dari Digul senantiasa berwajah pucat. Agaknya di sana mereka kekurangan makan dan banyak yang menderita malaria," ungkapnya.

Kedua orang itu lalu bertanya pada Des dengan bahasan Belanda, apakah tahu di mana rumah dokter Tjipto Mangunkusumo? "Tahu, tetapi jauh dari sini. Kalau rumah Mr. Iwa Kusumah Sumantri persis di depan dermaga ini," jawab Des kecil. Nama dokter Tjipto dan Mr. Iwa memang sangat di kenal di Banda, karena mereka telah cukup lama berdiam di Naira dan Des Alwi adalah teman putra-putri mereka.

Belakangan Des baru tahu, kedua 'tamu jauh' itu bernama Muhammad Hatta dan Sjahrir, orang tahanan politik Belanda yang dibuang ke Boven Digul. Pertemuan dengan kedua tokoh itulah yang hingga kini tak pernah ia lupakan. Bahkan ia menganggapnya sebagai pertemuan yang kemudian menjadi arah hidupnya hingga menjadi Des Alwi yang sekarang ini. Karena kecerdikan, kepandaian dan 'kenakalan'nya, kedua tokoh tersebut konon sangat menyukai cucu Said Baadila ini. Hingga kemudian Bung Hatta mengambil Des Alwi sebagai anak angkat.

"Saya merasa sebagai orang pertama yang mereka tangani. Dalam kehidupan saya selanjutnya, ketepatan dan ketelitian dalam bekerja yang telah beliau tanamkan merupakan salah satu nilai tambah yang besar dalam karier saya selama ini. Dari Oom Sjahrir, saya mendapat banyak wawasan dan pengertian," kata Des Alwi.

Cucu Raja Mutiara Maluku

Des Alwi Abubakar lahir 17 November 1927 di Desa Nusantara, Naira sebuah pulau kecil dalam kelompok Banda di Kepulauan Maluku. Ayahnya bernama Alwi, berasal dari Ternate yang konon masih keturunan Sultan Palembang yang dibuang ke Banda. Sang ibu bernama Halijah Baadilla, anak perempuan dari Said Baadilla, pengusaha mutiara yang pernah terkenal dari Naira.

FOTO IST

BANDA

Sang kakek, Said Baadilla terkenal sebagai pebisnis ulung di Banda. Dengan bendera perusahaan Baadilla Brothers, ia mengembangkan bisnis mutiara Banda dan perkebunan Pala yang terkenal dengan Perk Kele Norwegen di Lonthor dan di Pagar Buton, Banda Besar. Mutiara dan Pala itu diekspor ke berbagai negara di Eropa, hingga ia dikenal sebagai eksportir berpengaruh. Berkembangnya perusahaan Baadilla Brothers menjulangkan nama Said Baadilla, hingga Pemerintah Hindia Belanda menjulukinya sebagai *Raja Mutiara Maluku.* Dengan julukan itu, pada tahun 1896 Said Baadilla mendapat kehormatan menjadi tamu istimewa Ratu Emma, istri Wilhelm III di Belanda.

Namun, kebesaran sang kakek hanya kenangan di benak Des Alwi. Sebagai cucu raja mutiara, Des Alwi lahir saat usaha Baadilla sudah hampir ambruk. Masa kebesaran sang kakek sudah mulai memudar, bahkan kondisinya semakin memburuk ketika sang kakek meninggal tahun 1934. Sampai usia 6 tahun Des sama sekali tidak tahu jika sang kakek pernah menjadi orang terkaya di Banda Naira, bahkan di Maluku. Ia mengaku tak sempat menikmati kejayaan sang kakek, walaupun sisa-sisa kejayaan itu masih terlihat.

Namun, betapa buruknya kondisi ekonomi keluarga, Des mengaku kehidupan masa kecilnya sangat menyenangkan. Setiap hari ia mengaji, berenang di laut sambil berebut memburu coin yang dilempar orang, mencuri buah dari kebun tetangga dan bermain dengan teman-temannya. "Masa kecil saya demikian indah. Saya bangga lahir di Naira," ungkap ayah Mira, Tanya dan Ramon Alwi ini.

Ahli Lobi Dan Model Komunikasi

Kebesaran nama keluarga tidak membuat Des Alwi terlena. Ia tumbuh sebagai sosok pemuda yang begitu mencintai tanah kelahiran dan negaranya. Barangkali karena 'pengaruh' pendidikan Hatta dan Sjahrir, di samping sekolahnya di ELS, Des tumbuh menjadi pemuda yang tidak sekedar berani dan penuh percaya diri, tapi juga memiliki"kelebihan' dalam berdiplomasi.

Sebagian orang menilai, kepiawaian Des Alwi dalam hal melobi, hingga mendapat julukan pelobi tingkat tinggi, dari petinggi nasional hingga internasional itu salah satunya hasil dari kebiasaannya bergaul dengan tokoh-tokoh tahanan politik yang dibuang ke Banda. Des banyak belajar dari dr. Tjipto Mangunkusumo yang disebutnya sebagai Oom Tjip, Dr. Muhammad Hatta yang dipanggilnya sebagai Oom Kaca Mata, Sjahrir sebagai Oom Rir, Mr. Iwa Kusumah Sumantri dan beberapa anggota Sjarikat Islam Indonesia lainnya.

Maka, dalam perjalanan karier selanjutnya, ia pernah beberapa kali menjadi Atache Press/Kebudayaan KBRI di luar negeri yaitu KBRI Bern, KBRI Austria dan KBRI Philipina. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia – Malaysia tahun 1965-1975 ia sebagai Dinas Diplomatik terlibat dalam Operasi Khusus Tim Penyelesaian Konfrontasi itu. Des berhasil menjadi perantara–'sulit'. Jurus-jurus kepiawaian diplomasinya mendekati almarhum mantan PM Tun Abdul Rahman dan almarhum mantan DPM Tun Abdul Razak berhasil meredakan konfrontasi itu.

Sebagai putra daerah ia berperan aktif dalam lobi-lobi nasional dan internasional, untuk berbagai kepentingan Indonesia di dalam maupun luar negeri. Secara lebih spesifik, Des Alwi memiliki jalur lobi kepada tokoh-tokoh nasional di Jakarta. Dalam hal ketokohan Des Alwi ini, maka realitas yang ada bahwa hampir sembilan puluh persen pembangunan fisik dan masyarakat Banda yang membutuhkan peran lobi, semuanya dipengaruhi oleh hasil lobi Des Alwi di tingkat nasional. Dalam hal ini pula maka sebenarnya semua keputusan tentang pembangunan Banda yang berskala besar pada kenyataannya bukan diputuskan di tingkat Maluku atau Maluku Tengah, akan tetapi diputuskan di tingkat Jakarta.

Bahkan kini, dalam perkembangan masyarakat Banda, tokoh Des Alwi menjadi salah satu model komunikasi. Model komunikasi yang memusat pada tokoh Des Alwi ini adalah semua komponen masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha dan kegiatan Des Alwi. Termasuk mereka yang pernah mendapat bantuan Des baik fasilitas, dana maupun koneksitas.

Melihat ketokohan dan peran Des Alwi yang begitu dominan terhadap pengembangan masyarakat di Banda, terutama pariwisata, maka umumnya masyarakat Banda berpendapat bahwa Banda sangat identik dengan kehendak Des Alwi. Pendapat-pendapat macam ini dan kaitan-kaitan kepentingan masyarakat dengan bidang-bidang yang bersentuhan dengan usaha Des Alwi di Banda inilah yang melahirkan model-model komunikasi memusat kepada tokoh ini.■ AD

BIODATA

I. KETERANGAN PRIBADI
1. Nama Lengkap : Des Alwi Abubakar
2. Nama Samaran : Des Alwi
3. Tempat Lahir : Banda Naira
   Tgl. Lahir : 17 Nopember 1927
4. Alamat Rumah :
   Jl Taman Biduri Blok N 1 No. 7 Permata Hijau, Jakarta Barat Telp. 5482565
5. Warganegara : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Asal Kelahiran : Banda Naira, Maluku Tengah
8. Jabatan : Direktur Utama
9. Nama Kantor : PT. Avisarti Film *Corporation*
10. Alamat Kantor :
    Jl. Narada No 36 Tanah Tinggi Jakarta Pusat Telp. 4251613 Fax. 4240151

II. KETERANGAN KELUARGA
1. Nama Istri : (Alm) Anne Marie Mambu
2. Menikah : Jakarta, 8 Mei 1953
3. Tgl Lahir Istri : Tondano, 21 Maret 1929
4. Anak-anak : (Laki- laki) Karma Alwi (Alm)
   (Perempuan) Mira Alwi
   (Perempuan) Tanya Alwi
   (Laki- laki) Ramon Alwi

III. RIWAYAT PENDIDIKAN:
Nama dan Tempat Sekolah
1. E.L.S lulus 1953-1941
2. IVELO (STM) lulus 1942-1945
3. *British Institute of Technology London* lulus 1947-1950

Pendidikan Pasca Sarjana
1. *Philips NSF Advance School Hilversum*
   Jan - Juli 1950 *Hilversum*
2. *Special* Antena Penyiaran Rombek ITB dan PT (Pos, Telegraph dan Telepon) 1951 Bandung

IV. PEKERJAAN
1. Penterjemah Siaran Teknik dan Bahasa Asing RRI 1950-1951
2. Atache Press/Kebudayaan KBRI di Bern 1952-1956
3. Atache Press/Kebudayaan KBRI Australia 1956-1957
4. Atache Press/Kebudayaan KBRI Philipina 1957-1958
5. Operasi Khusus Tim Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia (Dinas Diplomatik) 1965-1975
6. Komisaris Bank Danamon 1977-1981
7. Wakil Ketua PPFI (Pusat Persatuan Film Indonesia) 984-1987
8. Direktur Utama pt Avisarti Film Corporation 1974-sekarang
9. Wakil Ketua Bidang Energi & Pertambangan Kadin 1980
10. Direktur Utama PT Kaliraya Sari 1981-2000
11. Ketua Himpunan Masyarakat Banda 1981-1983
12. Ketua Yayasan Warisan dan Budaya Bunda 1988-sekarang
13. Ketua Yayasan 10 Nov'45 1990-sekarang
14. Wakil Ketua II Departemen Usaha *Sea And Island* Resort DPP Gahawisri 1990-sekarang
15. Bintang Pejuang 45
16. Bintang Pejuang 50
    Menerima Bintang Mahaputra Pratama 2000

LAKSAMANA TNI SLAMET SOEBIJANTO (Kepala Staf TNI Angkatan Laut)

"Jumlah Lantamal di Perbatasan

TNI Angkatan Laut memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di perbatasan. Berbagai upaya dilakukan, kendati masih ada beberapa kendala di sana sini. Berikut petikan hasil wawancara *Berita Indonesia* dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Slamet Soebijanto:

Kawasan perbatasan mempunyai nilai yang sangat strategis, karena menyangkut berbagai aspek kepentingan masing-masing negara, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan Hankam. Sehingga diharapkan kepedulian semua elemen masyarakat dan pemerintah dalam penanganan batas wilayah. Sejauh mana peran TNI AL dalam menjaga batas wilayah di laut?

Indonesia telah diakui sebagai Negara Kepulauan sesuai UNCLOS'82 yang berlaku efektif 16 November 1994. Sehingga Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu 5,8 juta Km2 dengan panjang garis pantai 81.290 Km. Indonesia mempunyai perbatasan maritim (batas Laut Teritorial, batas Zona Ekonomi Ekslusif dan batas Landas Kontinen) dengan negara tetangga, yaitu Australia, India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini dan Timor Leste dimana sebagian besar dari batas maritim dengan negara-negara tetangga tersebut belum terselesaikan.

Dari hasil kajian tentang pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, terdapat 92 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan 12 diantaranya yang mendapat perhatian khusus.

Langkah strategis yang dilakukan TNI AL dalam mengawasi dan mengamankan pulau kecil terluar *Pertama,* Patroli Keamanan di Laut, untuk meningkatkan intensitas kehadiran kapal-kapal perang RI (KRl) di seluruh perairan Indonesia. Selain untuk menegakkan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara kita dalam mempertahankan setiap tetes air dan jengkal tanah dari gangguan pihak asing (*deterrence effect*).

Kedua, Pameran Bendera *(show of flag),* tujuannya agar mendekati masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, sekaligus untuk menggugah semangat kebanggaan dan cinta tanah air serta menjaga kedekatan secara psikologis. *Ketiga,* Survei Hidrografi, yaitu menetapkan titik dasar dan garis pangkal dalam rangka penetapan batas maritim Indonesia dengan Negara lain.

FOTO IST

Kabarnya, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Padang dan Lantamal Merauke segera direalisasikan. Sejauhmana peran keberadaan dua pangkalan tersebut?

Memang benar, Lantamal Padang dan Lantamal Merauke insya Allah akan direalisasikan pada tahun ini. Sehingga jumlah Lantamal yang semula 9 nantinya akan menjadi 11.

Penambahan Lantamal ini tentunya terkait erat dengan rencana pembentukan 3 Komando, Wilayah Laut di Barat, Tengah dan Timur, dan berada di bawah Armada RI yang bermarkas di Surabaya. Berkaitan dengan hal itu, membutuhkan penggelaran pangkalan yang mampu secara optimal mendukung satuan-satuan operasi.

Alasannya karena di wilayah barat pulau Sumatera belum ada Lantamal, padahal disana memiliki garis pantai yang cukup panjang dan berhadapan dengan laut terbuka. Dan memungkinkan terjadinya potensi kerawanan.

Luasnya wilayah kerja Lantamal V di seluruh perairan Papua dan Lantamal VIII yang mencakup perairan Maluku, menjadikan pengendalian di laut belum optimal. Sehingga perlu dibentuk satu Lantamal lagi di perairan selatan Papua, yaitu di Merauke.

Untuk perairan perbatasan, TNI AL akan merealisasikan status pangkalan sehingga wilayah-wilayah perbatasan akan lebih aman. Bagaimana menurut Bapak?

Dalam mengantisipasi kerawanan di wilayah perbatasan, TNI AL saat ini tengah meninjau ulang status pangkalan-pangkalan yang berada di wilayah perbatasan. Yaitu dengan menaikan kelas

Akan Ditambah"

pangkalan yang ada di wilayah perbatasan dari kelas "C" menjadi kelas "B", seperti Lanal Ranai dan Lanal Tahuna. Dengan pertimbangan banyaknya permasalahan di perbatasan, sehingga komandannya pun yang semula dijabat oleh Pamen berpangkat Letkol menjadi Kolonel.

TNI AL menempatkan pasukan Marinir di 12 pulau terluar yang memiliki potensi klaim dari negara-negara tetangga. Seberapa efisien upaya itu dilakukan dalam upaya pengamanan perbatasan ?

Memang, sebanyak 12 pulau terluar Indonesia akan dijaga pasukan Marinir sebagai upaya untuk mencegah agar pulau-pulau itu tidak dijual atau direbut oleh negara lain. Setiap pulau akan dijaga oleh sejumlah 20 orang prajurit Marinir, dengan masa penugasan selama 3 bulan secara bergiliran. Demikian pula unsur-unsur TNI AL secara konsisten akan melaksanakan patroli di perairan sekitar pulau-pulau tersebut.

Dari segi efisiensi jelas ada. Karena tidak begitu banyak mengerahkan unsur maupun personel, tapi dampaknya jelas sangat menguntungkan karena semua pulau terluar dapat terawasi. Sebab apabila tidak diberi perhatian secara khusus bisa berpotensi konflik. Disamping itu, pulau-pulau tersebut juga merupakan *base point* batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga, sehingga eksistensinya perlu dipertahankan karena merupakan wujud dari kedaulatan negara.

Sering kali ada beberapa pulau yang semula kosong, lantas tiba-tiba diketahui berpindah tangan ke tangan warga negara asing. Mengapa bisa terjadi ?

Ada empat kriteria dasar eksistensi sebuah pulau yang memungkinkan sebuah pulau dinyatakan hilang.

Pertama, Hilang secara fisik, biasanya terjadi sebagai dampak dari proses alam/geologis, yaitu proses abrasi secara terus menerus sehingga menenggelamkan sebuah pulau, seperti Pulau Nipa di Selat Singapura. Kegiatan manusia pun dapat pula mempercepat proses tersebut. Seperti penambangan pasir laut secara berlebihan.

Kedua Hilang secara kepemilikan, artinya perubahan status kepemilikan akibat dari pemaksaan kepemilikan dengan kekuatan militer maupun proses hukum. Contohnya, pemaksaan kepemilikan Pulau Falkland oleh Inggris dan pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia sebagai hasil keputusan Mahkamah Internasional.

Ketiga, hilang secara pengawasan. Ini terkait dengan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia, sehingga kontrolnya/pengawasan pemerintah bisa saja terjadi. Kelalaian itu tentunya bukan kesengajaan, tetapi "posisi geografis" pulau-pulau itu dekat kepada negara lain. Manakala pemerintah lengah, pulau-pulau terluar tersebut sangat mungkin dimanfaatkan oleh pemerintah asing untuk kepentingan negaranya melalui berbagai upaya fisik dan non fisik, seperti industri pariwisata, perikanan, perkebunan. Misalnya yang dialami oleh Pulau Batek yang berbatas dengan Timor Leste. Bila hal ini tidak diantisipasi sejak dini maka kasus sengketa Sipadan dan Ligitan akan terulang kembali. *Keempat*. Hilang secara sosial ekonomi. Ini didasari adanya faktor pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat di pulau tersebut serta adanya fenomena sosial kemasyarakatan yang turun temurun melalui proses perkawinan penduduk antar pulau, sehingga terjadilah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat di pulau tersebut.

Contohnya Pulau Marore, Pulau Miangas dan Pulau Marampit di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Secara difinitif, penduduk ketiga pulau tersebut adalah Warga Negara Indonesia, namun secara sosial ekonomi, kebiasaan penduduknya tidak jauh beda dengan masyarakat Philipina.

Dalam pengamanan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga, bagaimana kebersamaan TNI AL dengan masyarakat setempat?

Kerjasama TNI AL dengan masyarakat setempat di pulau yang ada penduduknya selama ini berjalan baik. Pulau-pulau terpencil dan terluar kerap menjadi daerah sasaran kegiatan dari operasi Bhakti TNI AL Surya Bhaskara Jaya. Kegiatannya selain memberi bantuan pelayanan kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana juga melaksanakan penyuluhan-penyuluhan termasuk ceramah kesadaran berbangsa dan bernegara. Masyarakat termasuk para nelayan dihimbau senantiasa waspada bila ada yang mencurigakan dan mengganggu keamanan serta mengancam kedaulatan Negara RI segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

TNI AL juga punya program Operasi Pasar Berjalan (Mobile Market) guna memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Kapal-kapal TNI AL bergerak dari pulau ke pulau dengan membawa material sumbangan dan bantuan serta bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat yang dapat diperoleh dengan harga murah. Kegiatan ini tidak diorientasikan untuk mencari keuntungan (*profit Oriented*) namun lebih didorong oleh keinginan TNI AL untuk memberdayakan masyarakat di pulau-pulau tersebut.

Selama ini, masyarakat di beberapa daerah perbatasan seperti di Pulau Miangas, Pulau Marore, Kepulauan Riau, Tarakan dan lain-lain, memperoleh kebutuhan bahan pokoknya dari negara tetangga dengan harga yang lebih murah. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan harga dan kelangkaan barang-barang dari Indonesia. Apabila terdapat suatu kontinuitas ketersediaan barang-barang dengan harga yang terjangkau, maka interaksi ekonomi lintas perbatasan yang dilakukan oleh masyarakat setempat akan dapat ditekan. Pada akhirnya peran ekonomi asing akan berkurang dan dengan demikian masalah perbatasan yang bersumber pada permasalahan ekonomi juga dapat diminimalkan. ■ SB

B • I • O • D • A • T • A

Nama	: Slamet Soebijanto
Pangkat	: Laksamana TNI
N R P	: 7318/P
Jabatan	: KASAL
Tempat/Lahir	: Mojokerto, 04 Juni 1951
Suku Bangsa	: Jawa
Agama	: Islam
Pendidikan Umum	: SD Tamat Th 1963, SMP Tamat Th 1966, SMA Tamat Th 1969
Pendidikan Militer (Terakhir)	: KRA -33 LEMHANNAS Th 2000
Riwayat Penugasan (Terakhir)	: LEMHANNAS/WAGUB (01122003), Kepala Staf TNI AL (18-02-2005 s/d sekarang)
Tanda Jasa	: BT Yudha Dharma Pratama, BT Yudha Dharma Nararya, BT Jalasena Pratama, BT Jalasena Nararya, SL Seroja, SL Kesetiaan XXIV, SL Dwidya Sistha

Eksodus Investasi

Era globalisasi memperlihatkan akselerasi perputaran investasi yang tak lagi mengenal batas-batas negara. Sejumlah konglomerat binaan rejim Orde Baru berambisi menjadi perusahaan global berkelas *multinational corporation* (MNC).

Pasca krisis 1998 aset-aset ekonomi Indonesia banyak dikuasai asing, terlebih oleh pemodal asal negeri jiran Malaysia dan Singapura. Kini, gantian para konglomerat keturunan etnis Tionghoa asal Indonesia memperlihatkan ambisi besar menguasai aset-aset ekonomi kawasan Asia.

Kini, mereka yang jelas-jelas sudah memproklamirkan komitmen berinvestasi, antara lain Grup Salim, Grup Ciputra, Grup Indorama, grup Sinar Mas, Sudwikatmono, Putera Sampoerna, Sjamsul Nursalim dan lain-lain. Harian ekonomi *Investor Daily* belakangan aktif menurunkan langkah-langkah spektakuler mereka. Seperti dilaporkan (14/3), setidaknya sudah US$ 22,4 miliar dolar atau setara Rp 206 triliun (T) dana yang mereka tanamkan di luar negeri.

Grup Salim, misalnya, menyatakan komitmen akan invetasi di India US$ 10 miliar (Rp 92,1 T). Di sana Salim akan mengembangkan sejumlah proyek diantaranya pabrik sepeda motor, pabrik mie, dan properti.

Grup Salim membangun pabrik sepeda motor berkapasitas 500 ribu unit di negara bagian Bengala, dengan memanfaatkan kandungan lokal signifikan. Sepeda motor merek Arjun itu mulai memasuki pasar tahun 2007, berkapasitas mesin 100-125 cc, dijual seharga US$ 900, dan mampu menyerap tenaga kerja langsung 6.000 orang.

Salim juga menjajaki pembangunan pabrik mie instan, bahkan sudah memperoleh kepastian pembebasan lahan seluas 50 acre. Pabrik ini memproduksi mie 52 ribu ton pertahun, menyerap tenaga kerja 1.500 orang.

Bekerjasama dengan Grup Ciputra, Grup Salim hingga tahun 2016 akan mengembangkan kota satelit di daerah Dankuni, West Bengal, India. Keduanya, bekerjasama dengan pemerintah lokal dan sejumlah pengusaha lokal, melengkapi kota satelitnya dengan fasilitas rumah sakit, sekolah, pusat industri, perdagangan, dan taman rekreasi.

Sebelum ini, di China sejak tahun 1994 Grup Salim sudah investasi US$ 1,2 miliar (Rp 13,8 T) di sejumlah proyek. Kini, di kawasan pedalaman Mongolia, China Salim membangun industri susu senilai US$ 240,1 juta (Rp 2,2 T), yang menjadikan kawasan ini sebagai pusat peternakan sapi terbesar dengan standar internasional. Salim di sana mengembangbiakkan 10 ribu sapi, memanfaatkan teknologi paling mutakhir di lahan peternakan seluas 589,86 hektar. Grup Salim juga membangun proyek properti di kota Liangwan, Distrik Putuo, Shanghai, China dengan investasi US$ 118,3 juta (Rp 1,09T).

Grup PT Indorama Synthetics Tbk memilih Nigeria dan Thailand sebagai ladang bisnis baru, dengan mengakuisisi perusahaan petrokimia dan membangun pabrik purified terepthalic acid (PTA) senilai US$ 585 juta (setara Rp 5,38 T).

Indorama, mengakuisisi Nigerian Eleme Petrochemicals (NEP) asal Nigeria senilai US$ 225 juta. NEP memiliki kapasitas produksi tahunan 300 ribu ton olefin, 250 ribu ton polythylene, dan 80 ribu ton polypropylene. Indorama adalah produsen poliester terbesar Indonesia, beraset US$ 600 juta, yang menggunakan petrokimia sebagai bahan baku. Maret lalu Indorama membangun pabrik PTA berkapasitas 700 ribu ton pertahun di Thailand.

Persaingan Dua Raja Pulp

Dua pemain besar industri pulp & paper, Sinar Mas dan Radja Garuda Mas (RGM), tak ketinggalan bersaing meningkatkan investasi.

Sinar Mas milik Eka Tjipta Widjaja, sudah sejak 1995 mulai beralih ke China dan menanamkan investasi di sana US$ 4 miliar. Di Indonesia sendiri, Sinar Mas juga menghabiskan investasi pulp US$ 4 miliar sehingga total investasi grup ini di bidang pulp & paper mencapai US$ 8 miliar atau Rp 74 T.

Sementara itu, Radja Garuda Mas milik Sukanto Tanoto melalui bendera usaha Asia Pacific Resources International Hold-

CIPUTRA: KISAH PENGEMBANG KELAS DUNIA

Filsuf Pengembang Properti Indonesia, Insinyur Ciputra, lahir di sebuah kota kecil bernama Parigi, Sulawesi Tengah pada 24 Agustus 1931 dengan nama asli Tjie Tjin Hoan. Ia anak ke-3 dari pasangan ayah Tjie Sim Poe dan ibu Lie Eng Nio, pernah menjadi atlet lomba lari 800 meter dan 1.500 meter mewakili Sulawesi Utara pada PON II di Jakarta. Ciputra lulus dari ITB Bandung jurusanTeknik Arsitektur, tahun 1960.

Ia menikah dengan Dian Sumeler di usia 24 tahun saat masih kuliah tingkat dua. Saat kuliah tingkat tiga untuk pertamakali Ciputra mendirikan sebuah perusahaan jasa konsultan, PT

Perentjana Djaja bersama dua sahabat kampus Budi Brasali dan Ismael Sofyan.

Setamat ITB ia berusaha keras menemui Gubernur DKI Jakarta, saat itu Soemarno, dan berhasil diyakinkan untuk mendirikan perusahaan patungan PT Pembangunan Djaja (kini Grup Jaya) untuk membangun Pasar Senen.

Ciputra bertemu lagi dengan Gubernur Ali Sadikin, lalu mengusulkan ide yang lebih inovatif meneruskan proyek pembangunan Ancol yang terbengkalai. Lahirlah perusahaan patungan ke-2, PT Pembangunan Jaya Ancol untuk membangun Taman Impian Jaya Ancol (TIJA), sebuah kawasan wisata keluarga yang tiap tahun dikunjungi 10 juta orang.

Tahun 1971 Ciputra lagi-lagi mengajak dua sahabat kampus-

Pengusaha Keturunan

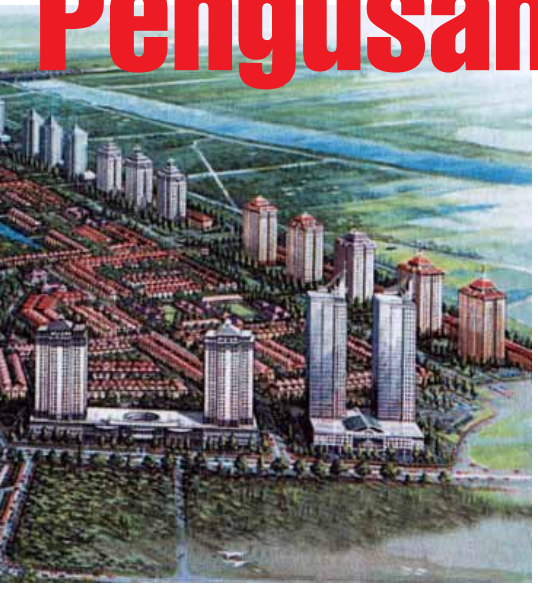

ings Ltd (PRIL), mengakuisisi perusahaan pulp Shandong Rizhao SSYMB Pulp Co di China senilai US$ 360 juta. Shandong Rizhao ini memiliki kapasitas produksi 220 ribu ton pertahun. Lewat APRIL pula diambilalih 55% saham proyek Sarawak Pulp & Paper, di Bitulu, kota Sarawak, Malaysia senilai US$ 1,2 miliar. Proyek ini akan menghasilkan 300 ribu mopty penggilingan kertas kayu lapis.

RGM juga mendirikan pabrik pulp baru berkapasitas 1 juta ton pertahun di kota Xinhui, Guandong, menelan investasi US$ 1,98 miliar (Rp 18,2 T), dan di kawasan Zona Pengembangan Ekonomi Taizhou senilai US$ 50 juta.

RGM saat ini memiliki kapasitas produksi pulp 4 juta ton pertahun. Diproyeksikan, di China RGM akan investasi pulp & paper hingga US$ 7 miliar atau Rp 64,4 T. Sehingga dalam tiga atau empat tahun ke depan RGM akan tampil sebagai penghasil pulp terbesar dunia, menyalip posisi Sinar Mas yang saat ini memiliki kapasitas produksi pulp 6,9 juta ton pertahun.

Sjamsul Nursalim, pemilik Grup Gadjah Tunggal mencoba membangun imperium bisnis baru di Singapura dengan kekuatan investasi US$ 1,2 miliar. Mantan "Raja Udang" pemilik nama asli Lim Tek Siong, alias, Liem Tek Siong, alias Liem Tjen Ho, ini menggeluti bisnis baru bidang teknologi, properti, energi, perdagangan, distribusi, ritel, hingga marketing.

Investor Daily berhasil memperoleh sebuah dokumen, yang isinya antara lain menyebutkan Sjamsul memiliki beberapa proyek dalam skala besar di Singapura, China dan Australia melalui perusahaan Tuan Sing dan Gultech, dengan investasi sekitar US$ 1 miliar.

Taipan lokal Sudwikatmono lebih tertarik berbisnis di tanah air dengan menyediakan energi listrik. Bersama PT Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA), dan China Huadian Corporation, PT Indika Inti Energy salah satu anggota Grup Indika milik Pak Dwi, berencana membangun sebuah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang berkapasitas 4x600 MW (total 2.400 MW), terletak di Bangko Tengah, Muara Enim, Sumatera Selatan, berbiaya US$ 1,6 miliar atau Rp 14,7 T.

PLTU mulai dibangun akhir 2006 dan beroperasi sekitar 2009/2010, berdasarkan kontrak kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menjual listrik sampai di transmisi seharga US$ 0,035 per KWH.

Putera Sampoerna memilih investasi di perusahaan perjudian. Putera menanam investasi US$ 200 juta (Rp 1,8 T) untuk membeli Mansion, sebuah kasino"*online* melalui internet berbasis di Gibraltar.

Sebelum tiba pada Mansion Putera sempat menjajaki investasi proyek infrastruktur jalan tol Cipularang, dan mencoba mengakuisisi pabrik kertas Kiani Kertas milik Prabowo Soebianto namun keduanya gagal. Putera dengan kekuatan uang Rp 3,8 T diketahui sedang bergerilya lagi mengincar 25,53% saham PT Semen Gresik milik Cemex, yang memang hendak dijual.

Sejumlah sebab dikemukakan para pengamat ekonomi dan keuangan, mengapa pebisnis keturunan ini eksodus melakukan investasi di luar negeri. Seperti, undang-undang perburuhan yang tak pro pengusaha, ketidakpastian otonomi daerah, iklim investasi yang tak menggairahkan, sumber dana perbankan yang berbunga tinggi, biaya pelabuhan yang tak kompetitif, belum ada payung hukum yang memberikan kenyamanan investasi, dan lain-lain.

Tetapi, sebagian pengusaha justru menilai langkah yang dilakukannya bukanlah eksodus atau pelarian modal. Gandhi Sulistiyanto, *Vice President* Grup Sinar Mas mengatakan, ekspansi kelompoknya ke China berbeda dengan di Indonesia. Di Negeri Tirai Bambu itu pendanaan pembangunan pabrik pulp maupun pengembangan lahan didukung oleh Bank of China (BoC), sementara di Indonesia berasal dari obligasi dan sindikasi bank dalam negeri.

"Terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Jadi, tidak ada pelarian modal. Di China pendanaan berasal dari mereka, sedangkan di Indonesia, Sinar Mas menarik modal masuk," kata Gandhi, kepada *Investor Daily*. ■ HT

nya, Ir Budi Brasali dan Ir Ismail Sofyan mendirikan PT Metropolitan Development untuk bergerak di bidang properti, konstruksi, konsultansi, perdagangan dan manufaktur. Ciputra yang menduduki Presiden Komisaris, di situ bertindak sebagai inspirator, motivator, dan inovator untuk membangun sejumlah proyek besar seperti Wisma Metropolitan dan Wisma WTC di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, perumahan elit Pondok Indah dan Puri Indah, Hotel Horison di Ancol dan lain-lain. Di Metropolitan ini pula ia memperoleh kepercayaan dari Grup Salim.

Memperingati usia ke-50, Ciputra pada tahun 1981 mendirikan kelompok usaha baru yang melibatkan istri, anak dan menantu yaitu Rina Ciputra Sastrawinata dan suami Budiarsa Sastrawinata, Junita Ciputra dan suami Harun Hajadi, Candra Ciputra dan istri Sandra Hendarto, serta Cakra Ciputra. Kelompok usaha ini diberi nama Grup Ciputra (Ciputra Develoment) terdiri tiga sub holding.

Sejak tahun 1980 Ciputra diketahui sudah mulai mengarahkan diri untuk membentuk perusahaan berkelas multinasional, saat melakukan investasi di Singapura dan Hawai melalui Grup Metropolitan. Kegiatan sama dilanjutkan lagi mulai tahun 1990 dengan memasuki Vietnam, kali ini melalui Grup Ciputra. Di Hanoi, ibukota Vietnam saat itu Ciputra membangun hotel bintang-5 Hanoi Horison Hotel, dua tahun kemudian membangun kota mandiri Ciputra Hanoi International City, sebuah proyek real estat terbesar yang memiliki reputasi tinggi di Vietnam.

Saat ini bersama Grup Salim Ciputra membangun Kolkata West International City di Kalkuta, India sebuah proyek perumahan skala kota. Ide yang sama akan diteruskan lagi ke Kamboja.

Ciputra belakangan fokus hanya pada bisnis properti. Ia bercita-cita perusahaannya dapat bergerak di seluruh dunia sebagai perusahaan multinasional (Multinational Corporations, MNC), sama seperti Mc Donald's dan KFC yang hanya berbisnis makanan cepat saji namun memiliki outlet dimana-mana.■ HT

Oleh: Dr Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang*

Syaykh Al-Zaytun

BAGIAN DUA
DARI DUA TULISAN

PELUANG DI TENGAH

Saat ini lebih dari 600.000 mahasiswa asing berdatangan ke Amerika Serikat. Dengan jumlah yang hampir sama di Inggris dan Australia, begitu juga dengan New Zealand dan Canada jumlah maha siswa asingnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Sebagian dari mereka berasal dari Asia. Tentu saja telah terjadi ketimpangan antara jumlah mahasiswa asing yang datang dan mahasiswa negeri-negeri Asia yang dikirim ke beberapa negara tersebut di atas, terlebih lagi dengan Indonesia.

Krisis ekonomi, tidaklah menjadi faktor utama menurunnya pengiriman pelajar-mahasiswa ke luar negeri, terbukti dengan semakin gencarnya lembaga-lembaga pendidikan mancanegara di dalam mempromosikan institusinya di Indonesia. Jika tahun-tahun sebelum krisis, Amerika menjadi tujuan utama, kini beralih ke Australia, walau sebenarnya biayanya 10 kali lebih tinggi dari biaya pendidikan nasional, belum termasuk biaya hidup.

Mengapa minat belajar ke luar negeri begitu besar, dan dari waktu ke waktu selalu meningkat jumlahnya? Banyak hal yang membuat warga mampu memilih hal ini. Salah satu dan yang utama tentu karena mereka tidak yakin terhadap mutu dan pengakuan internasional lembaga pendidikan tinggi/menengah Indonesia. Sebab yang lain, adalah dengan menyekolahkan putera-puteri mereka ke luar negeri, dipastikan investasi mereka yang cukup besar akan segera kembali.

Kondisi tersebut di atas, sangat menarik bagi lembaga pendidikan internasional. Oleh sebab itu mereka lakukan upaya intensif untuk mempromosikan lembaganya di negeri ini. Namun demikian besarnya jumlah penduduk tidak menarik mereka untuk datang dan menawarkan kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten, sebagaimana yang mereka lakukan di Malaysia dan kini China.

Curtin University, misalnya, lebih tertarik untuk mendirikan *off shore campus*-nya di kota Miri, Sarawak, sebuah kota yang hanya berpenduduk 125,000 orang, dari pada harus mendirikannya di Jakarta. Begitu juga dengan Monash, George Washington University, London Metropolitant University dan berpuluh yang lain dari berbagai negara. Mengapa? Karena di negeri yang relatif kecil itu, keberadaan mereka mendapatkan jaminan kepastian dari pemerintah, sebab jumlah populasi Malaysia bukanlah ukuran pertama. Karena dalam perkembangannya justru pelajar/mahasiswa yang datang adalah dari mancanegara, yang tentu saja mempunyai keterbatasan yang sama dalam hal bahasa.

Pemerintah Malaysia sejak awal telah memiliki cita-cita untuk menjadikan negerinya sebagai pusat pembelajaran internasional, dan untuk itu konsekuensinya adalah memberikan pengakuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan asing yang beroperasi di negaranya. Sehingga keberadaan lembaga-lembaga pendidikan internasional tersebut di atas, memacu kemajuan lembaga pendidikan lokal, dan pada akhirnya tidak lagi bisa dibedakan dalam hal apapun, antara lembaga pendidikan transnasional dan lembaga pendidikan nasional.

Dalam satu kesempatan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, menyuarakan keterbukaan pasca Undang Undang Pendidikan Nasional. Disebutkannya bahwa lembaga-lembaga pendidikan tinggi Indonesia mempunyai kebebasan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan internasional, mengubah bahkan mengadopsi kurikulum dan juga mencari akreditasi dari lembaga-lembaga akreditasi internasional. Sesuatu yang amat baik bagi perkembangan dunia pendidikan, dan disampaikan sebagai implementasi dari Undang-undang Pendidikan Nasional.

Pertanyaannya adalah, apakah iklim baru tersebut di atas, menarik minat institusi mancanegara? Sampai saat ini baru beberapa institusi internasional yang melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi nasional, dan tentu saja dengan status yang kurang jelas dalam kaitan dengan pengakuan. Apakah kualifikasi yang dikeluarkan oleh institusi internasional tersebut mendapatkan pengakuan yang sama dengan

G AL-ZAYTUN PASAR DUNIA

pengakuan terhadap institusi *partnership*-nya? Jika tidak, maka sudah barang tentu kerja sama tersebut tidak menarik minat pelajar/mahasiswa.

Seperti disebutkan di atas, bahwa untuk bisa mengikuti pembelajaran, calon mahasiswa harus menguasai bahasa Inggris dengan baik, dan sesuai dengan *standard test* yang diakui secara internasional. Keberadaan universitas internasional tersebut akan mempersyaratkan hal yang sama bagi calon mahasiswanya, dan kenyataan yang ada, hampir 95% lulusan sekolah menengah kemampuan berbahasa Inggris mereka di bawah standar. Akibatnya, keberadaan institusi internasional tersebut akan kurang menarik minat mahasiswa nasional.

Masalah lain yang patut menjadi pertimbangan adalah biaya kuliah - *tuition fees* - dan biaya-biaya tambahan lainnya. Tentu saja akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikenakan oleh universitas lokal. Mengapa? Karena universitas partner harus menanggung biaya yang telah ditetapkan per-program yang sekalipun telah diukur dengan kekuatan daya beli bangsa Indonesia, tetapi masih sangat mahal.

Krisis ekonomi, tidaklah menjadi faktor utama menurunnya pengiriman pelajar-mahasiswa ke luar negeri, terbukti dengan semakin gencarnya lembaga-lembaga pendidikan mancanegara di dalam mempromosikan institusinya di Indonesia.

Jika ketiga faktor tersebut di atas terpenuhi, ada pertimbangan terakhir, yakni ketidaksamaan mutu antara universitas yang ada di negaranya dengan *franchise university* yang ada di negeri ini. Di Amerika misalnya, terdapat berbagai rupa fasilitas penunjang, dan juga *resource* tenaga pendidik. Di negeri ini sangatlah sulit untuk mencari *resource* pendidik/pengajar dengan kualifikasi yang sama. Jikapun terdapat maka mereka hanya akan menjadi tenaga *part-timer*, dan tentu saja dengan keterbatasan fasilitas, mahasiswa tidak akan mendapatkan pelayanan yang sama.

Perbedaan persepsi pelaku didik dan pembuat kebijakan politik masih sangat terasa, misalnya, dalam kaitan dengan kebijakan otonomi daerah dan kaitannya dengan pendidikan. Pertimbangan-pertimbangan yang terkadang begitu rumit dalam pemberian perijinan pembukaan lembaga pendidikan tinggi baru ataupun program program baru di universitas dan atau perguruan tinggi lainnya, masih harus dihadapi oleh pelaku didik di negeri ini. Begitu juga dengan masih adanya dualisme antara departemen pendidikan dan departemen agama serta departemen lainnya dalam kaitan dengan otoritas pengawasan dan pengelolaan lembaga pendidikan, adalah juga termasuk dalam deretan persoalan Indonesia di dalam menempatkan dirinya di era globalisasi ini.

Namun dari berbagai persolan yang dihadapi bangsa Indonesia, Al-Zaytun terus menerobos masuk ke percaturan pendidikan internasional. Hal ini telah, sedang dan terus diusahakan dalam bentuk usaha bersama mendirikan *Al-Zaytun American University*. Hal lain yang terus dirintis diakuinya Al-Zaytun sebagai satu-satunya pemegang hak sertifikasi kemampuan olah komputer oleh ICDL-AP di Indonesia.

Selain itu, Program Pendidikan Pertanian Terpadu, yang sekarang telah menjadi Fakultas Pertanian Terpadu Universitas Al-Zaytun pun telah mendapatkan pengakuan bukan hanya dari dalam negeri namun juga pengakuan dari luar negeri. Melihat keberhasilan yang telah dicapai selama tujuh tahun setelah dimulainya pendidikan di Kampus Al-Zaytun, kita harus yakin bahwa kita berkemampuan menempatkan diri sebagai lembaga pendidikan yang dapat mengangkat bangsa Indonesi dari keterpurukan dan terus melaju bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan internasional. Tidak mustahil di masa depan, akan lebih banyak lagi pelajar asing yang datang belajar ke Indonesia khususnya ke Al-Zaytun.

Masa Depan: Beberapa Jalan Menuju Era Globalisasi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat tiga jalan yang amat *reasonable* dan dapat memberikan beberapa harapan untuk memosisikan diri di era globalisasi ini.

Jalan pertama yang harus dilakukan adalah jelas, yakni kesediaan untuk melakukan reformasi total dalam hal kebijakan pendidikan, yang berkaitan dengan kurikulum, anggaran pendidikan, akreditasi dan rekognisi, termasuk di dalamnya memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada lembaga pendidikan swasta, baik umum maupun pesantren, untuk melaksanakan program penelitiannya, baik sendiri maupun bekerja sama dengan peneliti-peneliti mancanegara.

Reformasi total tersebut di atas, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang mampu untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi, di manapun di negeri ini, dan pemerintah dalam hal ini hanyalah bertindak sebagai fasilitator. Departemen Pendidikan hanya berwenang untuk mendaftar semua lembaga pendidikan tinggi, sedangkan untuk hal hal yang berkaitan dengan mutu pendidikan penilaiannya dilakukan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini mendapatkan pengakuan dari Departemen Pendidikan.

Lembaga akreditasi berupa Badan Akreditasi Nasional yang sudah ada dengan sedikit modifikasi legalitas, dan juga lembaga-lembaga akreditasi internasional, dalam hal ini Departemen Pendidikan akan bertindak sebagai advisor, sehingga lembaga-

Namun dari berbagai persolan yang dihadapi bangsa Indonesia, Al-Zaytun terus menerobos masuk ke percaturan pendidikan internasional. Hal ini telah, sedang dan terus diusahakan dalam bentuk usaha bersama mendirikan *Al-Zaytun American University*.

lembaga pendidikan tinggi Indonesia mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi yang tepat. Konsekuensinya adalah lembaga akreditasi yang diakui oleh sebuah pemerintahan negara-negara berdaulat di dunia, harus pula diakui oleh Indonesia, tentu saja dengan prosesi rasional yang menempatkan kualitas di atas segalanya, sehingga mahasiswa kita tidak dirugikan di kemudian hari.

International setting curriculum, menjadi suatu kemutlakan, jika sebuah lembaga pendidikan tinggi nasional berkeinginan untuk mendapatkan akreditasi dari lembaga akreditasi internasional, dan dengan demikian perubahan-perubahan harus diakukan dan difasilitasi oleh Departemen Pendidikan. Di Amerika, misalnya, terdapat ratusan lembaga akreditasi yang diakui oleh Departemen Pendidikan Amerika *(US Department of Education*), masing-masing dengan kriteria dan aturannya. Bagi lembaga pendidikan tinggi Indonesia yang bermaksud untuk mendapatkan akreditasi maka ia harus memenuhi persyaratan, yang fokusnya adalah pada dinamisasi dan akseptabiliti kurikulum, serta ketersediaan sumber daya *lectures* yang *qualified*. Serta merta setelah mendapatkan akreditasi, maka status lembaga pendidikan tinggi tersebut menjadi perguruan tinggi internasional.

Konsekuensinya adalah bahwa mungkin saja harus diterima, jika sebuah perguruan tinggi Indonesia harus memilih mendapatkan akreditasi dari Amerika, Belanda, Inggris - jika mungkin dengan atau tanpa harus memperoleh akreditasi dari badan akreditasi nasional yang ada.

Langkah kedua yang harus dilakukan adalah pemerintah harus memberikan peluang kepada universitas-universitas internasional untuk membuka *offshore campus*-nya di negeri ini, bukan saja di Jakarta tetapi juga di daerah-daerah yang dianggap mempunyai cukup potensi, tetapi dengan dua kebijakan utama dalam kaitan dengan *cost of education*, yakni *cost* untuk mahasiswa nasional dan *cost* untuk mahasiswa internasional, sesuatu yang juga diterapkan oleh negara-negara maju di dunia, kecuali Jerman.

Offshore university tersebut di atas, diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan internnya sendiri tanpa campur tangan regulasi yang tidak jelas. Temasuk di dalamnya merekrut mahasiswa asing, dan memberikan pembelajaran dengan *bilingual* (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), serta memberikan pembelajaran khusus dengan menggunakan bahasa Inggris, atau bahasa asing yang dipilih, sesuai dengan negara asal universitas atau perguruan tinggi tersebut.

Dua *counter* tersebut di atas, tentu saja pernah dilakukan oleh negara lain, misalnya Thailand, yang sebelumnya di bawah peringkat Indonesia dalam kaitan dengan penguasaan bahasa Inggris. Dengan pola ini, Thailand sudah hampir menyamai kedudukan Malaysia dalam kaitan dengan *international education*.

Pertukaran *knowledge* dan juga pertukaran pelaku pendidikan, mahasiswa-pelajar, *lecture*, dan atau tenaga manajemen lainnya, harus menjadi salah satu target utama politik atau kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia. Dengan kejelasan kebijakan, diharapkan Indonesia mampu ikut serta berkiprah dalam pasar global di bidang pendidikan, dan dengan demikian Indonesia akan menjadi bagian dari masyarakat pendidikan international, yang mempunyai dampak positif yakni pengakuan yang bersifat *reciprocal* (dua arah), yakni Indonesia harus sanggup mengakui kualifiksi internasional, sebaliknya kualifikasi Indonesia pun mendapatkan pengakuan yang sama.

Target di atas, bukan saja terkait hubungan antara lembaga pendidikan tinggi nasional dengan lembaga pendidikan tinggi internasional, tetapi juga antara lembaga pendidikan nasional dengan dunia industri internasional atau *Multinational Corporation*, baik yang sudah ada di negeri ini maupun yang ada di negeri-negeri lain, yang kesemuanya itu bisa dilakukan dengan sempurna jika terdapat kebijakan yang jelas.

Kebijakan tersebut di atas, akan membawa banyak manfaat bagi lembaga pendidikan tinggi nasional, misalnya, dalam hal yang berkaitan dengan perubahan kurikulum agar seirama dengan *demand*, bantuan peralatan pendidikan, *staff training* dan pemberian bea siswa bagi mahasiswa/pelajar yang mampu.

Perusahaan global seperti General Electric, Lucent Technologie, dan berbagai yayasan internasional termasuk di dalamnya Bill Gates Foundation telah menunjukkan perhatiannya pada dunia pendidikan internasional. Mereka banyak memberikan bantuan beasiswa dan juga banyak mendirikan proyek-proyek *home industry* di negara-negara berkembang, seperti di India, Bangladesh dan negara-negara Amerika Latin lainya, untuk dua maksud utama yakni investasi dan *philanthropi* (kedermawanan).

Dua contoh terdekat, yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand, pemerintah setempat begitu intensif memberikan dorongan agar lembaga-lembaga pendidikannya melakukan kerja sama dengan rekan-rekan luar negerinya. Sehingga kedua negara tersebut mempunyai sederet lembaga pendidikan tinggi internasional, yang justru mayoritas mahasiswanya datang dari luar negeri termasuk Indonesia, yang sebagian besar dari jumlah yang disebut di atas belajar di Universitas Internasional di Malaysia.

Thailand dalam hal ini telah memberikan contoh positif yang bisa dipertimbangkan, yakni projek JUNO *(Join Universities Network Online)* yang memudahkan Thailand untuk melakukan *explore* berbagai *opportunity* yang potensial, seperti pertukaran mahasiswa dan staf, mengembangkan join pembelajaran, dan melakukan berbagai riset bekerja sama dengan *counterpart* Amerika. Program yang sama tentu saja dengan mudah bisa dilakukan oleh Indonesia, dengan nama *Indonesia-US Educational Collaboration*, atau *Indo-UK Educational Collaboration* dan bisa juga dengan negara-negara lain, yang tentu saja kedua pemerintahan hanya bertindak sebagai fasilitator, masing-masing lembaga mempunyai peran aktif sebagai pelaku utama. Pemerintah harus menaruh perhatian terbuka kepada setiap lembaga pendidikan tinggi, dan berusaha untuk bertindak selaku fasilitator yang objektif.

Lembaga akreditasi berupa Badan Akreditasi Nasional yang sudah ada dengan sedikit modifikasi legalitas, dan juga lembaga-lembaga akreditasi internasional.

Banyak institusi internasional yang mengkhususkan diri untuk membantu segala upaya pendidikan internasional, Fullbright, DAAD (Jerman), British Council dan masih banyak lagi di seluruh dunia, yang bisa dijadikan jembatan untuk itu. Misalnya saja pemerintah memberikan kejelasan bahwa mereka yang mendapatkan beasiswa dari institusi-institusi tersebut harus mengabdikan dirinya kepada universitas atau lembaga pendidikan tinggi nasional selama jangka waktu tertentu, pengabdian tentu saja sudah bisa mereka lakukan saat mereka berada di luar negeri, dan begitulah yang dilakukan oleh India.

Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah: Peningkatan inovasi dan kepemimpinan, dua hal yang amat dibutuhkan di dunia pendidikan Indonesia. Inovasi bisa dilakukan dengan banyak cara, misalnya penggunaan *intensive internet technology* untuk mengembangkan *joint-online courses* antara lembaga pendidikan tinggi Indonesia dengan lembaga pendidikan internasional. Beberapa negara telah melakukan hal yang sama dan mendapatkan manfaat yang besar. Mislnya saja apa yang dilakukan oleh Malaysia dengan University of London, dan beberapa negara dengan University of South Africa (UN-ISA). Termasuk yang tengah dipersiapkan Al-Zaytun dengan beberapa universitas internasional.

Contoh yang terdekat adalah apa yang diusahakan oleh Mindanao State University dengan Wisdom International Foundation, yang telah melakukan kolaborasi untuk penyelenggaraan program internasional, dengan pengkhususan bagi mereka yang bekerja di negara-negara teluk dan Timur Tengah pada umumnya.

Upaya-upaya inovatif dalam bidang pendidikan tersebut, tidaklah akan berhasil tanpa adanya kepemimpinan yang tangguh. Malaysia tidaklah akan disebut dan diakui sebagai *Center of Excellent* jika tidak ada Mahathir Muhammad, yang telah berupaya keras di dalam mencapai tujuan. Indonesia banyak memiliki pemimpin berkaliber, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang bisa disebut sebagai inovator pendidikan.

Lebih khusus lagi, di mana pun di dunia ini kita tidak akan menjumpai derap langkah *excellence* dan *innovative* di lembaga pendidikan, yang terlepas dari mutu kepemimpinan para pimpinannya. Untuk meningkatkan wawasan dan untuk mendapatkan celah kemungkinan di tengah pasar dunia di bidang pendidikan, dibutuhkan pemimpin-pemimpin inovatif yang tangguh, baik itu para rektor universitas, politisi, administrator, dan penentu kebijakan lain, baik di pusat maupun di daerah.

Para provokator *global education* selalu

saja menghembuskan rasa takut bahwa lembaga pendidikan tinggi Barat selalu mendominasi setiap upaya pendidikan di manapun di dunia ini, seperti halnya dengan dominasi Mc Donalds atas industri makanan dunia. Akan tetapi, dengan wawasan yang luas, jangkauan jauh ke depan, kecakapan dan kebulatan tekad untuk melakukan berbagai langkah inovatif tersebut dalam uraian ini, para pimpinan lembaga pendidikan tinggi akan memandang globalisasi sebagai peluang yang amat bermanfaat bagi perkembangan dan *international setting* bagi dunia pendidikan pada umumnya di Indonesia. Pendidikan di abad ke-21 ini benar-benar diyakini sebagai lautan pengetahuan dan ide tanpa batas, yang akan menghasilkan manfaat ganda *(reciprocal)* bagi seluruh umat manusia di dunia.

Untuk mencapainya dibutuhkan upaya serius yang berkesinambungan, karena tidak satu cara sederhana untuk menggapai masa depan. Banyak cara dibutuhkan untuk menjadikan dunia ini sebagai satu sarang bagi umat manusia (*wallahu a'lam*).

*Pernah disampaikan pada International Education Conference, "A World Opportunity: Education in the Twenty-First Century" September 27th-28th, 2003 M.

Pertukaran *knowledge* dan juga pertukaran pelaku pendidikan, mahasiswa-pelajar, *lecture*, dan atau tenaga manajemen lainnya, harus menjadi salah satu target utama politik atau kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia.

REFERENSI:

1. Tilaar H.A.R., Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21, Penerbit Tera Indonesia (Jakarta 1999).
2. Philip G Altbach and Patti McGill Peterson, (eds) *Higher Education in the 21st Century: Global Challenge and National Response Institute of International Education Boston College Center for International Higher Education* (New York, 1999).
3. Suma Chitnis and Philip G Altbach, (eds) *Higher Education Reform in India: Experiences and Perspectives, Sage Publications* (New Delhi, 1993).
4. Todd M. Davis, Open Doors/2000: *Report on International Educational Exchange, Institute of International Education* (New York, 2000).
5. Mushirul Hasan (ed), *Knowledge, Power and Politics: Educational Institutions in India*, Roli Books (New Delhi, 1998).
6. Fred M Hayward, *Internationalization of U.S. Higher Education: Preliminary Status Report, American Council on Education* (Washington, DC, 2000).
7. The Asian Student of 2000: *Choice Factors and Influences of Asian Undergraduate Students Studying Overseas*, EduWorld (Melboume/Sydney, 2000).

MUSIM GUGUR KEPEMIMPIAN NASIONAL

Kasmir Tri Putra, MM.*

Indonesia tengah mengalami musim gugur kepemimpinan nasional. Indikasinya, pendapat para pemimpin bangsa tidak lagi didengar oleh rakyat. Rakyat sudah cenderung apatis. Mungkin realitas itu bisa dimaklumi. Betapa tidak, kendati pun kemerdekaan bangsa Indonesia hampir memasuki usia ke-61, namun kondisi yang dialami mayoritas rakyat negeri dirasakan "belum merdeka" akibat keterpurukan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan kemandirian.

Penyebabnya, tak lain dan tak bukan, merajalelanya praktek KKN dan ketidakjujuran yang dipertontonkan para pemimpin bangsa. Mulai dari kepemimpinan nasional, daerah hingga aparatur birokrasi kita tidak mengedepankan kejujuran sebagai teladan. Justru kepemimpinan yang terlepas dari kepentingan rakyatnya.

Pemimpin yang baik mestinya bisa menjadi jembatan aspirasi untuk memenuhi kepentingan rakyatnya melalui sarana kekuasaan yang dimilikinya, bukan justru sebaliknya menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menindas rakyatnya sendiri.

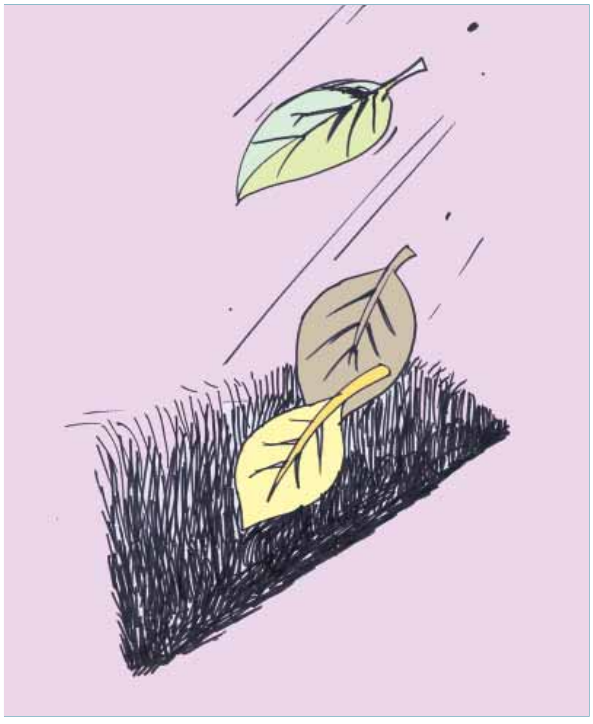

Mengapa sebagian besar masyarakat pedesaan seperti buruh, tani, nelayan, masyarakat adat pada umumnya, termasuk kaum miskin kota dan kelompok marjinal lain menjadi miskin? Mengapa kualitas hidup mereka tidak beranjak dari masa ke masa?

Jawaban pokok pertanyaan di atas adalah karena kelompok-kelompok marjinal tidak memiliki akses yang berarti kepada pusat-pusat kekuasaan yang menyusun dan memutuskan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat akar rumput (komunitas), lokal, maupun nasional.

Ketika doktrin sosial manusia sebagai satu bangsa, maka sudah secara otomatis terdapat saling ketergantungan sebagai satu bangsa dan saling membutuhkan. Orang kaya membutuhkan orang miskin dan orang kuat membutuhkan orang lemah.

Idealita demikian agaknya belum jamak di Indonesia apabila dilihat secara struktural. Kemiskinan struktural masih sangat kental mewarnai hubungan sosial.

Di satu sisi, kehidupan kelompok-kelompok marjinal ini sangat tergantung pada kelompok-kelompok (kepentingan) yang berada di luar diri mereka.

Akan tetapi, di lain sisi, kelompok-kelompok yang disebut terakhir memiliki kepentingannya masing-masing yang bersifat partisan, yang umumnya berbeda dan tidak sejalan dengan kepentingan kelompok-kelompok marjinal.

Sebagian besar kelompok rakyat ini mulai tersingkir dari institusi utama masyarakat. Dari sisi ekonomi, kondisi itu akibat kesehatan yang kurang terjamin, pendidikan yang rendah, dan ketiadaan keterampilan sehingga pada gilirannya berdampak pada penghasilan dan daya beli mereka.

Sementara itu, dari sisi budaya dan tata nilai, kondisi itu berkaitan dengan rendahnya kualitas hidup yang seringkali mengondisikan mereka terjebak dalam etos kerja yang rendah, berpikir pendek, dan bersikap fatalis (masa bodoh) terhadap lingkungan.

Fenomena tersebut pada akhirnya menyebabkan kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, identitas kultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang tidak terpenuhi. Meminjam istilah Moeslim Abdurrahman, kelompok-kelompok marjinal inilah yang sejatinya dalam keadaan "yatim" secara sosial dan politik.

Kesengsaraan yang dialami rakyat Indonesia dewasa ini sangat terasa. Bukan saja kelas bawah, masyarakat yang berada di kelas menengah pun turut merasakan impitan ekonomi. Bedanya, kalau kelas menengah masih bisa berhemat, maka bagi masyarakat bawah sudah tidak ada lagi yang bisa dihemat.

Saat ini, dibutuhkan kearifan semua pihak untuk mencari solusi bersama. Mungkin, sudah tidak diperlukan lagi perdebatan di tingkat wacana pemberdayaan, tetapi dibutuhkan aksi konkret.

Kini saat paling tepat mendorong pemberdayaan masyarakat meskipun pekerjaan ini bukan hal yang mudah. Namun jika tidak dimulai dari sekarang, hasilnya tidak akan terlihat sampai kapan pun.

Para pemimpin bangsa dan segenap komponen masyarakat terdidik dan bagian dari kekuatan kelompok sipil (*civil society*) juga harus bersama-sama mendorong berlangsungnya Revolusi Moral Bangsa dengan mengikis mental koruptif, mengangkat keterpurukan bangsa, mengedepankan kejujuran dan nurani, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Bilakah musim gugur kepemimpinan nasional berganti ke musim semi? *__Kasmir Tri Putra__ adalah Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari Provinsi Lampung.■

PROF. DR. AMIEN RAIS

Pemain Politik Nurani

Amien Rais masih getol menyikapi berbagai persoalan bangsa. Amien, pemain politik yang tetap diperhitungkan.

Panggung politik praktis bukan lagi arena bermain Amien Rais. Namun doktor ilmu politik keluaran Michigan University, Amerika, ini masih merupakan sosok pembuat berita. Amien sudah "kembali ke kandangnya" di Universitas Gajah Mada. Di luar itu, Amien yang pernah memimpin MPR dan PAN, yang sesekali mengeluarkan pernyataan yang menggigit, masih memasuki domain politik.

"Saya memang bermain politik, tetapi bukan politik kekuasaan. Saya bermain politik nurani," kata Amien menanggapi pernyataan petinggi negara yang menuding dirinya melakukan provokasi dalam kasus Freeport Papua.

Sosok kampiun reformasi ini memang mungil, namun pandangan dan sepak terjang politiknya selalu diperhitungkan oleh saingan-saingannya, termasuk pemerintah yang berkuasa. Dia seorang *play maker* yang piawai. Setiap gerak-geriknya selalu menebarkan aroma politik.

Jauh sebelum menggerakkan lokomotif reformasi tahun 1998, Amien masuk daftar pakar yang selalu diamati, bahkan diwaspdai, sehingga ruang gerak dibatasi sesempit mungkin. Pernah Amien mengeritik pemerintahan Orde Baru. Dia serta merta disingkirkan dari anggota Dewan Pakar ICMI yang pro pemerintah. Sebab, pemerintah saat itu sangat alergi terhadap pandangan yang bersebrangan.

Bukan watak Amien kalau hanya memberi pandangan yang mengelus atau memuji pemerintah. Pandangannya tajam setajam pisau silet. Setiap pernyataan politik Amien mengandung daya pengaruh yang selalu bergaung.

Jika hasil pemilihan presiden tahun 2004 jadi ukuran, di belakang Amien berbaris tak kurang 15 juta pendukung, suatu jumlah massa yang punya kekuatan luar biasa. Sayangnya, dia tidak lolos menjadi orang nomor satu di republik ini. Amien kandas di putaran pertama bersama dua Capres lainnya; Wiranto dan Hamzah Haz.

Pria kelahiran Solo yang sudah berusia senja ini, barangkali masih menyimpan keinginan untuk tampil kembali pada pemilihan presiden tahun 2009. Dua tahun lebih dari sekarang bukan waktu yang panjang. Tetapi cukup longgar untuk menyiapkan ancang-ancang yang lebih matang dan strategis. Ada isyarat, dia sedang menyiapkan langkah yang lebih terarah dan terukur.

Namun yang lebih penting bagi Amien; tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Atau dia harus belajar dari kegagalan yang lalu; bermain di panggung yang salah, meskipun media massa memberi perhatian lebih pada setiap gerak-geriknya.

Jedah sesaat setelah turun dari panggung MPR dan PAN, Amien belakangan ini bersuara keras tentang berbagai persoalan bangsa.

Kasus visa Australia: Amien menilai, bilamana hubungan Indonesia dan Australia diputus sama sekali akan memberi kesempatan Australia

untuk lebih mengembangkan langkah-langkah destruktif terhadap Indonesia. Kata Amien, jika menuruti emosi, memang kelihatan gagah memutus hubungan. Tetapi setelah diputus, ruginya akan lebih banyak, karena Indonesia masih membutuhkan saluran resmi dengan Australia.

Jika terbukti Australia ikut menggerakkan kerusuhan di Papua, kata Amien Indonesia masih membutuhkan saluran untuk memprosesnya. Amien menilai PM John Howard mengeluarkan pernyataan mendukung NKRI, namun kondisi yang sebenarnya telah tampak dari beberapa pernyataan lain yang mengartikan dukungan lepasnya Papua dari NKRI.

"Ada dua senator yang menyebut masuknya Papua ke dalam RI ilegal," kata Amien. Indonesia perlu memperlihatkan ketegasan, bukan dengan sikap reaktif, tetapi melalui diplomasi yang matang.

Salah satu sikap keras yang dimaksud Amien, setelah memanggil pulang Dubesnya di Australia, misalnya, mengirimkan nota kenegaraan yang langsung dibuat oleh presiden atas nama bangsa Indonesia. Tetapi yang paling penting memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki langkah strategis untuk menghadapi Australia.

Kasus Freeport Indonesia; Amien—meski sepak terjangnya pernah diamati aparat intelijen—tidak pernah berhenti mengeritik ketidakadilan dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh industri tambang raksasa asal AS ini. Meskipun dituding sebagai tokoh yang kerap menciptakan provokasi bagi kondisi Papua yang pernah memanas, Amien dapat memaafkan kepala BIN Syamsir Siregar.

Amien menolak tudingan sebagai provokator. Nadanya cukup keras menanggapi tudingan BIN yang dipandangnya; spekulatif dan imajiner, karena tidak didukung fakta dan data. Kepala BIN Syamsir Siregar mengaku sedang mengamati para elit politik dan LSM yang diduga berada di balik kasus Abepura.

Ketika ditanya siapakah elit politik tersebut? Syamsir menukas: "sudah tahu kok tanya." Meski terkena tudingan tersebut, Amien mengaku telah memaafkan Syamsir. "Semua orang bisa keliru. Saya tidak akan menggugat. Cuma lain kali lebih hati-hati," kata Amien.

Amien memang menerima rombongan 20 orang Papua, jauh hari sebelum meletusnya tragedi berdarah di Abepura yang menewaskan tiga polisi dan seorang prajurit TNI-AU. Kepada mereka, dia mengatakan Freeport hendaknya membagi hasil kekayaan Papua secara adil. Karena itu, Freeport ditutup sementara sampai dicapainya kesepakatan tentang pembagian yang lebih adil. Menurut Amien kontrak karya Freeport sangat merugikan masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. "Kita bukan budak dan Amerika bukan majikan," kata Amien.

Kaus Blok Cepu; Amien bergabung dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Wapres Try Sutrisno dan mantan Menhankam/Pangab Wiranto, yang memelopori penolakan pengelolaan ladang minyak lepas pantai, Blok Cepu, oleh Exxon Mobil Oil, sebuah perusahaan minyak raksasa AS. Sembilan tokoh mengirim surat ke Presden Susilo Bambang Yudhoyono, meminta waktu bertemu. "Pak SBY kan suka angka sembilan," kelakar Amien.

Dalam masalah Blok Cepu, kata Amien, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan; untung ala kadarnya atau untung setinggi-tingginya. "Kita mau jadi bangsa majikan atau pelayan," kata Amien. Keputusan pemerintah tersebut, menurut Amien, merupakan pilihan yang berujung pada bangsa pelayan. "Ketika jabatan General Manager itu diberikan kepada mereka, kita telah memilih jadi pelayan."

Gerakan ini juga berjuang untuk memenangkan hak angket DPR mengenai Blok Cepu, meskipun Amien menyadari itu hal yang tidak mudah. Tetapi dia berharap agar para anggota DPR yang mendukung berjuang maksimal. Dalam hal Exxon, Amien berselisih jalan dengan Sutrisno Bachir yang didudukkannya di pucuk pimpinan PAN. Sutrisno memilih mendukung kebijakan pemerintah, dan terus merapat ke SBY, perlahan-lahan meninggalkan mentornya, Amien. Tetapi Amien tidak merasa kecewa.

Amien malah melihat secara keseluruhan DPR telah menjadi: "stempel pemerintah." Tudingan Amien ini terkait dengan keputusan DPR yang penandatanganan kontrak kerja antara pemerintah dan ExxonMobil untuk pengelolaan Blok Cepu. "Usul hak angket Blok Cepu melemah setelah pemerintah melobi. Semakin terbukti bahwa DPR memang stempel pemerintah," kata Amien. Dia kecewa pada fraksi-fraksi DPR yang mencabut dukungan mereka usulan hak angket.

"Usulan ini jalannya memang terjal. Tidak sampai tidak apa-apa," kata Amien dengan nada puitis. Namun dia bangga karena di antara anak bangsa ada yang mencuatkan persoalan tersebut ke permukaan.

Amien, selaku politisi senior, memberi saran kepada para pendatang baru di Senayan; "katakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah." ■ SH

B • I • O • D • A • T • A

Nama:
Prof. Dr. H. Muhammad Amien Rais, MA

Lahir:
Surakarta, 26 April 1944

Orang tua:
Syuhud Rais dan Sudalmiyah

Istri:
Kusnariyati Sri Rahayu

Pendidikan:
- Fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada (lulus 1968)
- Notre Dame Catholic University, Indiana, USA (1974)
- Al-Azhar University, Cairo, Mesir (1981)
- Chicago University, Chicago, USA (gelar Ph.D dalam ilmu politik 1984)
- George Washington University (postdoctoral degree, 1988-1989)

Perjalanan karir:
- Dosen pada FISIP UGM (1969-1999)
- Pengurus Muhammadiyah (1985)
- Asisten Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (1991-1995)
- Wakil Ketua Muhammadiyah (1991)
- Direktur Pusat Kajian Politik (1988)
- Peneliti Senior di BPPT (1991)
- Anggota Grup V Dewan Riset Nasional (1995-2000)
- Ketua Muhammadiyah (1995-2000)
- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (1999-sekarang)
- Ketua MPR (1999-2004)

Alamat Rumah:
Jl. Pandean Sari II No.5 Rt.003/55 Condong Catur, Depok-Sleman, Yogyakarta

Novum dari Sukamiskin

Delapan bukti baru diajukan Probosutedjo ke pengadilan. Kuasa hukumnya berpendapat kasus tersebut merupakan kasus perdata.

Kehidupan pengusaha Probosutedjo di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dijalaninya dengan tenang. Ia tampak sehat dan bersemangat saat ditemui sejumlah wartawan, akhir Maret lalu. Percakapan dengannya terekam dalam laporan *Me dia Indonesia*, 2 April 2006, dengan judul *"Tetap Berbisnis di LP Sukamiskin."*

Di sisi lain, persidangan permohonan peninjauan kembali kasusnya terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dilaporkan *Koran Tempo*, 21 Maret 2006, kuasa hukum Probosutedjo, O.C. Kaligis, berpendapat ada bukti-bukti baru yang belum diketahui saat putusan persidangan sebelumnya.

"Jika bukti-bukti baru itu diketahui pada saat sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Probosutedjo," kata Kaligis di gedung pengadilan. Selain mengajukan bukti baru, kuasa hukum Probosutedjo juga menyatakan putusan kasasi MA memperlihatkan suatu kekhilafan hakim.

Menurut Kaligis, dalam amar putusan *judex juris* Probosutedjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. "Tidak jelas definisi bersama-sama tersebut bersama siapa saja? Sebab, dalam kasus ini hanya Probosutedjo yang diseret ke pengadilan," ujarnya.

Selanjutnya, kuasa hukum Probosutedjo juga berpendapat bahwa kasus ini merupakan kasus perdata, terkait dengan utang piutang antara PT Menara Hutan Buana dan Bank Exim (Bank Mandiri) yang baru akan jatuh tempo pada Juli 2006.

Majelis hakim yang diketuai Hakim Andriani Nurdin sempat menawarkan sidang lanjutan pemeriksaan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, tempat Probosutedjo menjalani hukuman. Namun usul tersebut ditolak kuasa hukum Probo.

ANTARA News melaporkan bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum Probo di antaranya adalah putusan MA No 181 K/TUN/2004 tertanggal 9 Juni 2005 antara Menteri Kehutanan melawan PT Menara Hutan Buana yang memenangkan PT Menara dan membatalkan SK Menhut yang mencabut ijin pengelolaan hutan kepada PT Menara.

Selain itu, kuasa hukum Probo juga mengajukan bukti penyetoran uang pengganti kepada negara Rp 100,9 miliar tertanggal 5 Januari 2006 dan berita acara penyerahan denda dan biaya perkara tertanggal 5 Januari 2006.

BUKTI BARU ITU

1. Bukti aplikasi pengiriman uang dalam/luar negeri untuk uang pengganti negara.
2. Berita acara penyetoran uang pengganti pada negara sebesar Rp 100 miliar pada 5 Januari 2006.
3. Tanda terima pembayaran sebesar Rp 30 juta yang dikeluarkan Kepala Seksi Pidana Khusus Petugas Urusan Denda Kejaksaaan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Januari 2006.
4. Berita acara pembayaran denda dan biaya perkara pada 5 Januari 2006.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/TUN/2004, Menteri Kehutanan RI melawan PT Menara Hutan Buana pada 9 Juli 2005.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Jakarta Nomor 36/B/2004/PT.TUN, PT Menara Hutan Buana melawan Menteri Kehutanan RI pada 15 Maret 2004.
7. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Jakarta Nomor 203/G/2002/PT.TUN.JKT, PT Menara Hutan Buana melawan Menteri Kesehatan RI pada 10 Juni 2003.
8. Surat Djamaludin Suryohadikusumo kepada Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban tanggal 26 Desember 2005.

PROBOSUTEDJO: Ada delapan bukti baru.

Membina Napi Lain

Satu sisi kehidupan Probosutedjo di dalam LP Sukamiskin ditulis *Media Indonesia*. Probo mengaku lebih nyaman dengan hawa kota Bandung. Suasana LP Sukamiskin dinilainya sangat bersahabat. Menurutnya, di LP Cipinang ia kerap dimintai uang oleh sesama napi.

Di Sukamiskin, pengusaha 76 tahun ini ditugasi membina sekitar 20 napi dengan kegiatan menjahit pakaian menggunakan tiga mesin obras dan 10 mesin jahit. Ia bahkan siap mengucurkan dana untuk membeli 25 mesin jahit dan mesin obras baru sehingga bisa merekrut lebih banyak napi dalam kegiatan itu.

Sebagai pengusaha, ia rupanya melihat peluang dalam bisnis konveksi di dalam LP tersebut. Saat ini, konveksi binaannya mampu menghasilkan pakaian seragam para napi. Bukan mustahil mampu dikembangkan untuk memproduksi pakaian seragam anak-anak sekolah. Dengan tenaga kerja murah, produk mereka dapat dijual di bawah harga pasaran.

Probo juga melirik usaha pertanian sayur mayur dan usaha perikanan yang bisa dilakukan para napi.

Probo dipindahkan dari LP Cipinang tanggal 3 Maret lalu. Alasannya, LP Cipinang akan direnovasi. Majelis Kasasi Mahkamah Agung menghukum adik tiri mantan Presiden Soeharto itu empat tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Hutan Tanaman Industri melalui PT Menara Hutan Buana sebesar Rp 100,9 miliar. ■ RH

Kasus pungutan liar terungkap. Satu persatu pejabat di Konsulat Jenderal (konjen) RI di Penang ditangkap.

Agak mengejutkan juga berita tentang ditangkapnya beberapa pejabat di Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Penang, Malaysia. Dan sungguh memalukan karena sangkaan yang menjerat mereka adalah

Manuver Liar di Negeri Jiran

tindak pidana korupsi, yang dilakukan di negeri tetangga.

Seperti dilaporkan *Republika*, 5 April 2006, satu persatu pejabat di Konsulat Jenderal (konjen) RI di Penang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah mantan Kasubid Imigrasi Konjen RI di Penang, Malaysia, Khusnul Yakin Payopo, ditahan, (3/4). Kali ini giliran mantan perwakilan Konjen RI di Penang periode 2004-2005, Erick Hikmat Setiawan ditahan KPK, Selasa (4/4).

Erick mengaku menerima aliran dana yang berasal dari pungutan liar di Konjen RI di Penang sebesar 5.000 ringgit hingga 10.000 ringgit per bulan sehingga totalnya ia menerima sekitar 150.000 ringgit Malaysia.

Ia menambahkan, pungutan tersebut seakan-akan diresmikan melalui Surat Keputusan Dubes RI di Malaysia. Ia juga menjelaskan rekening imigrasi berbeda dari rekening Konjen RI di Penang dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk operasional Konjen RI di Penang. "Memang seakan-akan ada SK-nya, yang menyatakan bahwa di Malaysia itu demikian," ujarnya.

Selain itu, KPK juga memeriksa pihak lainnya, yaitu mantan dubes RI di Malaysia 2000-2003, Hadi A Wayarabi; mantan dubes RI di Malaysia, Yacob Dasto; staf konjen KBRI di Penang, Noro M. Adisasmito; Kasubbag Perjalanan Biro Keuangan Deplu, Adi Sudirman; dan pejabat Ditjen Imigrasi, Suparba W. Amiarsa.

KPK menahan kedua tersangka ini karena sudah memiliki cukup alat bukti untuk menjerat mereka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dia dijerat dengan pasal 12 E UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penuturan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean, modus yang dilakukan adalah pungutan liar yang dilakukan sejak 2003 hingga 2005 dengan cara menaikkan tarif perpanjangan paspor dari tarif resmi yang telah ditetapkan.

Tarif resmi ditentukan melalui SK Dubes RI di Malaysia yang mengacu pada PP No 26 Tahun 1999 tentang tarif biaya keimigrasian. Namun, tersangka Khusnul diduga menggandakan SK tersebut untuk menaikkan tarif resmi.

Ia menambahkan, korban praktik pungutan liar itu sebagian besar adalah TKI yang berada di Malaysia. Dari hasil perbuatannya itu, Tumpak mengatakan, Khusnul telah meraup Rp 12 miliar yang disimpan di dalam rekening pribadinya.

Namun seperti dilaporkan *Kompas*, 5 April 2006, soal uang yang masuk ke rekening Khusnul Yakin Payopo, Erick menjelaskan, selama ini rekening Subdirektorat Imigrasi Penang berbeda dengan rekening Konjen RI Penang. Seusai pemeriksaan, Erick mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah Duta Besar RI di Malaysia saat ia menjabat. ■ RH, DA

GRASI TIBO TAK KUNJUNG TIBA

Belakangan berbagai media massa memuat laporan tentang Tibo cs, terpidana kasus Poso, yang meminta keringanan hukuman dari vonis hukuman mati yang sudah dijatuhkan, karena mereka merasa tidak bersalah. Namun permohonan grasi kedua Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva ditolak Presiden.

Kompas, 8 April 2006, melaporkan keputusan Presiden sudah mendengarkan dan memperhatikan pertimbangan, pandangan dan pendapat MA sesuai undang-undang. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan, persiapan eksekusi tengah berjalan. Namun kapan eksekusi dilakukan masih dirahasiakan.

Berbagai pihak berusaha mengajukan penundaan pelaksanaan eksekusi tersebut dan meminta kasus ditinjau ulang. Tak kurang dari lima pemuka agama, salah satunya Gus Dur, juga ada mantan ketua DPR Akbar Tandjung, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan PDI Perjuangan.

Namun demikian, seperti dilaporkan *Media Indonesia*, 7 April 2006, Polda Sulteng telah mempersiapkan sebanyak 49 penembak jitu untuk melaksanakan eksekusi.

Pihak Tibo diwakili penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan ke Mahkamah Internasional di Jenewa, Swiss. Mereka menganggap perlunya Mahkamah Internasional menangani kasus Tibo cs karena pemerintah Indonesia dinilai tidak lagi mampu memberikan rasa keadilan, yaitu dengan menghukum mati orang yang tidak bersalah. ■ RH

Kepala Desa Kembali Turun Gunung

Ribuan kepala desa kembali membanjiri Jakarta. Kali ini mereka menuntut Mahkamah Agung menuntaskan uji materi (*judicial review*). Dunia politik agaknya punya daya tarik.

Ribuan kepala desa dan perangkatnya yang tergabung dalam Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) kembali "turun gunung". Senin (3/4) lalu mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA), di sebelah gedung Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Panas terik udara Jakarta tidak menyurutkan para abdi masyarakat desa itu menggelar aksinya. MA sebagai lembaga penegak hukum tertinggi di Republik ini dituntut segera memproses uji materi (*judicial review*) dua pasal dalam PP nomor 72/2005 tentang Desa. Yakni pasal 16 huruf (a) tentang larangan berpolitik bagi kepala desa dan pasal 44 huruf (i) tentang masa jabatan kepala desa.

Para kepala desa yang datang dari berbagai daerah itu meminta pasal 16 (a) dicabut karena dinilai bertentangan dengan UU No.31/2002 tentang partai politik. Demikian pula pasal 44 (i) yang mereka nilai bertentangan dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ini merupakan demo yang ketiga kalinya setelah pada 8 Februari dan 8 Maret lalu. Sejumlah tuntutan yang diajukan para kepala desa saat berunjuk rasa ke Depdagri, DPR dan DPD memang telah dipenuhi. Di antaranya pemilihan Kepala Desa yang dibiayai APBD, penghasilan kades yang layak, keikutsertaan kades dalam pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS dan program pembangunan kawasan pedesaan. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan memperkuat koordinasi fungsional vertikal. Serta meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.

Dipenuhinya sejumlah tuntutan itu dibenarkan oleh Koordinator Parade Nusantara, Sudir Santoso SH. Namun dua tuntutan yang lebih esensial, yakni pasal 16 (a) dan pasal 44 (i) ditolak Mendagri. Karenanya Parade Nusantara menempuh jalur hukum. "Dua tuntutan lagi, kami masih menunggu judicial review di MA", ujarnya seperti dikutip *Kompas (4/4)*

Daya Tarik Dunia Politik

Agaknya dunia politik punya daya tarik tersendiri bagi para kades sebagaimana tercermin dari tuntutan mereka. Apalagi sebagian dari mereka sekarang ini sudah ada yang menjadi pengurus partai politik (parpol). Terlebih lagi, di era demokrasi sekarang peranan parpol sangat dominan dan satu-satunya jalan untuk bisa menjadi anggota DPRD hanya melalui parpol.

Tuntutan ini mereka anggap realistis.

WILSON EDWARD

Para Kades unjuk rasa di Mahkamah Agung

"Banyak sekali kepala desa yang menjadi pengurus parpol. Kalau Wapres bisa menjadi ketua partai, mengapa kami yang bukan PNS tidak boleh menjadi pengurus", ujar Wasekjen Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, Abdul Hadi memberi alasan.

Sementara para kades berjuang ke MA, pihak Depdagri tetap bersikukuh menutup rapat peluang itu. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Depdagri Ayip Muflich secara tegas menyatakan, kades yang masuk parpol harus mundur. Alasannya, setiap kades tidak diperkenankan memiliki dualisme pengabdian. Semua kades harus nonpartisan dan netral terhadap semua parpol. "Ini untuk menjaga eksistensi dan kewajiban kades sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang memberi pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif", katanya *(Republika, 6/4)*.

Soal larangan ini, menurutnya, nyata-nyata tertuang dalam UU No.12 /2003 tentang Pemilu Legislatif maupun UU No.23/2003 tentang Pilpres. Dalam kedua UU itu dinyatakan secara tegas larangan keterlibatan kades dalam kampanye pemilu legislatif dan pilpres.

Soal boleh tidaknya kades masuk parpol juga jadi wacana di DPR. Ketua DPR Agung Laksono berpendapat, keinginan kades menjadi pengurus parpol tak bisa dihalangi sebab mereka bukan PNS. Kalau kades dilarang masuk parpol maka pejabat negara lainnya juga harus dilarang, mulai dari presiden hingga bupati/walikota.

Wakil Ketua Fraksi PKB Effendi Choirie sependapat dengan Agung. Namun diingatkan, kades yang masuk salah satu parpol akan sangat rentan dimanfaatkan saat pemilu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan program desa akan ditumpangi agenda parpol.

"Tapi sudah ada yang mengimbangi, yakni Badan Perwakilan Desa", paparnya.

Berbeda dengan Agung dan Choirie, Ketua DPP PAN Patrialis Akbar meolak gagasan kades masuk parpol. "Itu gagasan berbahaya", ujarnya. Alasannya, kedewasaan berpolitik masyarakat belum matang. Bila kades masuk parpol akan timbul konflik. Apalagi BPD belum bisa menjalankan fungsi kontrolnya secara maksmal.

Apa yang menjadi keputusan MA soal *judicial Review* masih harus ditunggu. Kepala Sub Direktorat Kasasi dan PK TUN Abdul Manan menyatakan pengujian PP itu akan diputus dalam satu-dua pekan ini. Namun para kades tetap menuntut perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. ■ SP

PDIP Tolak Kades Berpolitik

Gonjang ganjing tuntutan Kepala Desa (kades) berpolitik atau boleh jadi pengurus partai politik (parpol) ditanggapi serius Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang Banteng gemuk dan moncong putih itu tidak setuju kades berpolitik. Kades sebaiknya cukup jadi simpatisan saja.

Pandangan dan sikap PDIP ini disampaikan secara tegas oleh orang kedua di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Yakni Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Tokoh muda ini berpendapat, kalau hanya ingin menjadi simpatisan parpol, silakan saja. Tapi kalau jadi pengurus parpol akan ada kecendrungan parpol memanfaatkan kadernya yang menjadi kades untuk memobilisasi warga. Kondisi yang demikian itu jelas tidak sehat. Sebab di desa tidak sekedar pemimpin administratif, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang menjadi panutan. "Kalau tidak netral, itu akan mempengaruhi suasana kondusif di desa", tandasnya seperti dikutip *Indo Pos (9/4)*.

PRAMONO ANUNG

Pramono melihat wacana pencabutan PP No.72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa sengaja digulirkan kekuatan partai politik tertentu. "Ada keinginan kuat dari parpol tertentu menggunakan kembali birokrasi pemerintahan untuk tujuan politik. Tidak hanya pemerintahan desa, tetapi juga kabupaten serta provinsi.

Sepanjang perjuangan kades menuntut kesejahteraan, Pramono menyatakan partainya sangat mendukung. Namun tidak dalam soal tuntutan Kades untuk berpolitik. Itu dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Kalau soal kesejahteraaan kades, PDIP ikut memperjuangkan secara penuh. Tapi kalau soal keinginan jadi pengurus parpol, PDIP jelas tidak setuju.

Berdampak Luas

Senada dengan Pramono, lontaran ketidaksetujuan Kades berpolitik juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok. Menurut pendapatnya, secara hukum memang tidak masalah jika kades berpolitik. Tapi diluar itu, dampak yang ditimbulkan sangat luas.

Sebagai gambaran, Mubarok memberi contoh mengenai gubernur atau menteri yang menjadi ketua parpol cenderung masih sering bertindak tidak proporsional. Padahal mereka berpendidikan tinggi. "Kalau kades berpolitik, dampaknya terlihat pada sikap penduduk desa secara langsung", ujarnya seraya menambahkan bahwa akan sulit menciptakan kerukunan sosial di tingkat desa. Ini mengingat karena kades langsung bertatap muka, *face to face,* dengan rakyat.

Seandainya kades benar-benar diijinkan berpolitik, partai tertentu saja yang akan diuntungkan. Sedangkan bagi rakyat, lebih banyak ruginya. "Rakyat hanya dimanfaatkan saja untuk kepentingan parpol", tegasnya.

Ungkapan kekhawatiran kades berpolitik juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR, Mahfudz Sidiq. Kendati diakui bahwa menjadi pengurus parpol merupakan hak politik sebagai warga sipil biasa. Demikian pula secara status, para kades juga bukan pegawai negeri sipil (PNS) yang terikat undang undang tidak boleh menjadi anggota parpol.

Namun dalam kondisi sekarang masalah ini perlu dikaji secara kritis.

Posisi kades sebagai sesepuh dalam komunitas masyarakat desa akan berimplikasi pada masalah yang mengarah ke politisasi posisi kades. Akibatnya, kades akan menjadi komoditas parpol tertentu, Padahal, selama ini kades tidak diusung parpol tapi mencalonkan diri secara pribadi dan diusung masyarakat setempat.

Posisi kades, menurut Mahfudz Sidiq, harus dibedakan dengan posisi politik gubernur, walikota atau bupati. "Bupati, walikota atau gubernur dicalonkan oleh parpol. Kades tidak", jelasnya.■ SP

Malaysia Kembali Melirik Perbatasan

Setelah mengklaim Ambalat sebagai milikinya, kini Malaysia kembali melirik beberapa wilayah perbatasan Indonesia. Kali ini, tiga titik wilayah perbatasan Indonesia di sekitar Kalimantan Utara manjadi targetnya.

Belum usai persoalan batas wilayah Indonesia dengan Malaysia di perairan Ambalat, kini negeri Jiran tersebut sudah mengklaim secara sepihak tiga titik perbatasan darat Kalimantan Timur dengan Malaysia Timur sebagai miliknya. Padahal, belum lama ini daerah kaya minyak di perairan Ambalat di klaim sebagai milik Malaysia.

"Ketiga teritorial yang menjadi titik sengketa tersebut adalah garis batas sungai Semantipal dan sungai Sinapad, keduanya berada di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan. Lalu, satu lagi, garis batas di pulau Sebatik," jelas Letkol Inf. Aminullah, Komandan Kodim 0907 Tarakan kepada Pohan, Koresponden *Berita Indonesia* di Tarakan. Aminullah menjelaskan bahwa Malaysia sudah melakukan klaim atas ketiga titik sengketa itu sejak negeri Jiran tersebut melakukan pengurukan secara sepihak pada tahun 1977.

"Hanya persoalannya belum pernah muncul ke permukaan publik, "lanjut Dandim. Ia juga menjelaskan sejarah wilayah Indonesia yang diklaim Malaysia tersebut. Menurutnya, berdasarkan perjanjian 1915 antara Inggris— yang ketika itu menjajah Malaysia dan Belanda— yang ketika itu menjajah Indonesia - sepanjang hulu sungai Semantipal merupakan wilayah RI. Demikian pula dengan Sungai Sinapad. Namun, pada 1977/1978, Malaysia melakukan survei sendiri atas wilayah tersebut dan mengklaim kedua sungai yang ada di Kecamatan Lumbis ini sebagai wilayah Malaysia.

"Bila klaim Malaysia itu dibiarkan, Indonesia kehilangan lahan sekitar 4800 ha, khusus di garis batas sungai Semantipal," kata Dandim yang baru beberapa bulan bertugas di Tarakan ini. Sedangkan untuk sungai Sinapad, ia mengakui pihaknya belum merinci kerugian secara geografis lahan RI akibat pengakuan sepihak negeri Jiran tersebut.

Untuk persoalan garis batas pulau Sebatik berdasarkan perjanjian 1912, sekarang ada pergeseran patok dari 4°, 10 LU, sehingga RI bakal kehilangan lahan 120 ha. "Kejadian ini dilakukan Malaysia saat kembali mengadakan survei pada tahun 1982," jelasnya. Menurutnya, karena daerah garis batas merupakan masalah nasional, ia berharap Departemen Luar Negeri segera menindaklanjutinya. "Deplu hendaknya segera memberi perhatian. Karena peran TNI AD yang ada di perbatasan hanya melakukan pengamanan," katanya.

Lebih rinci disebutkannya, selama ini pengamanan di wilayah perbatasan hanya terdapat 13 pos TNI AD. Sebelas diantaranya di wilayah Kodim 0907 Tarakan, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Sisanya, masuk dalam wilayah Kodim 0903 Tanjung Selor, yang membawahi wilayah Kabupaten Malinau. "Dari 11 pos yang ada, memang ada 1 terletak di dekat sungai Semantipal. Hanya, tidak masuk dalam kawasan 4800 ha yang diklaim pihak Malaysia itu," katanya. Selama ini, anggota Kodimnya hanya berpatroli di kawasan tersebut dengan berjalan kaki.

"Solusi yang perlu dilakukan agar teritorial Indonesia ini tidak lepas adalah adanya pembukaan akses jalan. Setelah ada akses jalan, pemerintah segera menanam kelapa sawit dan membuat perkampungan transmigrasi di sepanjang jalan itu," harapnya.

Dengan pembukaan akses jalan di sepanjang daerah perbatasan RI – Malaysia itu, ada masyarakat setempat yang melakukan aktivitas. Pasalnya, antara Kalimantan Timur bagian Utara dan Kalimantan Barat, ada 9 titik yang menjadi permasalahan antara RI dan Malaysia. "Untuk tahun 2005 ini, TNI AD akan membangun 4 pos tambahan dan 4 lapangan helikopter," katanya. Dari 4 pos tambahan itu, satu di antaranya diupayakan dibangun di daerah yang mulai diklaim Malaysia. "Efektifnya, di perbatasan itu, setiap 25 km harus ada 1 pos. Mengingat selama ini patroli yang dilakukan TNI AD di perbatasan tidak menggunakan kendaraan, melainkan dengan berjalan kaki," demikian ujarnya.■ SLP/Asmudin

Kebun kelapa sawit, pembatas teritorial

Badai Menerjang Kuta

DENPASAR - Pantai Kuta, Bali yang biasanya dipadati wisatawan, awal pekan di bulan April lalu berubah sepi. Tak ada wisatawan maupun pedagang di sana. Suasana yang berubah seratus delapan puluh derajat itu bukan karena ancaman bom ataupun adanya *traveling warning* ke Pulau Dewata.

Penyebabnya tak lain adalah angin kencang dan tingginya gelombang laut di kawasan itu. Gejala alam yang oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) disebut karena adanya tekanan udara dengan istilah siklon tropis Glenda ini menimbulkan cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang dan tingginya gelombang laut. Akibatnya, selain menimbulkan abrasi bibir pantai, belasan pohon kelapa yang ada di sepanjang tiga kilometer Pantai Kuta ikut tumbang.

Kepala Satgas Pantai Kuta IGN Tresna pun segera mengantisipasi cuaca alam yang tidak bersahabat dan dikhawatirkan mengundang bahaya ini. Diapun segera menutup kawasan itu bagi wisatawan dan pedagang. Sementara para petugas Pantai Kuta dibantu aparat Polisi Perairan Polda Bali segera membersihkan pepohonan yang tumbang di sana.

Walaupun hanya berlangsung dua hari, badai ini sempat membuat panik warga setempat. Aktivitas sehari-hari di kawasan tersebut nyaris lumpuh. Barulah setelah badai mereda dan kondisi pantai dibersihkan, wisatawan mulai berani mendekati pantai dan para pedagang mulai bermunculan menjajakan dagangannya kepada para pengunjung.

Kendati demikian, mereka diminta tetap waspada terhadap kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan. "Meski relatif aman, kami tetap mengawasi keselamatan para wisatawan dan pedagang. Apabila terjadi sesuatu, kami bisa langsung memberikan peringatan. Karena gelombang air laut masih tinggi. Kami khawatir atas keselamatan para pengunjung yang berselancar di sekitar pantai. Jadi, pengawasannya lebih khusus bagi peselancar," kata Tresna. (*Kompas*, 4/4)

Kabit Data dan Informasi BMG wilayah III Denpasar, Sutrisno menjelaskan, perkiraan terjadinya cuaca buruk di laut Selatan bagian Selatan Bali. Seperti diberitakan *Sinar Harapan (4/4)*, berdasarkan pantauan satelit, masih terdapat empat pusat tekanan udara yang berpotensi mempengaruhi cuaca di Pulau Dewata, yaitu disekitar Teluk Canvertaria, Barat Laut Australia dan Samudera Hindia.

Kendati demikian, jumlah wisatawan, terutama dari Australia, yang berkunjung ke Bali masih normal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandar Udara Ngurah Rai M Zailani mengatakan, dalam seminggu terakhir ini jumlah kedatangan wisatawan masih cukup tinggi. "Dari hasil pemantauan, kami belum melihat *trend* turis asing Australia berkurang,"jelasnya.■

Seram Timur Terisolasi

AMBON - Keterbatasan sarana infrastruktur dalam suatu daerah sangat mengganggu aktivitas roda perekonomian di daerah tersebut. Kondisi ini dialami Kabupaten Seram Timur. Belum tersambungnya jalan trans Seram berakibat pendistribusian barang yang ke luar maupun masuk ke daerah itu mengalami kendala. Karena satu-satunya akses hanya melalui laut yang sangat terpengaruh oleh keadaaan cuaca dan gelombang. Sebagai buntut dari keterbatasan infrastruktur itu, kegiatan ekonomi warga masyarakat di daerah itu pun sulit untuk berkembang.

Bupati Seram Bagian Timur Abdullah Vanath mengeluhkan minimnya sarana infrastruktur transportasi di daerahnya yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi. Sehingga perkembangan daerah ini tidak memadai bila dibandingkan dengan daerah lain.

Sebagaimana diberitakan *Kompas (5/4),* keterbatasan infrastruktur, khususnya di bidang trasportasi darat membuat biaya seluruh sektor pembangunan di daerah itu menjadi membengkak. Di sisi lain, hasil bumi sulit untuk dipasarkan. Satu-satunya jalan untuk menghubungi daerah itu hanya menggunakan angkutan lintas laut. Transportasi laut itu sangat terbatas sekali karena tergantung pada situasi dan kondisi laut yang kadang-kadang kurang bersahabat. "Belum tersentuhnya wilayah Seram Bagian Timur oleh jalan trans Seram menjadi penyebab kemiskinan di sana,"kata Vanath yang berharap jalan darat itu bisa segera diwujudkan.■

Kapal New Fuji Tenggelam

KUPANG – Cuaca buruk dan gelombang laut yang mengganas membuat kapal New Fuji yang bertolak dari Pelabuhan Tenau, Kupang menuju Surabaya, Minggu dinihari (2/4) terhempas dan tenggelam di perairan Laut Sawu, NTT. Tiga penumpang , termasuk Mualim I Nur Chamin berhasil diselamatkan kapal tanker Pertamina yang melintas. Sedangkan 29 penumpang lainnya, sampai Kamis (7/4) masih belum jelas nasibnya. Kendati pihak SARNAS dan Lantamal Kupang sudah melakukan pencarian di sekitar kawasan itu.

Kepala Administrasi Pelabuhan Tenau. Kupang, F.X. Bambang Julianto mengaku sejak menerima informasi tentang tenggelamnya kapal tersebut segera meminta kapal yang bertolak dari Kupang dan melintas lokasi kejadian ikut mengawasi dan mencari para korban.*(Indo Pos, 7/4)* ■ AM

Jalan Terjal Angket Cepu

Gegap-gempita itu kini mulai nyaris tak terdengar. Rencana pengajuan hak angket oleh sejumlah anggota DPR-RI atas keputusan pemerintah memilih ExxonMobil sebagai operator pengelolaan ladang minyak di Blok Cepu.

Padahal, jauh-jauh hari sebelum keputusan diambil pemerintah banyak anggota dan pimpinan fraksi DPR-RI yang bersuara lantang melempar *warning* agar Blok Cepu jangan diserahkan kepada ExxonMobil. Bila Blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil, pemerintah diancam Hak Angket (hak menyelidiki).

Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Pemerintah telah mengambil keputusan final. ExxonMobil yang terpilih. Pada Rabu (15/3), perusahaan minyak dari Amerika Serikat (AS) itu telah disetujui pemerintah mengelola Blok Cepu selama 30 tahun.

KEPUTUSAN PEMERINTAH: Exxon Mobil terpilih untuk Cepu.

Disengaja atau tidak, keputusan itu diambil bersamaan waktunya dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Condolezza Rice, yang melakukan kunjungan ke Indonesia selama dua hari. Tak ayal, spekulasi pun merebak. Persetujuan itu dinilai sebagai "Ucapan Selamat Datang" kepada Rice.

Salahkah pilihan pemerintah? Awal Maret 2006, Wapres Jusuf Kalla menegaskan pemerintah pasti memilih pengelola Blok Cepu yang terbaik untuk Indonesia. "Pilihan pemerintah terbaik untuk bangsa," kata Wapres di Jakarta, Kamis (2/3).

Pemerintah ingin, dengan beroperasinya Blok Cepu, produksi minyak nasional bertambah sehingga perekonomian nasional pun meningkat.

Fraksi PDIP adalah yang terdepan menentang niatan pemerintah menunjuk ExxonMobil. Kata Ketua F-PDIP, Tjahjo Kumolo, demi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi bangsa seharusnya pemerintah tak perlu ragu menunjuk Pertamina mengurusi Blok Cepu.

Fraksi PKS awalnya termasuk penentang penyerahan operatorship Blok Cepu kepada ExxonMobil dan penggalang pengajuan hak angket DPR. Tapi belakangan, F-PKS malah tidak mendukung pengajuan hak angket. "Hasil rapat Fraksi PKS pada Jumat (10/3) memutuskan tidak mendukung penggunaan hak angket," kata Ketua F-PKS, Mahfudz Sidiq.

Dibanding menggulirkan hak angket, Mahfudz mengatakan PKS lebih cenderung mengawasi implementasi *Joint Operating Committee* antara Pertamina dengan ExxonMobil lewat Komisi VI dan VII DPR. Lagi pula, "Keputusan itu sifatnya *bussiness to bussiness*. Posisi pemerintah hanya fasilitator," ujar Mahfudz.

Sehari setelah penetapan ExxonMobil, F-PDIP segera menyusun gerakan pengajuan hak angket. "PDIP menolak keras Blok Cepu dikelola oleh ExxonMobil. Karena kalau dikelola sendiri tentunya hasilnya bisa buat bayar utang-utang Indonesia," kata Mbah Tardjo, (16/3).

Akhirnya, pada Senin (20/3), usulan hak angket yang telah ditandatangani 62 anggota DPR yang berasal dari lima fraksi (PDIP, PAN, PKB, PPP, dan PKS) diserahkan perwakilan pengusul kepada Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno (PDIP).

Perwakilan pengusul hak angket itu — dipimpin Dradjat Wibowo (Fraksi PAN)— antara lain adalah Alvin Lie dari Fraksi PAN, Bambang Wuryanto dari Fraksi PDIP, Anna Mu'awanah dari Fraksi PKB, Maruarar Sirait dari Fraksi PDIP.

Yang menjadi alasan disampaikannya usul hak angket tersebut adalah karena perjalanan penyerahan kepemimpinan operatorship lapangan minyak Blok Cepu kepada ExxonMobil cenderung menyalahgunakan wewenang. Pelaksanaan kebijakan itu juga dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Surat berisi usulan hak angket itu kemudian dibacakan oleh Mbah Tardjo – sapaan akrab kepada Soetardjo Soerjogoeritno— dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3). Sidang itu merupakan sidang terakhir masa persidangan ketiga.

Merespons itu, pada Selasa (21/3) malam, Presiden SBY mengundang beberapa petinggi Parpol dan fraksi di DPR ke Wisma Negara untuk sebuah jamuan makan malam dan bincang-bincang khusus.

Adakah lobi khusus SBY kepada Parpol-parpol soal Blok Cepu, di antara sejumlah isu lainnya yang jadi bahan pembicaraan malam itu?

Mungkin benar, bisa jadi pula dugaan itu salah. "Lobi itu kan biasa dalam politik," ujar Ketua F-PAN Abdillah Toha, yang memenuhi undangan SBY.

Selain Abdillah Toha, hadir juga beberapa pimpinan fraksi-fraksi lain, seperti Andi Mattalata (Ketua Fraksi Partai Golkar), Endin A.J Soefihara dan Lukman Hakiem (Ketua dan Sekretaris F-PPP), Mahfudz Siddiq (Ketua F-PKS), Jamaluddin (Ketua F-BPD), Zaenal Ma'arif (Wakil Ketua DPR dari F-PBR) dan rekan sefraksinya Ade Daud Nasution.

Pucuk pimpinan Parpol yang hadir, antara lain, Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB versi Gus Dur), MS Kaban (Ketua Umum DPP PBB), Soetrisno Bachir (Ketua Umum DPP PAN), dan Hadi Utomo (Ketua Umum DPP PD). Petinggi PDI Perjuangan dan pimpinan F-PDIP DPR, anehnya, tidak diundang SBY. Nasibmu Angket Cepu? ■ AF

Menanti Si 'Orange' Juara

Tim nasional Belanda diunggulkan sebagai favorit juara *World Cup* Jerman 2006. Sebagai negara pencetus *total football* Belanda bagai menunggu kelahiran anak pertama. Dalam sejarah tim *Orange* belum pernah mengenyam juara.

Jika dirunut perjalanan tim nasional Belanda menuju Piala Dunia Jerman 2006 cukup meyakinkan. Tak heran bila pecinta sepakbola dunia mendambakan tim besutan pelatih Marco Van Basten itu akan mampu menembus kebuntunnya menjadi juara dunia.

Tampil meyakinkan dengan predikat tak terkalahkan selama pra piala dunia merupakan catatan yang tak bisa diabaikan. Andaikan itu catatan prestasi bagi seorang petinju jelas lawan berikutnya bakal ngeri. Tetapi catatan tak terkalahkan dalam pertandingan sepakbola tentu tidak sama dengan tinju. Bahkan ada pepatah yang berbunyi 'bola itu bulat dan licin, bisa-bisa kita terpeleset dibuatnya'.

Sejarah mencatat bahwa selama keikutsertaanya dalam piala dunia tim orange memang belum pernah sekalipun maraih gelar juara. Padahal semua orang mengetahui Negara Kincir Angin tersebut dikenal sebagai gudangnya bintang sepak bola dunia, yang bertebaran dimana-mana. Sebut nama besar yang telah malang melintang Johan Cruif, Rinus Michael, Ruud Gulid, Van Basten, Frank Rijkart, Ronal Koeman dan sederet nama lainnya pernah menjadi bintang pujaan dunia. Mereka disamping sukses sebagai pemain juga sukses sebagai pelatih.

Rekor tak terkalahkan dalam babak penyisihan pra Piala Dunia 2006 pun sama sekali belum memberikan jaminan kepada Ruud Van Nistelrooy dan kawan kawan untuk meraih juara. Pasalnya predikat itu juga sudah pernah terjadi di tahun 1974, 1978 dan 1990. Tapi dalam putaran final ketiga tahun tersebut timnas Belanda keok total. Di tahun 1990 Belanda bermain buruk dan berhenti di babak 16 besar. Tahun 1974 Belanda berhasil mencapai final, kemudian kalah terhadap Jerman. Tahun 1978 Belanda kembali meraih final namun kandas terhadap Argentina. Jadi singkatnya prestasi tak terkalahkan, yang memang patut diancungi jempol, belum bisa menjanjikan apa-apa.

Mengubah Tradisi

Satu catatan yang cukup menonjol dari timnas Belanda menuju Jerman 2006 ini adalah keberanian pelatih Marco Van Basten mengubah tradisi. Negeri kincir angin ini selalu dikenal sebagai gudangnya pemain bola handal. Sekali pemain ini ngetop, biasanya, pelatih akan langsung terpaku dengan pemain tersebut. Contoh paling hangat dapat dilihat pada timnas Belanda dalam kejuaraan Eropa tahun 2004. Saat itu kesebelasan *Orange* dari depan sampai belakang penuh dengan pemain bintang. Tapi terbukti itu kurang ampuh untuk memboyong piala Eropa.

Ketika menggantikan Dick Advocaat, pelatih Van Basten membuat terobosan dengan 'Membuang' semua pemain top dan menyisakan pemain muda yang tengah naik daun. Hasilnya adalah sebuah tim yang solid di berbagai lini.

Langkah Basten diharapkan benar-benar menghasilkan sejarah baru bagi tim Belanda. Warga Belanda tegang dan berharap-harap cemas. Apalagi dari hasil undian yang dikeluarkan FIFA Belanda yang berada dalam group C bersama Argentina, Pantai Gading, Serbia Montenegro. Juara dan runner up group akan melangkah ke babak perdelapan final. Di atas kertas Belanda dan Argentina bakal melaju ke babak kedua. Namun, perhitungan matematis tentu saja tidak akan menjadi ukuran, karena sepanjang bola masih bundar licin semua kemungkinan bisa saja terjadi. Namun bagaimanapun aksi dan peragaan Total football yang bakal di peragakan oleh Ruud van Nistelrooy dan kawan kawannya pasti ditunggu penggemar sepak bola dunia. Akankah tim *Orenge* membuat sejarah baru untuk menembus kebuntuannya terwujud? Kita tunggu sejarah baru itu dalam putaran final yang berlangsung dari 9 Juni hingga 9 Juli 2006 mendatang.

Selain itu negeri kincir angin tersebut juga dalam perlehatan piala dunia tahun ini mencatatkan dirinya sebagai negara yang paling banyak pelatih yang akan mendampingi kesebelasan kontestan Piala Dunia. Mereka adalah, Marco Van Basten, Timnas Belanda, Dick Advocaat, Korea Selatan, Guus Hiddink Australia dan Leo Beenhakker Trinidad & Tobago. Siapa diantara empat punggawa tim tersebut yang melengkapi sejarah tim *Orange*. Nantikan kehadirannya. ■ SB (berbagai sumber)

Tim Nasional Kesebelasan Belanda

Tetap Jaya di Usia 60 Tahun

TNI Angkatan Udara mengawal dirgantara nasional secara profesional demi tegaknya kedaulatan NKRI, di tengah keterbatasan alutsista yang dimiliki.

Peringatan 60 tahun lahirnya TNI Angkatan Udara di Taxi Way Echo Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu 9 April lalu berlangsung meriah. Bertindak selaku Inspektur Upacara Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto. Tampak di deretan undangan terdepan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Subijanto, serta beberapa mantan kepala staf serta para sesepuh TNI AU.

Acara selain diisi parade dan devile juga berbagai atraksi seperti terjun payung dan drumband Karbol Akademi Angkatan Udara. Dan yang lebih mengangumkan lagi adalah tampilnya 57 pesawat berbagai jenis milik TNI AU dan FASI (Federasi Aero Sport Indonesia). Pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang ikut ambil bagian diantaranya, jet latih/serang 109/209 Hawk Mk 53, jet tempur F-5E Tiger II, Helikopter EC 120 Colibri, Heli Bell Solloy. Selain itu empat pesawat Hercules C-130 yang digunakan untuk penerjunan 150 prajurit Kopaskhas TNI AU dan Wara, serta 500 personil TNI AU. Mereka melakukan terjun bebas *(free fall)* dan terjun statik.

Berbagai atraksi yang diperagakan oleh prajurit-prajuri terbaik TNI Angkatan Udara berjalan sempurna. Mulai dari helikopter, hingga Pesawat tempur super canggih dari berbagai tipe dan jenis terus menjelajahi angkasa Ibukota dengan membentuk berbagai formasi di udara. Demonstrasi diakhiri terjun payung oleh para penerjun dari ketiga angkatan TNI AU, AL dan AD ditambah anggota Brimob Polri serta FASI.

Pengabdian TNI AU

Pada peringatan HUT TNI Angkatan Udara ke-60 yang mengusung tema, "Jiwa dan *semangat Swa Bhuwana Paksa – Landasan Pengabdian Insan AU",* jajaran TNI AU menggelar berbagai kegiatan. Diantaranya ziarah ke makam Bapak AURI Komodor Udara Suryadi Suryadarma, donor darah serta malam penganugerahan kepada perwira berprestasi serta peluncuran buku-buku kedirgantaraan.

Bila diukur dari langkah sejarah, jangka 60 tahun barangkali sekedar geliat kecil yang nyaris tidak bermakna. Tetapi manakala ditakar dari usia manusia, 60 tahun merupakan tonggak perjalanan hidup yang sangat berarti. Begitu pula dengan perjalanan dan pengabdian TNI Angkatan udara kepada ibu pertiwi.

Momentum-momentum pengabdian TNI Angkatan Udara, dapat dilihat secara nyata, seperti dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), bencana gempa di Alor serta di Nabire. Anggota TNI AU bersama relawan lainnya bahu membahu melaksanakan operasi kemanusiaan.

Juga yang belum hilang dari ingatan masyarakat Indonesia soal sengketa Blok Ambalat, dan konflik-konflik di berbagai daerah, semakin menyadarkan betapa pentingnya kekuatan udara nasional *(National Air Power).*

Memang banyak pihak yang seolah-olah disadarkan kembali bahwa keberadaan Angkatan Udara yang kuat dapat diproyeksikan untuk kepentingan apa saja, sebagai ciri khas kekuatan udara yang fleksibel.

Perjalanan TNI Angkatan Udara sejak awal berdirinya hingga sekarang memang tidak bisa dilepaskan dari perjuangan bangsa. Sejak bedirinya 60 tahun lalu, Angkatan Udara telah menunjukkan berbagai prestasi dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mencegah dan menangkal serta menanggulangi setiap bentuk ancaman yang menggunakan media udara demi tetap tegaknya NKRI.

Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, dalam amanatnya mengajak seluruh insan TNI Angkatan Udara memaknai, merefleksi, introspeksi dan evaluasi diri untuk menilai sudah seberapa besarkah pengabdian kita terhadap bangsa dan negara ini dan bukan sebaliknya sudah seberapa besar yang kita peroleh dari bangsa dan negara ini. "Apabila dapat mengkristalkan renungan tersebut, kita yakin hal itu akan menjadi semangat dan dorongan yang kuat untuk tetap berbakti kepada negara dan bangsa sesuai dengan jati diri kita sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara yang professional," ujarnya.

Sementara itu Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Herman Prayitno, menjawab pertanyaan *Berita Indonesia* tentang kebutuhan alutsista TNI AU saat ini dan mendatang mengatakan, penambahan pesawat dan sebagainya dilakukan secara bertahap untuk lima tahun ke depan. "Itu semua tergantung anggaran dari Departemen Pertahanan", paparnya. ■ SB

WILSON EDWARD

UPACARA HUT TNI AU: Mengawal Dirgantara Nasional.

WILSON EDWARD

PEGANG TEGUH JATI DIRI TNI

Ruang pertemuan Puri Ardhya Garini, Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa 4 April lalu dipenuhi perwira tinggi TNI dan para sesepuh TNI. Saat itu memang tengah berlangsung acara silaturahmi antara Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, dengan keluarga besar TNI. Sosok Djoko selaku Panglima TNI begitu akrab dengan para seniornya yang sudah purnawirawan.

Para purnawirawan yang hadir diantaranya, Jenderal TNI (Purn) Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat, Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Letjen TNI (Purn) Soerjadi Soedirdja, Yunus Yosfiah, AM Hendropriyono, dan para sepuh lainnya. Hadir pula dari keluarga besar FKPPI, PPM serta beberapa elemen lainnya.

Meski baru dua bulan memangku jabatan Panglima TNI, Marsekal TNI Djoko Suyanto, meyakini bahwa pertemuan semacam itu tentu saja akan melahirkan sebuah atmosfir baru berupa semangat pengabdian tanpa pamrih untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Panglima TNI dalam kesempatan tersebut menyampaikan hal-hal berkaitan dengan hasil Rapim TNI belum lama ini. Antara lain menyangkut kebijakan di bidang kesejahteraan prajurit, alutsista TNI dan reformasi internal TNI. Juga masalah yang berkaitan dengan bisnis TNI dan hak pilih prajurit.

Mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Sutrisno, dalam kata sambutannya mengingatkan bahwa bangsa ini memerlukan perhatian semua pihak. TNI harus tetap menjaga dan mempertahankan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dengan terus meningkatkan profesionalisme. Masalah kesejahteraan prajurit TNI memang menjadi masukan yang paling banyak diusulkan.

FERI DISULAP JADI KAPAL PERANG

Tak ada rotan akar pun berguna. Barangkali pepatah itu juga berlaku bagi pertahanan laut Indonesia. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk pengadaan Alutsista yang baru tetap menjadi kendala bagi TNI baik itu TNI Angkatan, Laut, Darat maupun Udara.

TNI Angkatan Laut sedikitnya mendapat suntikan baru di bidang armada laut. Pada Jumat (7/4) lalu KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto meresmikan empat buah kapal feri yang telah dimodifikasi menjadi kapal perang. Empat kapal feri tersebut merupakan pemberian atau hibah dari Departemen Perhubungan pada 15 September 2005, sebanyak lima kapal.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada Timur (Koarmatim) Letnan Kolonel Laut (KH) Drs, Toni Syaiful menyatakan, keempat KRI itu sudah bisa dioperasikan setelah diresmikan oleh KSAL. Menurutnya kapal feri dengan kecepatan maksimal 38 knot itu memang harus dimodifikasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan. Perubahan itu antara lain catnya harus diubah menjadi abu-abu dan dilengkapi dengan senjata, termasuk perubahan ruangan yang semula bisa menampung 925 orang kini hanya mampu memuat 600 orang karena sebagian ruangannya telah difungsikan untuk mengangkut peralatan militer, demikian dikutip *Republika Kamis, 6 April 2006.*

Pengalihan status kapal sipil menjadi kapal militer tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 28/I/2006. Dengan penambahan empal kapal tersebut diharapkan kinerja TNI AL akan bertambah baik, sehingga lebih maksimal mengamankan wilayah perairan RI. "Meskipun empat dari lima kapal yang diresmikan tersebut juga bekas, namun diakui masih sangat memadai untuk menjadi kapal perang," ujar Toni. ■ SB

REPUBLIKA

Pengalihan status kapal sipil menjadi kapal militer

GUSTI KANJENG RATU ALIT

Prihatinkan Wilayah Pribadi *Diblow Up* Media

"Wilayah rumah tangga, adalah wilayah pribadi yang mesti dijaga kerahasiaannya. Tapi, mengapa kini menjadi wilayah publik?"

Demikian komentar Gusti Kanjeng Ratu Alit bernada protes. Putri tertua Sinuhun Paku Buwono Ke XII (alm) ini mengaku prihatin, banyaknya tayangan media, terutama media audio visual *infotainment* yang memiliki kecenderungan mem*blow up* besar-besaran wilayah pribadi sesorang. "Bahkan telah memasuki wilayah 'tempat tidur' seseorang," ungkapnya ketika ditemui *Berita Indonesia* dalam acara peringatan Ulang Tahun ke-59 Jenderal TNI (Purn) Wiranto, beberapa waktu lalu.

GKR ALIT: Menjunjung Tinggi Etika dan Sopan Santun.

Gusti Kanjeng Ratu Alit mengaku, tak pernah bisa mengerti, kendati yang banyak di 'goda' wilayah pribadinya itu para selebritis. "Sebagai publik figur, selebritis kan juga manusia," kilahnya. Artinya, menurut GKR Alit, sebesar apa pun kepopuleran seseorang, ia juga memiliki wilayah pribadi yang mesti dihormati haknya. Media sebagai sarana informasi, perlu juga membatasi diri agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga seseorang.

"Saya pikir sopan santun dan etika tidak cuma perlu diterapkan dalam tingkah laku dan sikap seseorang, tapi mestinya media juga menganut sopan santun dan etika ini," lanjutnya. Sopan santun dan etika media itu barangkali yang dimaksud GKR Alit sebagai kebebasan media yang bertanggungjawab.

Pengageng Kaputren Surakarta Hadiningrat ini menambahkan, terlalu diumbarnya persoalan rumah tangga selebritis dan publik figur dalam siaran *infotainment* akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Apalagi jika dua orang suami-istri yang sedang 'dalam persoalan' itu kemudian diadu satu sama lain. Akhirnya, terpancing lalu mengumbar keburukan pasangannya. "Sebagai penonton *infotainment* kita bukannya terhibur tapi malah prihatin dan malu," lanjutnya.

Itulah sebabnya, menurut salah satu putri pewaris tahta Keraton Surakarta ini, pendidikan etika dan sopan santun harus tetap dipertahankan. Sebab pendidikan etika, sopan santun dan budi pekerti bukan saja milik anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, tapi juga milik bangsa. Etika dan sopan santun yang identik dengan adat ketimuran menurut GKR Alit, harus masuk ke dalam setiap lini kehidupan. Maka, ia sangat mendukung masuknya pelajaran ini dalam kurikulum pendidikan.

Selain itu, ia menegaskan bahwa media memiliki andil yang besar dalam upaya menjunjung tinggi etika dan kesopanan ini. Melalui *infotainment* yang terlalu 'terbuka' akan menanamkan image bahwa wilayah rumah tangga tak ada lagi batas, kawin cerai dianggap hal yang lumrah sehingga perkawinan tidak lagi dianggap saktral. Melalui sinetron-sinetron yang fulgar dan terlalu bebas menempatkan hubungan anak dengan orangtua, juga akan menanamkan image bahwa hubungan anak dan orangtua sudah bebas tanpa batas. "Saya bukannya menutup diri dengan perkembangan jaman, tapi sejauh apa dan sebatas mana jaman ini berubah, hendaknya etika dan sopan santun harus tetap dijunjung tinggi," lanjutnya.

Kendati demikian, putri Keraton Surakarta ini merasa optimis karena pendidikan etika dan sopan santun kembali dianggap penting. "Jika pendidikan etika dan sopan santun ini berhasil dan mampu memasuki setiap lini kehidupan, mudah-mudahan bukan saja sikap generasi muda kita yang santun, tapi berita-berita media, termasuk *infotainment* juga akan lebih santun lagi," harapnya. ■ AD, SR

Bulan April ini Auk Murat, Sophia Latjuba dan Anne J. Cotto tengah harap-harap cemas. Mereka menunggu realisasi pemerintah yang bisa menentramkan hati mereka yang waswas akan status anak.

Ketiga artis itu hanyalah sedikit orang dari sekian banyak perempuan Indonesia yang menikah dengan warga negara asing (WNA). Karena berprofesi sebagai artis, media menyorot mereka. Namun sesungguhnya tidak hanya perempuan warga negara Indonesia (WNI) berprofesi artis yang menikah dengan pria WNA.

Selama ini, menurut sistem kewarganegaraan di Indonesia, anak yang lahir dari ayah WNA secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dalam banyak kasus, si ibu yang WNI seringkali kesulitan mendapat hak asuh atas anaknya tersebut.

Sejumlah perempuan yang menikah dengan warga negara asing menuntut pemerintah segera mensahkan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak-anak.

Satu Anak, Dua Negara

AUK MURAT DAN ANNE J. COTTO: Memperjuangkan kewarganegaraan anak.

Inilah yang diperjuangkan Auk Murat dan teman-temannya di KPC Melati (Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu). Berbagai kantor pemerintahan dan juga gedung wakil rakyat sudah mereka datangi, guna meminta perubahaan Undang-Undang (UU) Nomor 62/1958 tentang Kewarganegaraan. "UU tersebut sudah seharusnya diadakan perubahan," ujarnya, saat diundang DPR untuk masalah ini, Februari lalu.

Seperti ditulis majalah *Gatra*, ia demikian gigih memperjuangkan hak asuh anaknya yang masih di bawah umur, Nicola dan Tantiana, hasil pernikahannya dengan seorang pria WNA.

Dalam perjuangannya tersebut, Auk juga mendapatkan dukungan dari sejumlah wanita senasib, guna mengubah UU yang mengatur status warga negara seorang anak yang lahir dari bapak WNA. Menurutnya, anak adalah salah satu dari kelompok rentan yang harus dan wajib, bagi negara untuk melindungi mereka, sehingga mereka dapat meraih masa depan tanpa keterbatasan.

Auk, 35, mantan peragawati era 90-an yang kini menjadi perancang sepatu itu menyadari bahwa birokrasi yang harus dilalui tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Misi kami, hati nurani kami berkata sampai perjuangan ini bisa kami lihat hasilnya," katanya.

Senada dengan Auk, artis sinetron Anne J. Cotto juga menginginkan UU Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk anak-anak perkawinan campuran itu segera disahkan. Sampai saat ini, ia mengaku belum siap untuk memiliki anak karena hukum yang berlaku untuk kewarganegaraan sang anak, menjadikan Anne berpikir ulang untuk memiliki momongan.

Segera Disahkan

Kewarganegaraan ganda terbatas artinya bagi anak-anak yang masih di bawah umur diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Ia baru akan menentukan pilihan definitif pada saat mencapai usia dewasa.

Keinginan Auk dan teman-temannya di KPC Melati nampaknya akan membuahkan hasil. Karena menurut kabar yang beredar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menandatangani Undang-Undang ini pada bulan April ini.

Pada 1 Februari lalu, Panja DPR menyetujui untuk memasukkan usul kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan perempuan WNI dengan pria WNA ke dalam revisi Undang-Undang No. 62 Tahun 1958. DPR memang sedang melakukan pembahasan atas perubahan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan itu di tingkat Panja.

Anggota Panja Prof. Rustam E. Tamburaka berjanji akan terus memperjuangkan sistem kewarganegaraan ganda terbatas hingga ke tahap pembahasan yang lebih tinggi. "Anak yang dilahirkan itu adalah anak-anak ibu juga," ujar anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Selain itu, penentuan batas usia dewasa sempat menjadi pembahasan yang cukup dilematis, apakah 18 atau 21 tahun. Penentuan batas usia penting karena menyangkut waktu penentuan pilihan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran, apakah akan ikut ayah atau ibunya.

Guru besar hukum perdata internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Zulfa Djoko Basuki mengakui sistem hukum Indonesia masih menggunakan parameter yang berbeda-beda tentang kedewasaan. Apalagi tiap negara bisa saja menggunakan ukuran yang berbeda.

Di Jerman, misalnya, seseorang baru bisa memilih salah satu kewarganegaraannya lima tahun setelah dewasa. Jadi, sekitar usia 23 tahun. Usia itu dianggap sudah matang bagi seseorang menentukan pilihan kewarganegaraan. Berkaitan dengan perkawinan campuran, Prof. Zulfa menyarankan untuk mengacu kepada Konvensi PBB tentang hak anak. ■ RH

Toshiba Luncurkan HD DVD Player Pertama

Awal April ini, Toshiba akhirnya mulai menggelar DVD Player high-definition miliknya di Jepang setelah sempat tertunda dua kali (awal Januari dan akhir Maret 2006 lalu). Debut ini menjadikan Toshiba sebagai perusahaan pertama yang menawarkan disc player optik generasi berikutnya ke seluruh dunia.

Konglomerat elektronik kedua terbesar di Jepang itu mengatakan pemutar HD DVD anyar, yang akan diadu dengan teknologi Blu-ray Sony, akan dibandrol dengan harga sekitar 110.000 yen di Jepang. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, Sony bermaksud menawarkan pemutar berbasis Blu-ray dengan bandrol US$ 1.000 Juli mendatang. Toshiba berharap pemutar tersebut bisa memberi warna baru di pasar video rumahan. Peluncuran HD DVD Player di Jepang akan diikuti oleh debut HD DVD Player di Amerika Serikat pada bulan April.

Toshiba rencananya akan menawarkan dua model HD DVD player di Amerika Serikat, yakni HD-XA1 dan HD-A1, masing-masing dengan bandrol US$ 799 dan US$ 499. Toshiba juga mengatakan akan bermaksud menjual 600.000-700.000 pemutar baru secara global pada tahun fiskalnya yang berakhir Maret 2007. Selain itu, Toshiba juga akan meluncurkan PC yang dipersenjatai dengan HD DVD menjelang periode April-Juni.

Setahun belakangan ini persaingan adu unggul format DVD masa depan antara Blu-Ray dan HD DVD kian gencar. Persaingan membuat para konsumen bingung untuk memilih di antara keduanya. Perbedaan format DVD ini seperti mengulang kembali sejarah pada 25 tahun yang lalu, ketika muncul perbedaan format video antara VHS dan Betamax. Inti dari kedua format DVD adalah blue laser. Disinyalir, blue laser memiliki jarak gelombang yang lebih pendek daripada red laser yang dipakai DVD saat ini. Hal ini memungkinkan disk menyimpan data lebih banyak, terutama untuk film dan televisi high-definition.

Hollywood, yang merupakan ikon industri film dunia, juga terbelah dalam dua format itu. Beberapa studio film memutuskan untuk merekam film hasil produksinya dalam format Blu-Ray, dan sebagian lain di format HD DVD. Demikian halnya dengan pelaku industri komputer. "Blu-ray (disk) sering disebut-sebut memiliki kapasitas penyimpanan yang besar namun biaya pembuatannya lebih mahal, sedangkan HD (DVD disc) harganya murah. Tetapi HD DVD tidak ketinggalan dengan Blu-ray dalam hal kapasitas," ujar Yoshihide Fujii, Toshiba Corporate Senior Vice President. Perkembangan terakhir yang diperoleh *BeritaIndonesia* (10/04/2006) dari situs Toshiba diberitakan bahwa Toshiba meluncurkan Notebook PC dengan HD DVD-ROM Drive pertama di dunia di Jepang.■

Logo Google Akan Berkibar di Bulan

TAMPAKNYA Google benar-benar ingin menguasai jagad raya. Bagaimana tidak, mereka berencana mengiklankan logonya pada permukaan bulan sehingga dapat terlihat jelas melalui bumi. Usaha raksasa pencarian yang ambisius ini, diperkirakan akan memakan dana sebesar US$ 1 miliar yang akan dibayarkan kepada pemerintah Amerika. Pembayaran tersebut digunakan sebagai hak untuk menancapkan benderanya pada permukaan bulan. Google diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah Amerika karena mereka disebut-sebut sebagai negara pertama yang mendaratkan manusia di bulan pada tahun 1969 dengan Neil Armstrong sebagai awaknya. Google beberapa waktu lalu juga mengumumkan akan menjual 5,3 miliar lembar sahamnya untuk mendapatkan dana sebesar US$ 2,1 miliar.■

Windows XP Berjalan di Mac Intel Sudah Legal

AKHIR MINGGU PERTAMA APRIL, Apple Computer Inc. mengumumkan piranti lunak 'Boot Camp' (http://www.apple.com/macosx/bootcamp/). Software ini memungkinkan perangkat Mac berbasis Intel menjalankan dua sistem operasi: Mac OS X dan Windows XP. Dijelaskan Apple, Boot Camp merupakan upaya memenuhi keinginan pengguna untuk dapat menjalankan sistem operasi Windows pada perangkat Macintosh (Mac) mereka. Namun Apple tetap bersikeras tak akan menjual ataupun memberikan layanan dukungan pada Microsoft Windows.

Dengan Boot Camp, pengguna Mac Intel dapat menjalankan sistem operasi yang diinginkannya secara bergantian pada komputer yang sama. Persis seperti PC yang dilengkapi kemampuan dual boot. Beberapa saat lalu, dua orang penggemar komputer berhasil menjalankan Windows XP di atas Mac Intel dengan piranti lunak buatan mereka. Piranti lunak itu bisa di-*download* secara gratis di situs www.onmac.net. Kini, rasanya tak perlu lagi gunakan software tidak resmi. Pasalnya dengan Boot Camp milik Apple Computer Inc., menjalankan Windows di atas Mac bisa dilakukan secara aman dan resmi. Versi Beta Boot Camp sudah bisa bisa dicicipi dan di-*download* secara gratis. Pada situsnya, Apple bahkan memberikan petunjuk instalasi Boot Camp agar bisa dijalankan secara maksimal oleh pengguna. Versi gratisan tersebut akan berhenti berfungsi pada September 2007. Namun Apple berencana menyertakan Boot Camp pada OS X versi berikutnya, OS X Leopard.■

Thai Terkepung Krisis

Eks PM Thaksin dicemaskan mengatur pemerintahan baru di Thailand. Karena itu kubu oposisi ingin mendepaknya dari kancah politik.

Krisis politik di Thailand belum benar-benar pulih, meskipun Chidchai Mannasathit tampil menggantikan PM Thaksin Shinawatra mengundurkan diri setelah partainya memenangkan Pemilu Sela. Setelah pengunduran dirinya yang mengejutkan, Thaksin di depan massa pendukungnya yang berkumpul di markas Partai Thai Rak Thai, mengatakan dia setuju bagi pengangkatan Chidchai untuk menggantikan dirinya.

Hanya sehari setelah Pemilu (3/4), Thaksin yang diperkirakan masih punya peran besar di dalam perpolitikan di Thailand, menawarkan rekonsiliasi nasional. Namun gagasannya belum mampu meredakan krisis politik di negeri gajah putih tersebut. Thaksin malah diajukan ke Mahkamah Agung oleh kubu oposisi karena tuduhan menyelenggarakan Pemilu curang. Para tokoh oposisi melansir tuduhan curang pada partai TRT dalam Pemilu 2 April.

Pemilu itu merupakan pemilihan umum paling unik di dunia. Soalnya semua kubu oposisi memboikot Pemilu. TRT maju sendirian tanpa ditantang oleh partai-partai utama lainnya. Hasil Pemilu diperkirakan tidak akan mampu menghadirkan pemerintah yang solid. Tentu karena tanpa saingan, Pemilu itu dimenangkan kembali oleh TRT.

Menlu Kantathi Suphamongkhon mengatakan, Thailand akan melakukan reformasi politik dan menyelenggarakan Pemilu ulang 15 bulan mendatang, setelah pemerintahan baru terbentuk. Pemerintahan baru akan menunjuk sebuah komite guna membuat perubahan-perubahan konstitusional.

Para anggota komite, kata Kantathi, akan diangkat secara transparan dan bersikap netral sehingga reformasi politik dapat terlaksana dengan baik. Pemerintahan baru belum bisa solid dalam waktu dekat lantaran semua kursi di parlemen belum terpenuhi. Sedangkan parlemen baru terbentuk pekan pertama bulan Mei atau paling lambat bulan Juni.

Dengan demikian ketidakpastian politik terus berlanjut di Thailand. Kubu oposisi meminta Raja Bhumibol Adulyadej menunjuk Perdana Menteri baru. Ini tuntutan para demonstran yang turun ke jalan. Raja telah bertemu dengan para penasihatnya berkenaan dengan adanya seruan untuk menunjuk PM baru.

Pemilu sela akan diselenggarakan di 38 distrik tanggal 23 April untuk mengisi 39 kursi yang tersisa di parlemen. Namun dengan adanya boikot dari Partai Demokrat, Chart Thai dan Mahachon, Pemilu sela tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa. "Jika terjadi kesulitan, menurut konsensus, penundaan tidak boleh terjadi lebih dari beberapa pekan," kata Kantathi.

PM Thaksin Shinawatra

Ribuan orang berkumpul di alun-alun kerajaan (7/4) untuk merayakan pengunduran diri Thaksin. Dej Poomkacha, mantan dosen, mengatakan ini pekan yang membangkitkan bagi khalayak ramai. Di Amerika dan Eropa juga terjadi revolusi. Thai juga melakukan hal yang sama.

Namun keceriaan bukanlah puncak segalanya. Soalnya, Thaksin bersikeras untuk tetap menjadi ketua partai yang berkuasa, TRT. Hal itu mencemaskan kubu oposisi karena Thaksin masih mampu mengatur pemerintahan baru di belakang layar. "Rakyat sadar kami telah menang, namun kemenangan ini tidak begitu layak dibanggakan," kata seorang biksu yang berusia 57 tahun.

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi merencanakan demonstrasi baru di pusat kota Bangkok untuk menuntut keluarnya Thaksin dari kancah politik. Aksi tersebut direncanakan sebelum pemilihan senat 19 April. Mereka juga mendesak rakyat agar tidak memilih para calon yang punya hubungan dengan Thaksin.■

(dari berbagai sumber–SH)

Chirac Terhadang UU Perburuhan

Presiden Prancis Jacques Chirac

PARIS: Presiden Prancis Jacques Chirac meminta partai yang berkuasa, Serikat Gerakan Rakyat (UMP) menyusun UU Ketenagakerjaan yang baru. Dia menyampaikan permintaan setelah berkonsultasi dengan para pemimpin demonstrasi. Chirac telah menunda pemberlakuan undang-undang yang diprotes habis-habisan oleh serikat pekerja dan sejumlah kalangan.

UMP telah berusaha bertemu dengan para pemimpin serikat pekerja dan mahasiswa untuk mencari jalan keluar, namun mereka tetap menuntut agar undang-undang tersebut ditarik. Mereka mengancam akan melaksanakan demonstrasi yang lebih besar jika parlemen tidak menarik undang-undang tersebut paling lambat 15 April. PM Dominique de Villapin mengatakan pemerintah akan memberi keputusan setelah perundingan usai. Para pengusaha yang diuntungkan oleh undang-undang tersebut meminta pemerintah segera mengakhiri krisis agar tidak mengganggu perekonomian Prancis. ■ SH

Suaka Papua Mencakar Tetangga

Reaksi masyarakat Indonesia atas pemberian suaka terhadap 42 orang warga Papua oleh Pemerintah Australia menuai protes. Poros Canberra-Jakarta memanas.

Adalah kedua majalah berita mingguan terbitan Indonesia, *Tempo* dan *Gatra* edisi awal April mengupas masalah suaka Papua, sebagai laporan utamanya. Majalah ***Gatra***, edisi *1 April 2006* menulis judul di atas sebagai judul unggulannya di *cover* depan. Di bagian lain, majalah ini juga menulis Australia kembali berulah.

Masalahnya sebanyak 41 dari 42 WNI asal Papua yang lari ke Australia diberi visa sementara oleh pemerintah Australia. Tak urung ulah negeri 'Kanguru' itu pun membuat masyarakat Indonesia marah. Ujung-ujungnya Dubes RI untuk Australia Hamzah Thayeb pun ditarik dari posnya di Canberra. Reaksi pun datang dari parlemen Indonesia. Tampaknya Australia berniat menghapus Papua dari peta Indonesia, demikian ulasan yang ditulis *Gatra*.

Berita lain yang menjadi sorotan *Gatra* adalah carut marutnya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2006. Hasil pengumuman CPNS yang dikeluarkan pemerintah mengundang keresahan di berbagai daerah. Indikasi adanya tekanan kekuasaan, permainan uang dan hubungan kekerabatan, serta kesalahan sistem komputerisasi dituding sebagai biang kekisruhan tersebut. Boleh jadi CPNS merupakan cikal bakal dan bibit munculnya wabah korupsi di negeri ini.

Majalah ***Tempo***, edisi 3-9 April 2006 pada *cover* depannya menulis '*Suaka! Panas Dingin Jakarta-Canberra*'. Sebanyak 42 warga Papua mendapat suaka politik dari Negara 'Kanguru'. Reaksi Jakarta pun memanas. Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda melayangkan surat protes kepada rekannya Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer, bahkan menarik pulang Dubes RI untuk Australia Hamzah Thayeb. Hubungan baik dengan Australia sudah dirajut pasca referendum Timor Timur tahun 1999, yang termasuk didalamnya adalah kerjasama mencegah imigran gelap. Tetapi penjelasan pemerintah Australia enteng saja. Pemberian visa wewenang pihak imigrasi, demikian majalah berita tersebut menulis.

Selain itu, *Tempo* juga menurunkan berita soal usulan revisi RUU Perburuhan yang menyulut amarah para buruh. Reaksi buruh bukan saja terjadi di Ibukota Jakarta, melainkan hampir di seluruh penjuru negeri. Benarkah demo-demo tersebut memperjuangkan nasib buruh? Atau ada agenda lain di balik punggung kaum buruh? Demikan *Tempo* menulis.

Majalah ***Forum***, edisi *2 April 2006*, justru menulis laporan utamanya tentang lika-liku menilep dana bencana. Ternyata keterpurukan Aceh pasca tsunami dan perang masih harus ditambah lagi dengan sejumlah penyelewengan yang dilakukan oleh lembaga pendonor dan LSM pada proyek relokasi pembangunan Aceh. *Forum* mengungkap, paling banyak penyelewengan tersebut soal tender material rumah. Berita lainnya adalah, kasus Abepura. Ada tudingan kasus kerusuhan yang menewaskan tiga polisi dan satu tentara tersebut telah direncanakan. '*Ada Makar di Papua?* demikian tulis *Forum*. Masalah carut marutnya penerimaan CPNS juga menjadi pilihan majalah tersebut.

Majalah ***Investor***, edisi *April 2006* menulis, terjadi perang terbuka antara Indofood vs Wingsfood. Dominasi Indofood di pasar mi instant mulai terkikis. Kemunculan Wingsfood sebagai pesaing tampaknya tak dapat dianggap main-main. Terbukti, pasar si Raja Mi itu merosot hingga lebih dari 15 persen dalam tiga tahun terakhir. Berita yang tak kalah menarik adalah, dalam rubrik Investama yang mengupas *Bisnis Gurih dari Perut Bumi*. Bisnis pertambangan umum di Indonesia menjanjikan margin keuntungan sangat tinggi. Walau investasi baru cenderung melempem, gurihnya bisnis ini tak pernah sirna, demikian majalah *Investor* menulisnya.

Majalah ***SWA*** *Sembada*, edisi 5 April 2006, menulis tentang Indonesian Customer Loyalty Index, Menjaga Pelanggan Agar Tetap Setia. *Swa* mengupas masalah tersebut karena banyak juga pelanggan yang mengaku puas terhadap suatu merek, tapi tetap beralih ke merek lain. Rupanya sekedar memuaskan pelanggan belumlah cukup di era hiperkompetitif seperti sekarang. Pemasar yang sukses perlu membangun dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Untuk itu perusahaan terus berebut kesetiaan pelanggannya. ■ SB

Izin yang Membelok

Global TV menyalahi perizinan awalnya. Perizinan televisi akan dievaluasi.

Beberapa waktu belakangan ini, Gubernur Lemhanas Muladi terpaksa meluangkan waktunya untuk memelototi siaran televisi secara khusus. Hanya satu stasiun televisi yang dia tonton: *Global TV*. Pasalnya, saat ini stasiun televisi tersebut punya masalah dengan penyimpangan perizinan. Dan Muladi dikait-kaitkan, karena saat masih menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) termasuk yang memberikan 'dukungan.'

Seiring dengan rencana pemerintah membereskan kanal frekuensi televisi, kasus *Global TV* terungkap dan diekspos media massa. Rupanya, dalam proposalnya ketika diajukan, televisi ini dirancang untuk siaran pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan sumber daya manusia.

Majalah *Gatra*, 11 Maret 2006, mengupas kasus ini dalam rubrik Nasionalnya. Dilaporkan majalah tersebut, Muladi mengakui menulis surat selaku Mensesneg kepada Presiden B.J. Habibie. Bunyinya antara lain: "....diberitahukan bahwa Bapak Presiden memberikan petunjuk agar Saudara Menteri dapat membantu pemberian frekuensi "*Global TV*."

Menurut majalah ini, ada empat menteri yang dituju: Menko Polkam, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Perhubungan dan Menteri Penerangan (Deppen).

Yang pertama kali menghembuskan masalah ini adalah Permadi, anggota Fraksi PDIP DPR, dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, 27 Februari lalu. Menurut Permadi, hanya sebulan setelah surat Muladi, izin Deppen buat "*Global TV* turun. Tanggung jawab surat Muladi, menurut Permadi, kian serius karena kepemilikan dan visi tayangan *Global TV* bergeser.

Anggota DPR Fraksi PAN, Djoko Susilo, menilai surat Muladi mengandung kolusi. Pasalnya, proposal *Global TV* dikelola oleh orang-orang dekat B.J. Habibie di ICMI. IIFTIHAR (International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources Development) sebagai pengusul *Global TV*, diketuai Habibie dengan Sekjen Zuhal, Menristek di masa pemerintahan Habibie.

Selain adanya kejanggalan itu, gara-gara *Global TV* memakai 'katebelece', TV Muhammadiyah gagal memperoleh izin, sebab jatah televisi dakwah dan pendidikan yang diusung TV Muhammadiyah telah disabel *Global TV*.

Alih Kepemilikan

Sebenarnya, Muladi sendiri mengaku kecewa setelah ia memperhatikan tayangan *Global TV* tersebut. Dengan kata lain, Muladi merasa kecele. Ketika menulis surat 'dukungan' itu, semata-mata niatnya mendukung program yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktanya, stasiun televisi itu kini malah menjadi stasiun televisi hiburan. "Kalau sudah melenceng dari *basic agreement*, dicabut saja," ujar Muladi lugas.

Para anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyorot indikasi peralihan kepemilikan stasiun televisi itu. Tampaknya, pergeseran visi siaran itu terkait dengan peralihan kepemilikan saham, PT Global Informasi Bermutu (IIFTIHAR memegang 80 persen saham) sebagai dari pemegang izin prinsip kepada PT Bimantara Citra Tbk, yang akhirnya menjadi pemilik saham 70 persen.

Koran Tempo, 1 Maret 2006, menjadikan berita ini sebagai *headline* dengan judul "Izin Global TV Langgar Aturan."

Menurut pihak Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, pemindahan izin prinsip itu melanggar aturan. Melalui juru bicaranya, Gatot S. Dewabroto, izin prinsip tidak boleh dipindahtangankan kecuali ada izin dari Menteri Penerangan. Nyatanya, ketika dikonfirmasi, mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengaku tidak pernah menerima dan membaca surat dari Mensesneg Muladi.

Dalam salah satu pasal UU No. 24/1997 tentang Penyiaran disebutkan izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan. Salah satu sanksinta adalah pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Direktur Bimantara Citra, Edwin Kawilarang, membantah pihaknya melanggar aturan itu. Menurutnya, izin penyiaran Global TV masih dimiliki PT Global Informasi Bermutu. Yang berubah hanya kepemilikan saham. ■

Puteri yang Menyingkap Kegelapan

Pemikirannya yang progresif tentang rasionalisme dan pembebasan hak-hak perempuan serta pribumi mampu membuka zaman baru bagi Indonesia.

"Jika saja masih anak-anak ketika kata 'emansipasi' belum ada bunyinya, belum berarti lagi bagi pendengaran saya, karangan dan kitab-kitab tentang kebangunan kaum putri masih jauh dari angan-angan saja, tetapi di kala itu telah hidup di dalam hati sanubari saya satu keinginan yang kian lama kian kuat, ialah keinginan akan bebas, merdeka, berdiri sendiri."

(Surat Kartini kepada Estelle 'Stella' Zeehandelaar, 25 Mei 1899)

Jepara, Jawa Tengah, 1903. Perempuan berparas ayu itu mengajukan syarat kepada lelaki yang meminangnya. Tidak ada upacara berlutut dan menyembah kaki mempelai pria dan ia akan berbahasa Jawa *ngoko* dengan suaminya. Syarat yang terlampau radikal bagi masa itu.

Lelaki itu, Bupati Rembang Raden Mas Adipati Aryo Djojo Adhiningrat menyetujuinya. Maka, 11 November 1903, sang bupati menikahi perempuan itu sebagai isteri keempat.

Perempuan ayu yang berpikiran maju itu, Raden Ajeng Kartini, dilahirkan pada 21 April 1879 di Mayong bagian Jepara, anak perempuan kedua dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Ia anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, Bupati Demak, termasuk orang yang mula-mula mengecap peradaban Barat dan diangkat menjadi bupati dalam usia 25 tahun.

Setelah menikah dengan RMAA Djojo Adhiningrat, Kartini pindah ke Rembang mengikuti suaminya. Pada 17 September 1904, Kartini meninggal di usia 25 tahun, empat hari setelah melahirkan putera pertamanya. Namun masa hidupnya yang singkat itu tidak serta merta turut menguburkan pemikiran-pemikirannya yang progresif untuk memajukan kaum perempuan di negerinya.

Di masanya, kewajiban kaum perempuan hanya bekerja untuk rumah tangga serta mengasuh anak-anaknya. Gadis-gadis dididik untuk berbakti kepada suaminya, mereka harus menyerah dalam segala perkara dan tetap harus sabar.

Kartini yang berpikiran moderen ingin memajukan kaumnya melalui jalan pendidikan. Ia menulis kepada salah seorang sahabat penanya, Nyonya Van Kool, Agustus 1091: "Alangkah besar bedanya bagi masyarakat di negeriku bila kaum perempuan dididik baik-baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya."

RADEN AJENG KARTINI: Memperjuangkan pembebasan hak-hak perempuan serta pribumi.

Untungnya, suaminya mengerti keinginan Kartini. Ia diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka.

Kemoderatannya tercermin pula dalam pergaulannya dengan keluarga. Ia berusaha mengubah adat istiadat yang lama.

Bahasa Jawa yang digunakan sehari-hari di masa itu memiliki tingkatan-tingkatan dari *kromo inggil* (halus) sampai *ngoko* (sejajar). Terhadap keluarganya yang lebih tua, Kartini masih menggunakan bahasa *kromo inggil* bila bercakap-cakap. Tetapi ia tidak memperbolehkan adik-adiknya mengikuti tata cara itu.

Pergaulannya dilakukan setara dengan orang kebanyakan yang dianggap lebih bersahabat. Menurutnya, cara demikianlah yang dapat menimbulkan pertalian yang teguh dan hubungan yang erat sebagai bahasa persaudaraan setara.

Meski ia seorang bangsawan, tetapi Kartini tidak terpengaruh pada kebangsawanannya.

"Bagi saya ada dua macam bangsawan, ialah bangsawan fikiran dan bangsawan budi. Tidaklah yang lebih gila dan bodoh menurut pendapat saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya." Demikian suratnya kepada Stella, 18 Agustus 1899.

Semangat kesetaraan

Surat-surat Kartini yang kemudian hari dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul "*Door Duisternis Tot Licht*" oleh Mr. J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda, yang merupakan sahabat Kartini. Pujangga Baru Armijn Pane kemudian menerjemahkan dengan judul "Habis Gelap Terbitlah Terang: Buah Pikiran."

Pada perkenalan dengan Estelle"'Stella' Zeehandelaar, Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia

mempertanyakan mengapa kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami.

Ia juga mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah dan tersedia untuk dimadu pula.

Namun meski demikian, ia sangat yakin bahwa akan tiba zaman di mana pemahaman agama mempunyai perspektif keadilan pada perempuan sebagaimana akan tiba zaman baru, yaitu pembebasan hak-hak dasar perempuan dari kungkungan adat dan keadilan bagi kaum pribumi. Menurut Kartini, Islam memberi ajaran yang baik, tetapi telah dinodai pemeluknya yang tidak tahu ajaran Islam yang suci dan menjadikan agama sebagai topeng perbuatannya.

Persoalan yang ia gugat merupakan persoalan yang harus terus diperjuangkan kalangan agama sampai sekarang. Karena agama merupakan unsur utama pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai tradisi di masyarakat.

RA Kartini, puteri Bupati Jepara itu, telah menyuarakan rekonstruksi terhadap ajaran agama yang menindas kaum perempuan pada zamannya, jauh sebelum gagasan-gagasan rekonstruksi ajaran agama yang berkeadilan pada perempuan disuarakan oleh para cendekiawan muslimah Aminah Wadud Hasim, Fatima Mernissi, Asghaar Eli Engineer, Rifaat Hasan, pada era 1980-an dan 1990-an. ■

RH /dari berbagai sumber

Aku Mau Kesetaraan

"Aku dijuluki 'kuda kore' atau kuda liar karena jarang sekali berjalan tetapi pecicilan. Dan mereka memanggilku apalagi ya? Aku sering tertawa keras-keras, hingga gigiku kelihatan."

Suatu kenangan yang tak akan hilang bagi sebagian besar kaum perempuan Indonesia saat mereka masih duduk di sekolah dasar, mengenakan kebaya Kartini dan konde besar di kepala, berjalan perlahan-lahan dituntun ibunda menuju sekolah. Entah kenapa, Hari Kartini yang jatuh pada 21 April selalu diperingati sekolah-sekolah dengan dengan lomba busana kebaya"mirip Ibu Kartini', sementara alunan musik mengumandangkan lagu "Ibu Kita Kartini."

Sayang sekali, hanya sebatas itu sosialisasi tentang pelopor semangat kesetaraan bagi perempuan pribumi itu. Banyak yang belum pernah membaca buah pikirannya yang terangkum dalam buku *"Habis Gelap Terbitlah Terang."* Padahal, di negeri Belanda, buku yang judul aslinya adalah *"Door Duisternis Tot Licht"* banyak dibaca berbagai kalangan. Menjadi suatu pengetahuan umum yang wajib diketahui.

Selain mengundang decak kagum banyak kalangan di berbagai negeri, surat-surat Kartini juga mengundang gugatan dan perdebatan. Gugatan-gugatan itu diantaranya ditujukan pada konsistensi apa yang ia kritik dan perjuangkan. Kartini dianggap mengkhianati perjuangannya sendiri dengan "menerima" poligami.

Kartini telah membayangkan peristiwa yang akan menimpanya itu. "... pasti tiba, saat di mana aku akan disandingkan dengan seorang suami yang belum kukenal. Di Jawa, cinta hanyalah sebuah khayalan.... Beradab, orang Jawa yang sangat beradab bisa dihitung dengan jari, tapi budaya dan pendidikan belum diperhitungkan dalam hal immoralitas. Carilah dan mintalah sesuatu dari dunia aristokrasi laki-laki itu tapi bukan ini, moralitas, karena akan sia-sia. ... Aku benci, aku memandang rendah mereka semua, ..."

Pada pertengahan tahun 1903, saat berusia sekitar 24 tahun, niatnya untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkap ia mengurungkan niatnya karena akan menikah.

Kartini yang gemar membaca menjadikan majalah dan buku-buku karya pengarang Eropa sebagai santapan sehari-hari yang mengilhaminya agar kaum perempuan pribumi juga semaju perempuan Eropa.

"Aku Mau ..." adalah motto Kartini. Sepenggal ungkapan itu mewakili sosoknya. Kartini yang cerdas bisa berbicara tentang banyak hal: sosial, budaya, agama, bahkan korupsi.

Sesungguhnya, perkawinan dan poligami tidak menenggelamkan cita-citanya. Pada saat menjelang pernikahan, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu. Dalam surat-suratnya kemudian, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputra saja, tetapi juga mendorong Kartini untuk menulis sebuah buku. RH

Seekor Macan Untuk Wilhelmina

Kartini yang menghidupkan seni ukir Jepara. Ia juga pandai membatik, melukis dan menguasai seni kuliner.

Seekor macan mendekam dalam sebuah kandang berjeruji. Ditemani sebuah bola, ia tampak kesepian. Di atasnya, seekor merpati tengah mematuk makanan. Bebas, tak terpenjara seperti sang macan.

Adegan itu bukan sungguhan. Melainkan sebuah fragmen patung dari kayu jati. Patung semacam itu hanya ada di Jepara, Jawa Tengah. Meski kini amat langka karena sudah jarang orang memesan.

Kartinilah yang menciptakan patung itu dan menamainya—'Macan Kurung.' Ia pertama kali meminta seorang seniman ukir Jepara bernama Singo Wiryo untuk membuatnya. Patung-patung itu kemudian dihadiahkannya kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Bahkan, Ratu Wilhelmina pun pernah dihadiahinya macan kurung. Ia juga menciptakan beberapa motif ukir lainnya, misalnya motif *lung-lungan* bunga.

Seakan tak cukup kata menggambarkan kecerdasan sosok sang puteri Jepara bernama Raden Ajeng Kartini. Begitu banyak sisi lain dirinya yang belum terungkap. Di balik pemikirannya soal kesetaraan gender yang menggebu-gebu dan terlampau maju di zamannya, ternyata tersimpan pula bakat seni yang begitu besar.

Jiwa seninya itu, seperti ditulis—*Koran Tempo*, 9 April 2006, yang mendorongnya menghidupkan kembali seni ukir di daerah Belakang Gunung, dua kilometer ke arah utara dari Pendopo Kabupaten Jepara. Sejak itu, Jepara dikenal sebagai kota ukir hingga sekarang.

KARTINI, KARDINAH DAN RUKMINI: Tiga puteri yang turut menghidupkan seni Jepara.

Kartini dan kedua adiknya, Kardinah dan Rukmini, juga pandai membatik. Mereka pernah mengirim hasil karyanya ke Pameran Karya Wanita di Den Haag, 1898. Terinspirasi oleh batik Kartini, pada tahun itu pula di Batavia dibentuk Oost en West, lembaga yang bertujuan menghidupkan kembali kerajinan tangan Hindia Belanda.

Museum Nasional Jakarta saat ini menyimpan batik karya Kartini yang belum selesai, yang dikerjakannya setelah menikah dan ditampilkan pada pameran tekstil, 20 April lalu.

Tahun 1964, RA Kardinah menyerahkan tiga lukisan karya mereka untuk Museum Sejarah Tugu Nasional. Lukisan Kartini menggambarkan kolam dengan dua bunga teratai, satu mekar dan satu kuncup. Sayangnya, pasca peristiwa G 30 S/PKI, lukisan itu lenyap.

Pandai memasak

Satu lagi yang belum banyak diketahui orang adalah kepandaian Kartini memasak. Adalah Suryatini N. Ganie, seorang cucu dari saudara seayah Kartini, yang menerbitkan buku *Kisah dan Kumpulan Resep Puteri Jepara,* yang diluncurkan 2005.

Buku itu bukan buku biasa, melainkan berisi rahasia kuliner RA Kartini. Ia dan kedua adiknya, Kardinah dan Rukmini gemar mengolah berbagai santapan lezat. Setiap ada kesempatan, mereka mencoba berbagai resep. Kartini mahir memasak makanan Cina, Arab dan Eropa. Makanan kesukaannya adalah kue *soesjes* (sus) dan selat usar, yakni salad dari sayuran yang disiram dengan saus seperti mayones.

Sebelum meninggal, Kartini memang pernah mengungkapkan keinginan menerbitkan resep keluarganya. RA Kardinah yang pertama kali mewujudkannya dengan menerbitkan buku resep *Lajang Panoentoen Bab Olah-olah,* 1918.

Resep-resep itu ternyata tak ketinggalan zaman meski sudah berusia ratusan tahun. Ayam goreng *glepung gandoem*, misalnya, sekarang dikenal sebagai ayam goreng tepung. Seperti yang dijual di restoran cepat saji berlabel *fried chicken.* ■ RH

Sebuah Kontroversi

Ada kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Ada dugaan J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan saat itu, merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda, dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis.

Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Jejak keturunan J.H. Abendanon pun sukar untuk dilacak Pemerintah Belanda.

Penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga agak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui, mengusulkan agar tidak hanya merayakan Hari Kartini saja, namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya, yang tidak kalah hebat dengan Kartini.

Mereka yang pro malah mengatakan Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional. Cara pikirnya sudah melingkupi perjuangan nasional. ■ RH

Bukan Perempuan Biasa

Kartini melihat perjuangan kaumnya agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas.

Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (*Europese Lagere School*). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, yang saat itu berada pada status sosial yang rendah.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang *De Locomotief* yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima *leestrommel* (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda *De Hollandsche Lelie*. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di *De Hollandsche Lelie*.

Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas.

PEREMPUAN MASA KINI: turut beraktualisasi pada berbagai posisi elit, di lingkungan sipil, militer, politik dan nonpolitik.

Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul *Max Havelaar* dan *Surat-Surat Cinta* karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu *De Stille Kraacht* (*Kekuatan Gaib*) karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt yang sedang-sedang saja, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, *Die Waffen Nieder* (*Letakkan Senjata*). Semuanya berbahasa Belanda.

Eksistensi perempuan

Tahun-tahun melelahkan saat kesetaraan gender diperjuangkan terbayar sudah. Ketika Megawati Soekarnoputeri terpilih sebagai presiden, itu sesungguhnya kemenangan bagi kaum perempuan Indonesia. Megawati adalah simbol eksistensi perempuan Indonesia di mata dunia internasional.

Sesungguhnya tidak hanya Megawati yang menjadi simbol emansipasi perempuan Indonesia. Kini, posisi perempuan sudah relatif sejajar dengan kaum laki-laki, terutama dalam segi pendidikan dan akses pada ruang publik. Perempuan berangsur meninggalkan ruang domestiknya untuk turut beraktualisasi di ranah publik, yang semula merupakan domain kaum laki-laki. Perempuan turut beraktualisasi pada berbagai posisi elit, di lingkungan sipil atau militer, politik atau nonpolitik.

Namun demikian tidak mudah mengubah persepsi patriarkis yang ada. Masih banyak ketidakadilan dan ketimpangan yang dirasakan kaum perempuan di ranah publik. Perempuan seringkali masih menempati posisi nomor dua. Kekerasan rumah tangga yang terus terjadi misalnya, merupakan salah satu bukti. Di dunia kerja pun perempuan seringkali dipandang sebelah mata. Tampaknya, perjuangan Kartini belum selesai. ■ RH

Dewi dari Tanah Sunda

Delapan tahun setelah kelahiran anak kelima Bupati Jepara RMAA Sosroningrat, Raden Ajeng Kartini, seorang puteri bangsawan Priangan lahir dari pasangan Raden Rangga Somanegara dan Raden Ayu Raja Permas. Ia dinamai Raden Dewi Sartika.

Hari itu, 4 Desember 1887, menandai kebangkitan kaum perempuan di tanah Sunda, seperti halnya yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini bagi perempuan Jawa.

Seperti halnya Kartini, Dewi Sartika meyakini bahwa pendidikan menjadi sarana yang meniscayakan kesejajaran posisi laki-laki perempuan dalam ruang sosial.

Setelah berkonsultasi dengan Bupati R.A. Martenagara, pada 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan Sakola Istri. Tenaga pengajarnya ia sendiri dibantu dua saudara misannya, Nyi Poerwa dan Nyi Oewid. Untuk sementara tempat belajar meminjam ruangan di Paseban Barat di halaman depan rumah Bupati Bandung.

Murid yang diterima untuk kali pertama yakni 60 siswi, yang sebagian besar berasal dari masyarakat kebanyakan. Pada 1905, sekolah tersebut pindah ke Jalan Ciguriang-Kebon Cau karena ruangan tak mampu lagi menampung jumlah siswi yang bertambah. Lokasi baru ini dibeli Dewi Sartika dengan uang tabungan pribadinya, serta bantuan dana pribadi dari Bupati Bandung.

Setelah menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suriawinata pada 1906 yang juga turut mendukung dan membantu dalam memajukan sekolah yang didirikannya, pada 1910 Dewi Sartika mengubah *Sakola Istri* menjadi *Sakola Kaoetamaan Istri*, dengan jangkauan lebih luas bahkan dari luar Jawa Barat.

Dewi Sartika meninggal 11 September 1947 dan dimakamkan dengan upacara sederhana di pemakaman Cigagadon-Desa Rahayu Kecamatan Cineam. Tiga tahun kemudian dimakamkan kembali di kompleks Pemakaman Bupati Bandung, Jalan Karang Anyar, Bandung. ■ RH

Wajah Baru Untuk Jilah

Mukanya sedikit berubah ketika dr Sjaifuddin menunjukkan wajah di monitor. Dia langsung menghela napas panjang, sambil sesekali menghapus airmata. Siti Nur Jazilah menangis.

Tiga tahun lamanya ia tak lagi bercermin sejak peristiwa mengerikan itu terjadi. Wajahnya tak menyisakan kecantikan yang pernah dimilikinya. Ia menyadari itu sehingga cermin menjadi benda paling menakutkan dalam hidupnya kemudian. Siti Nur Jazilah, 22, menjadi contoh bagi siapa saja betapa banyak perempuan yang masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, mempublikasikan kisah perempuan malang itu setiap hari. Harian *Indo Pos* yang paling intensif memberitakan, bahkan menelusuri asal-usul, hingga menemukan kakek-neneknya dan ayahnya yang sudah lama terpisah darinya. Bahkan, berkat penelusuran harian ini, polisi berhasil mengembangkan kasus penganiayaan terhadap perempuan yang awalnya disamarkan namanya menjadi Lisa. Adalah Mulyono Eko, suami Lisa, yang menyiramkan air keras ke wajahnya sehingga menjadi seperti itu. Saat ini, lelaki itu telah menjadi tersangka dan mendekam di sel tahanan.

Hari-hari menjelang operasi Lisa adalah hari yang paling ditunggu. Berbagai media mengulas persiapan yang dilakukan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya.

Media Indonesia, 29 Maret 2006 mengetengahkan judul "Saya Ingin Menjadi Manusia Baru." Menurut harian ini, sejarah kembali tercatat di Indonesia. Rumah Sakit Umum Dr Soetomo Surabaya melakukan *gawe* besar dengan menggelar operasi mengganti wajah (*face off*) pertama di Indonesia.

SITI NUR JAZILAH

Hingga operasi yang disebut operasi *face off* itu dilakukan, tidak ada informasi siapa pelakunya itu dan kenapa dia menyiram wajah Lisa dengan air keras. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Lisa. Bahkan Dr Nalini, psikiater yang selalu mendampinginya, tidak berhasil mengoreknya.

Aksi tutup mulut Lisa tentu memancing rasa penasaran. Begitu pula halnya dengan petugas polisi, karena jika penyiraman air keras itu dilakukan dengan sengaja, maka itu adalah suatu tindak pidana yang tidak bisa dibiarkan. Dimulailah pelacakan keluarga Lisa oleh berbagai media.

Lagi-lagi *Indo Pos* berhasil melaporkan lebih intensif. Dalam terbitannya 30 Maret 2006, mereka berhasil melacak keluarga Lisa. Alamat di Malang diburu. Di salah satu desa sekitar 40 kilometer dari kota Malang, Lisa dirawat sejak kecil. Di sana sebuah rumah sangat sederhana berukuran sekitar 5m x 8m, tinggal pasangan suami istri yang sudah renta, Samsuri Kusnoto, 65, dan Wakinah, 60. Mereka itu kakek nenek Lisa.

Ketika didatangi wartawan harian ini dan diberitahu bahwa foto yang dimuat di koran itu Lisa (wartawan koran ini menunjukkan foto Lisa di koran kepada Samsuri dan Wakinah), Wakinah langsung menangis. "Jilah (nama kecil Lisa-*Red*) sejak tiga setengah tahun lalu meninggalkan rumah ini," kata nenek 60 tahun itu dengan bahasa Jawa *kromo inggil*. Sejak itulah, Wakinah tak pernah bertemu dengan cucu kesayangannya itu.

Dari cerita Wakinah dan Samsuri, kedua orangtua Lisa bercerai sejak 10 tahun lalu. "Lisa itu sekolahnya tidak sampai lulus madrasah tsanawiyah (setingkat SMP)," kata Samsuri dikutip *Indo Pos*.

Lisa alias Jilah adalah anak kedua dari pasangan Siti Zulaikah-Saring. Sejak kecil, Lisa tinggal bersama orangtua ibunya. Rupanya, nasib Lisa tidak semujur teman-teman sebayanya. Karena kendala ekonomi, Siti Zulaikah terpaksa pergi meninggalkan Lisa ketika Lisa berumur tiga tahun. Siti merantau ke arab Saudi, menjadi TKW.

Sementara itu, ayah Jilah, Saring, baru mengetahui perihal anaknya setelah membaca berbagai koran yang ditunjukkan tetangga dan kerabatnya. Semula dia tidak percaya karena wajah anaknya sulit dikenali lagi. Dia baru percaya setelah melihat foto anaknya sebelum kecelakaan ditampilkan di koran.

Seperti diberitakan *Kompas*, 1 April 2006, ia mengaku sudah lama kehilangan kontak dengan anaknya yang terakhir diketahuinya pergi ke Kalimantan.

Masa lalu terungkap

Lisa datang ke Rumah Sakit Dr Sutomo karena ia kesulitan bernapas. Salah satu lubang hidupnya tertutup kulit yang

Operasi *face off*: Hari bersejarah untuk Lisa.

SITI NUR JAZILAH: Ingin menjadi manusia baru.

meleleh akibat air keras itu. Dokter menawarinya operasi wajah dan ia setuju.

Sejak itu, orang mulai penasaran dengan jati dirinya. Masa lalu Lisa yang akhirnya terungkap ternyata sungguh gelap. Ia adalah korban calo jual beli perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Lisa yang saat itu berumur 15 tahun dijanjikan bekerja di restoran, namun ternyata dijual kepada germo di lokalisasi Bangun Rejo seharga satu juta rupiah. Harga yang cukup mahal karena Lisa masih perawan.

Di sanalah ia bertemu Mulyono sebagai salah satu langganannya. Mereka jatuh cinta dan Mulyono menikahinya dengan janji akan mengentaskan Lisa dari lembah hitam itu. Namun alangkah kecewanya Lisa, karena setelah menikah Mulyono malah membuka rumah bordil dan mempekerjakan dirinya sebagai PSK seperti semula.

Dari berbagai keterangan yang dikumpulkan media, perangai Mulyono sangat buruk. Mulyono yang sebenarnya sudah punya isteri sebelum menikahi Lisa, dikenal doyan gonta-ganti perempuan dan pergi ke lokalisasi. Ia juga kerap kasar dan memukuli isterinya. Lisa tak tahan lagi dan memutuskan lari ke Kalimantan. Itulah awal tragedi yang menimpa Lisa.

Ketika Lisa sedang berjuang melewati masa-masa sulitnya pascaoperasi wajah total (*face off*), polisi mencari orang yang tega membuat sengsara perempuan itu.

"Kami sedang mencari pelaku yang menjual Lisa sebagai pelacur. Juga yang menyiram wajahnya dengan air keras hingga rusak seperti itu," kata Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Mujiyono, dikutip *Indo Pos*.

Mulyono yang selama ini mengaku tidak tahu siapa pelaku pengrusakan wajah isterinya mulai dibidik.

Akhirnya, ia mengaku sebagai pelaku penyiraman air keras ke wajah istrinya. Penyiraman air keras itu dilakukan di rumahnya di Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, ia juga mengaku telah memalsukan surat nikahnya dengan korban.

Atas perbuatannya itu pelaku dikenai Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman paling sedikit lima tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara serta denda 500 juta. Adapun untuk kasus pemalsuan buku nikah, tersangka dikenai Pasal 263 KUHP.

Kasus penyiraman air keras itu terungkap setelah polisi mendapatkan keterangan dari teman korban saat bekerja di Pontianak. Lisa sempat menelepon saksi dan mengaku suaminya tega menyiram air keras ke wajahnya.

Kata Mulyono, peristiwa itu terjadi September 2004. Tindakan keji itu dilakukan sekitar pukul delapan pagi. Malamnya, mereka baru pulang dari Pontianak. Setelah dua tahun mencari, Mulyono akhirnya berhasil menemukan Lisa yang meninggalkannya.

Setelah berhasil menjemput Lisa dari Pontianak, Mulyono membawanya ke Pasuruan. Namun, wanita 22 tahun itu terus memberontak. Berkali-kali dia mengancam akan meninggalkan Mulyono. "Pagi itu karena jengkel, saya siram wajahnya dengan air keras," aku Mulyono. Ia berharap setelah disiram dengan air keras, isterinya tidak akan pergi meninggalkannya.

Sehari setelah tragedi penyiraman air keras itu, wajah Lisa langsung melepuh. "Baru dua hari setelahnya, kulitnya menjadi tidak karu-karuan. Semakin lama semakin *nglembreh*...," tutur pria belakangan mengaku menyesali perbuatannya itu.

Apa saja aktivitas Lisa setelah tragedi penyiraman air keras itu? menurut Mulyono, Lisa lebih banyak mengurung diri di kamar.""Kalau keluar, dia memakai cadar. Sehari-hari dia bermain-main dengan kucing-kucingnya," jelasnya. Lisa punya 12 ekor kucing. Semuanya dirawatnya dengan baik. ■ RH, DA

RISALAH OPERASI CANGKOK WAJAH DI DUNIA

1994 Dokter India mencangkokkan lagi wajah S. Kaur yang dihancurkan masin giling.

1997 Tim dokter di Victoria, Australia, memasang kembali kulit wajah yang dihancurkan mesin giling.

2005 Profesor Jean-Michel Dubernard dan Profesor Bernard Devauchelle melakukan operasi memindahkan mulut dan hidung mayat kepada orang yang wajahnya hancur digigit anjing. Ini untuk pertama kalinya transplantasi wajah dari donor.

PROSEDUR *FACE OFF* LISA

1. Wajah resipien yang rusak diangkat hingga sekitar tulang, kemudian ditempeli lapisan kulit punggung
2. Bahan kulit wajah diambil dari punggung pasien, karena memiliki dua pembuluh darah arteri yang mudah disambungkan dengan pembuluh darah di wajah serta leher, lebih mudah dalam membentuk wajah pasien
3. Skin grafting (penutupan luka) pada kulit bagian leher yang ikut rusak akibat tersiram air keras dengan mengambil kulit perut bagian bawah
4. Kulit paha digunakan untuk meneutup cacat di punggung. Sebab, kulit paha mudah melakukan regenerasi
5. Merapikan jahitan. Wajah baru akan ditata sesuai dengan kontur wajah dan foto sebelum kecelakaan terjadi
6. Memerban wajah
7. Selama 24 jam dilakukan pemantauan sambungan dua pembuluh darah. Jika terjadi trombosis (penyumbatan), akan dilakukan anostomosis (penyambungan) ulang.

Gangguan Roh Halus atau Kejiwaan?

Fenomena kesurupan tidak mengenal tempat. Kesurupan bisa berpindah dari satu ke lain kota.

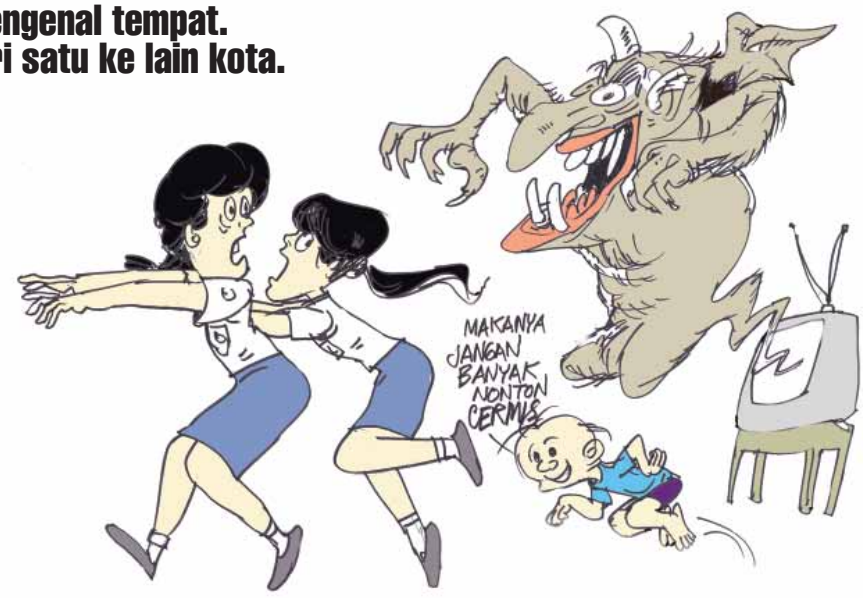

Jeritan dan ocehan aneh Fitri mengusik seluruh pekerja unit giling pabrik rokok kretek Bentoel, Malang. Fitri pagi itu (22/3) baru saja memulai kegiatannya, tatkala mendengar alunan tembang kuda lumping yang menggema ke dalam pabrik. Rupanya, Fitri tersugesti karena di kampungnya dia pemain kuda lumping.

Fitri kesurupan, berteriak dan mengoceh terus menerus. Rekan-rekan sekerja yang ingin menolongnya malah tertular "penyakit" kesurupan. Kesurupan menyebar laksana api yang tersiram bensin, menimpa tak kurang dari 30 pekerja lainnya.

Sebelum merambah ke Malang, kesurupan terlebih dulu mengguncang para pelajar SMP dan SMA di Surabaya. Ketika kembali ke kelas usai jam istirahat, tiba-tiba saja Nikita, pelajar kelas IIE SMPN 29 Surabaya (20/3), berteriak: "pergi...pergi." Pandangan siswi berkacamata itu garang, tetapi tubuhnya lemas, duduk menunduk. Seisi kelas panik, heboh. Para siswa perempuan ketakutan, karena biasanya Nikita tak pernah berprilaku aneh seperti itu.

Nikita diangkat bersama-sama oleh teman-temannya ke ruang UKS. Tiba-tiba dia meronta, kekuatannya luar biasa, padahal dia siswi yang lemah. "Kami heran kenapa dia bisa sekuat itu," kata Dimas (12), teman sekelas Nikita.

Seisi kelas kembali panik. Tia mendadak terkulai lemas. Merintih sembari memegang dadanya yang terasa sangat sakit. Ketika dibawa ke ruang UKS, Tia juga meronta seperti Nikita. Menyusul, Rizam Silvi dan Loren. Ruang kelas IIE siang itu berubah gaduh. Para pelajar lainnya lari meninggalkan kelas.

Keesokan harinya, kerasukan massal terjadi lagi. Banyak murid yang berteriak tidak karuan. Mereka yang kesurupan, para siswi yang mengalami trauma hari kemarin.

Hari berikutnya, Drs. HM Miftah, kepala sekolah, mengajak semua siswa yang beragama Islam menunaikan shalat istigosah di halaman sekolah. Maksudnya untuk mengusir roh halus.

Keanehan itu, menurut Mifrah, tak bisa dipisahkan dari kejadian beberapa hari sebelumnya, seorang petugas memangkas ranting pohon di belakang sekolah. "Para mahluk halus merasa terusik dan marah," kata Miftah.

Shalat istigosah dipimpin oleh Sutrisno, salah seorang anggota tim Pemburu Hantu yang jadi langganan tayangan stasiun TV Lativi. Pada saat shalat, 20 siswi kerasukan serempak. Ini dipercaya oleh Miftah sebagai gangguan roh halus. Sutrisno membenarkan. Usai shalat istigosah, para roh halus meninggalkan SMP 29 dan tidak kembali lagi.

Nikita yang pertama diserang kerasukan mengaku, ketika berjalan masuk ke kelas, dia merasa seseorang membuntutinya. Setelah Nikita masuk kelas, sosok itu memeluknya kuat sekali sehingga sulit bergerak. Kemudian, dia tidak ingat apa-apa lagi.

Pertengahan Maret, kesurupan massal menimpa murid-murid SMAN 10 Surabaya. Belasan siswi kerasukan yang berpuncak pada hari Rabu dan Kamis (15-16/3). Mereka berteriak atau menyanyi lagu-lagu Jawa. Kejadian tersebut sudah berjalan tiga minggu berturut-turut. Sepertinya di sekolah itu, tiada hari tanpa kesurupan, meskipun hanya satu atau dua siswi. Dito dan teman-temannya, percaya bahwa itu gangguan para mahluk halus yang menghuni sebuah pohon di belakang sekolah. Pohon itu ditebang lantaran lokasi itu untuk kantin sekolah. Pihak sekolah buru-buru menyelenggarakan shalat istigosah. Sri Rahayu, guru di SMA 10, menuturkan pada puncak kesurupan bersama, para korban berteriak. Mereka dibawa ke ruang guru dan musala. Sebelum terjadinya kesurupan ada beberapa siswi yang selalu tampak lesu, terkadang pingsan di kelas.

Maraknya fenomena kesurupan massal di sejumlah kota, mendorong tim psikiater RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, mengadakan konferensi pers (24/3). Hadir, Prof. Hanafi, Sp.KJ, dr, Nalini M. Agung, SpKJ, dr. Marlina Wahyudin, SpKJ, dr. Fatima, SpKJ, serta dr. Didi Aryono Budiyono, Sp.KJ. Mereka menyimpulkan kesurupan massal tersebut murni persoalan kejiwaan, bukan masalah mistis atau klenik. Kata Marlina, jika korban kesurupan dirawat secara mistis, itu salah dan para korban akan bertambah.

Kesurupan, menurut Marlina, merupakan gejala disosiatif, yaitu kecemasan yang meluap hebat, tetapi ditekan oleh alam bawah sadar. Maka muncul gejolak kesurupan. Ketika seseorang mengalami hal tersebut, dia bisa berbicara dan berprilaku macam-macam.

Menurut psikiater lainnya, Nalini, korban bisa meronta-ronta, berteriak dan menangis. Terkadang kepribadian gandanya muncul ke permukaan. Orang itu tiba-tiba bisa menirukan suara orang tua, menjadi anak kecil, menirukan perilaku binatang. Bahkan ada yang tiba-tiba bisa berbahasa Cina. "Saya tidak yakin dia berbahasa China yang sebenarnya," kata Nalini. SH (Dari berbagai sumber). ■ SH

Maut yang Mengintai Kerah Biru

TBC di Indonesia menjadi penyebab kematian nomor satu untuk penyakit menular dan penyebab kematian ketiga setelah jantung dan saluran pernafasan.

Jangan biarkan gejala batuk berdahak selama tiga minggu lebih, berkeringat di malam hari tanpa beraktivitas, nyeri di dada atau sesak nafas, berat badan menurun dan batuk berdarah. Itu adalah tanda-tanda penyakit tuberkulosis (TBC atau TB).

Berita yang dilaporkan harian *Republika,* 22 Maret 2006, cukup mengejutkan. Menurut Menkes Siti Fadilah Supari, Indonesia dalam lima tahun terakhir baru mampu menurunkan angka kesakitan penyakit tuberkolosis sebanyak 15 per 100 ribu penduduk, yakni dari 122 pada tahun 2001 menjadi 107 per 100 ribu penduduk pada tahun 2005.

Hari TBC Sedunia, 24 Maret, memang sudah berlalu. Namun menyisakan kenyataan bahwa penyakit ini masih menjadi momok di negeri ini.

Peningkatan hasil yang dicapai pemerintah RI dalam menanggulangi TBC memang ada. Dari angka penemuan TBC menular pada tahun 2004 mencapai 128.981 orang (54 persen) atau meningkat menjadi 156. 508 orang (67 persen) pada 2005. Keberhasilan pengobatan TBC juga meningkat dari 86,7 persen pada tahun 2003 menjadi 88,8 persen pada tahun 2004.

Namun demikian, hal itu tidak menghapus kenyataan bahwa Indonesia menduduki urutan ketiga negara dengan jumlah penderita TBC terbesar di dunia setelah India dan China. TBC di Indonesia merupakan penyebab kematian nomor satu untuk penyakit menular dan penyebab kematian ketiga bagi penduduk karena berbagai penyakit, setelah jantung dan saluran pernafasan.

Menkes mengakui, sesuai Survei Balitbangkes bahwa setiap tahun terdapat sekitar 485 ribu penderita baru TBC, 250 ribu orang diantaranya adalah TBC menular, sedang Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memperkirakan 140.000 orang meninggal akibat TBC setiap tahun di Indonesia.

Dalam rilis pers yang dikeluarkan Departemen Kesehatan, 22 Maret 2006, Menkes mengungkapkan, sebagian besar (75%) penderita TBC adalah penduduk usia produktif antara 15-55 tahun sehingga menyebabkan gangguan ekonomi di keluarga dan menurunkan produkvifitas kerja.

PENANGGULANGAN TBC: Pemerintah menggalang kemitraan dengan lintas sektoral dan LSM untuk memberantas TBC.

Setiap tempat kerja mempunyai risiko untuk terjangkit penyakit TBC pada pekerjanya terutama pada kaum buruh (*blue collars),* karena pendidikan rendah, buruknya sanitasi perumahan pekerja, lingkungan sosial pekerja dan perusahaan. Pengusaha diharapkan berpartisipasi aktif terhadap penanggulangan TBC di tempat bekerja pada saat seleksi pekerja, kebersihan sanitasi di perusahaan, gotong royong perbaikan perumahan pekerja bekerjasama dengan Puskesmas setempat.

Program DOTS

TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *mycobacterium tuberculosis* yang sebagian besar menyerang paru-paru. Karena besarnya ancaman TBC tersebut, WHO pada tahun 1993 menetapkan kedaruratan global penyakit TBC dengan mencanangkan strategi DOTS atau pengobatan langsung jangka pendek dengan pengawasan.

Indonesia secara nasional menerapkan strategi DOTS sejak tahun 1995. Keuntungan strategi DOTS adalah metode pengobatan penderita TBC tidak lagi dengan rawat inap di rumah sakit (sanatorium), tetapi hanya dengan berobat jalan. Dengan minum Obat Anti TBC (OAT) selama 6-8 bulan secara teratur dipastikan penderita TBC sembuh, sehingga penderita tidak kehilangan waktu kerja dan tidak kehilangan produktivitasnya.

Pelaksanaan DOTS di klinik perusahaan dilakukan sebagai peran aktif dan kemitraan yang baik dari pengusaha dan masyarakat pekerja untuk meningkatkan penanggulangan TBC di tempat kerja.

Menurut Menkes, kunci sukses penanggulangan TBC adalah menemukan penderita dan mengobati mereka sampai sembuh. WHO menetapkan target *Global Case Detection* Rate (CDR) atau penemuan kasus TBC menular sebesar 70%, dan *Cure Rate* (CR) atau angka kesembuhan/keberhasilan pengobatan sebesar 85%.

Pemerintah RI menggalang kemitraan dengan lintas sektoral dan LSM untuk memberantas TBC, antara lain dengan membentuk Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan TBC (Gerdunas TBC) pada tahun 1999 serta meningkatkan akses penderita untuk mendapatkan pengobatan TBC melalui Puskesmas dan rumah sakit.■ RH

Bila Selebriti Peduli

Kalangan budayawan, seniman dan artis menjadi relawan yang berkomitmen untuk melestarikan lingkungan.

DUTA LINGKUNGAN 2006: Harus memiliki integritas dalam pelestarian lingkungan.

Si imut Tasya dengan wajah *chubby*-nya yang menggemaskan tersenyum lebar menerima jabat tangan Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar. Hari itu, (3/3), bertempat di Coffee Bross Lounge, Hotel Gran Kemang, Jakarta Selatan, penyanyi dan presenter cilik itu dinobatkan sebagai Duta Cilik Lingkungan.

Republika, 4 Maret 2006, melaporkan Rachmat Witoelar mengajak seniman peduli lingkungan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan.

Selain Tasya, Duta Lingkungan Hidup 2006 dipercayakan kepada Ahmad Dhani, pentolan grup Dewa 19 dan artis remaja Marshanda. Selain itu ada pula sejumlah artis, budayawan dan seniman.

Menteri LH mengungkapkan, pihaknya memilih kalangan tersebut sebagai duta lingkungan, karena mereka punya banyak pengaruh terhadap orang lain. Mereka memberi inspirasi bagi teman sebayanya. "Kita mencari orang yang bisa menggugah kepedulian orang lain terhadap lingkungan," katanya seperti dikutip harian tersebut.

Dalam kesempatan wawancara eksklusif dengan *Berita Indonesia*, Rachmat Witoelar kembali menekankan bahwa Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) menganggap para *public figure* itu bisa lebih efektif dalam memberikan contoh bagaimana melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat.

Duta Lingkungan Hidup 2006 dipilih berdasarkan pengamatan KLH terhadap individu-individu yang memiliki integritas dalam pelestarian lingkungan. Mereka juga dikenal secara luas dalam kehidupan masyarakat.

Maka, tidak heran jika sederet nama artis, seniman dan budayawan yang sejak lama dikenal berwawasan lingkungan dipilih KLH. Ully Sigar Rusadi, misalnya, sudah sejak lama dikenal luas sebagai penggerak pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mengoptimalkan keterlibatan kalangan budayawan, artis dan seniman ini akan dilakukan berbagai kegiatan yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat dan diliput dalam skala besar oleh media cetak maupun elektronik.

Menurut Menteri LH, kegiatan-kegiatan itu antara lain: "Dari Sekolah ke Sekolah", dengan mengajak beberapa artis mengunjungi sekolah dan memperkenalkan cara menjaga lingkungan. Selain itu ada "Kampung Sadar Lingkungan" dengan mendorong agar kampung-kampung di perkotaan tetap menjaga kelestarian lingkungannya. Pemenang Kampung Sadar Lingkungan akan diberikan penghargaan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni.

Dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KLH dan sebuah tim yang terdiri dari tokoh-tokoh seni dan budaya akan memilih karya-karya seni yang menggugah kepedulian lingkungan dari berbagai format (film, sastra, teater, tari, musik, seni rupa, dan lainnya) untuk diberi penghargaan KLH Award. ■ RH

DUTA LINGKUNGAN 2006

1. Duta Keasrian Lingkungan:
   Dewi Sandra, Mona Ratuliu, Ebiet G. Ade dan Lula Kamal yang akan bekerja sama dengan Deputi I KLH.
2. Duta Adipura:
   Dian Sastro, Djaduk Ferianto, Marcell, Katon Bagaskara, Ronald, Dina Lorenza dan Woman yang akan bekerja sama dengan Deputi II KLH.
3. Duta Lingkungan Indonesia Hijau:
   Paramitha Rusady, Nugie, Angelina Sondakh, Slank dan Titi Kamal yang akan bekerja sama dengan Deputi III KLH.
4. Duta Lingkungan Industri Hijau:
   Cornelia Agatha, Titi DJ, Andien, Maudy Koesnaedi dan Nurul Arifin yang akan bekerja sama dengan Deputi IV KLH.
5. Duta Penaatan Hukum Lingkungan:
   Radhar Panca Dahana, Iga Mawarni, Wanda Hamidah, Marissa Haque dan Rahma Sarita yang akan bekerja sama dengan Deputi V KLH.
6. Duta Lingkungan Masyarakat Madani:
   Ratih Sang, Ray Sahetapy, AB. Three, Ayu Utami, dan Nani Widjaya yang akan bekerja sama dengan Deputi VI KLH.
7. Duta Insan Berwawasan Lingkungan:
   Rieke Dyah Pitaloka, Butet Kertarajasa, Dick Doang, Kak Seto, Valerina Daniel, dan Dessy Ratnasari akan bekerja sama dengan Deputi VII KLH.

بسم الله الرحمن الرحيم

M. Roem Rowi
(Alumni)
Pengelola Masjid Al-Akbar,
Yayasan Masjid Al-Falah dan
Lembaga Pendidikan Al-Hikmah
Surabaya - Jawa Timur

Abdussalam Panji Gumilang
(Alumni)
Syaykh Al-Zaytun
Indramayu - Indonesia

H. Bisri Ilyas
(Alumni)
Pengusaha dan Direktur Utama
CV. Bumi Gresik
Gresik - Jawa Timur

mengucapkan

Selamat & Sukses

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

Yang diperingati dari tanggal 10 April 2006 hingga 28 Mei 2006

Semoga Pemangku Pondok, Trimurti Dan Seluruh Jajarannya Dalam Lindungan Allah,
Sihat Sejahtera, Damai Lahir Batin, Terus Mendidik Dan Membangun
Demi Kejayaan Indonesia Serta Umat Manusia

12 Rabi' al-Awwal 1427 H / 10 April 2006 M

Century Bank everlasting growth

Kemilau sensasi hadiah dari:

Tabungan Century Mas

Gratis Personal Accident hingga Rp. 5 Milyar

Makin seru hadiahnya, tetap berlimpah keuntungannya

Periode Februari s/d Mei 2006

Tabungan Century Mas dengan keuntungan yang berlimpah, kini hadir dengan hadiah yang semakin seru. Mulai dari Mobil - Suzuki APV Type GL, Sepeda Motor - Suzuki Smash dan Logam Mulia 50 gr. Tabungan Century Mas juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan (Personal Accident) hingga Rp. 5 Milyar secara Gratis !

Segera hubungi kami untuk pembukaan Tabungan Century Mas, hadiah seru dari Tabungan Century Mas telah menanti anda.

5 MOBIL SUZUKI APV

5 Motor Suzuki Smash

5 Keping Logam Mulia 50 gr.

PT BANK CENTURY, Tbk.

Kantor Pusat

Sentral Senayan I Building, 1st, 2nd, 16th floor
Jl. Asia Afrika No. 8, Jakarta 10270, Indonesia
Telp. (021) 572 4180 (H) Fax. (021) 572 4443/46